



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KOTA BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2011 – 2015 ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Blitar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD sebagaimana diatur dalam Perda Kota Blitar Nomor Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013) menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2015.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN.
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB VI	PENUTUP.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2015.

Pasal 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2014
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

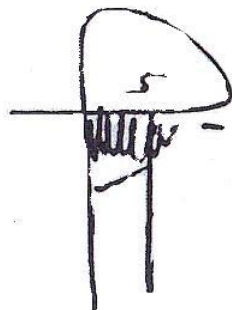
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' with a horizontal line across the middle and a vertical line extending downwards.

Hardiyanto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memenuhi ketentuan Pasal 103, 107, 108 dan 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kota/Kabupaten. Rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2015 merupakan sebuah draf/rancangan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun 2015, yang akan dikoordinasikan dengan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dan dikonsultasikan kepada publik.

Rancangan awal RKPD Kota Blitar 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2011-2015, dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 dan RPJMN. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2015 yang tersusun menjadi Pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). RKPD juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tahapan lanjutan setelah dokumen Rancangan Awal RKPD mendapat masukan melalui konsultasi publik dan usulan pada saat Musrenbang Kelurahan sampai dengan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Proses penyusunan dokumen Rancangan RKPD ini merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dalam proses penyusunannya, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Sehingga penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar sendiri serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang diformulasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (MUSRENBANG RKPD) Kota Blitar serta selalu memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2015 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penjaringan aspirasi dan usulan kebutuhan masyarakat di tingkat RW yang disebut REMBUG WARGA, dilanjutkan penyusunan skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan melalui program kelurahan melalui MUSRENBANG

Kelurahan. Berdasarkan masukan dan usulan pembangunan masyarakat dari masing-masing wilayah kelurahan, maka dilakukan sinkronisasi dan penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2015, melalui forum yang bernama MUSRENBANG RKPD di Kecamatan.

Disamping sebagai bahan awal penyusunan rancangan Renja SKPD, acuan penyelarasan usulan pembangunan dengan program daerah dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan, maka dokumen Rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2015 ini akan dimintakan masukan penyempurnaan dari pemangku kepentingan dalam forum KONSULTASI PUBLIK. Rancangan awal RKPD yang telah dikonsultasikan publik dan diselaraskan serta dilakukan penajaman melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan, selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2015 berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD yang dilakukan oleh Bappeda.

Selanjutnya Bappeda Kota Blitar akan mengajukan Rancangan dokumen RKPD ini kepada Walikota Blitar, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dokumen yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kota Blitar Tahun 2015. Pelaksanaan musrenbang RKPD ini dimaksudkan, agar ada penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2015. Proses

penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut, mencakup :

1. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Blitar, dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur;
2. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musrenbang RKPD di kecamatan dan usulan dari musyawarah pembangunan di kelurahan;
3. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Kota Blitar;
4. prioritas pembangunan daerah Kota Blitar serta rencana kerja dan pendanaannya;
5. sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Propinsi Jawa Timur.

Bagi Pemerintah Kota Blitar, Tahun 2015 mempunyai nilai historis dalam perjalanan RPJMD 2011-2015 Kota Blitar, sebagai periode akhir dari pencapaian seluruh rencana pembangunan jangka menengah sehingga pada tahun 2015 dilakukan penuntasan program-program yang mengarah pada pencapaian visi misi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2015 memegang peranan strategis dalam mengimplementasikan keseluruhan program-program prioritas daerah melalui kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar. RKPD Kota Blitar Tahun 2015 disusun dengan mengakomodasi perkembangan dan dinamika pembangunan di tingkat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu dinamika yang berkembang saat ini di Pemerintah Kota Blitar adalah adanya penataan kelembagaan baru. Seiring dengan telah ditetapkan Perda Kota Blitar

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar tanggal 9 Desember 2013, ada beberapa SKPD yang digabung dan *dimarger* menjadi SKPD baru dan SKPD yang dipecah menjadi 2 atau lebih SKPD baru, seperti DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) digabung dengan Kantor Lingkungan Hidup menjadi SKPD baru dengan nama BLH (Badan Lingkungan Hidup). Ada juga DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) dipecah menjadi 2 SKPD yaitu : Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah). Termasuk obyek penataan kelembagaan ini adalah penataan nama struktur organisasi internal di beberapa SKPD, seperti nama-nama bidang pada Bappeda dan seksi pada KPT Kota Blitar.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas betapa penting dan strategisnya posisi Rancangan RKPD ini sebagai bahan dasar yang akan memberikan gambaran awal dan arah rencana program Kota Blitar Tahun 2015. Rencana program daerah inilah yang akan dijabarkan melalui kegiatan SKPD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan tahunan daerah yang berupa RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kota Blitar Tahun 2015. Melalui dokumen RKPD inilah, akan terlihat tahapan pelaksanaan dan realisasi capaian program daerah sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar 2011-2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 11) Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 12) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

13) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2015-2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan RKPD merupakan draf/rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka satu tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJP. Rancangan inilah yang akan dimintakan klarifikasi dengan seluruh SKPD dan dikonsultasikan dengan publik sebelum menjadi sebuah dokumen Rancangan RKPD. Setelah menjadi Rancangan RKPD, dokumen ini akan dimintakan persetujuan kepada kepala daerah, untuk dijadikan bahan dasar Murenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2015. Berdasarkan hasil kesepakatan peserta musrenbang, akan dilakukan verifikasi dan sinergitas dengan dokumen RKP dan RKPD Prpinsi Jawa Timur, untuk dijadikan Rancangana Akhir RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah menjadi RKPD Kota Blitar Tahun 2015.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu serta konsisten dengan dokumen perencanaan ditingkat provinsi maupun pusat. Dengan demikian pengambilan keputusan penetapan

program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2015 berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun 2015 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Penutup

Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada tahun 2015 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan dan penyajian dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arahan awal pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2015. Hal ini merupakan tahapan lanjutan dari Rancangan Awal RKPD setelah mendapatkan penyempurnaan, sinkronisasi dan harmonisasi dengan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan melalui Forum SKPD Pemerintah Kota Blitar.

1.5.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2015 ini adalah :

- a. Menyiapkan informasi tentang Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang berisikan rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Kota Blitar tahun 2015;
- b. Menyiapkan bahan Musrenbang RKPD Kota Blitar sebagai langkah penyempurnaan atas Rancangan awal RKPD;
- c. Memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Blitar dan .

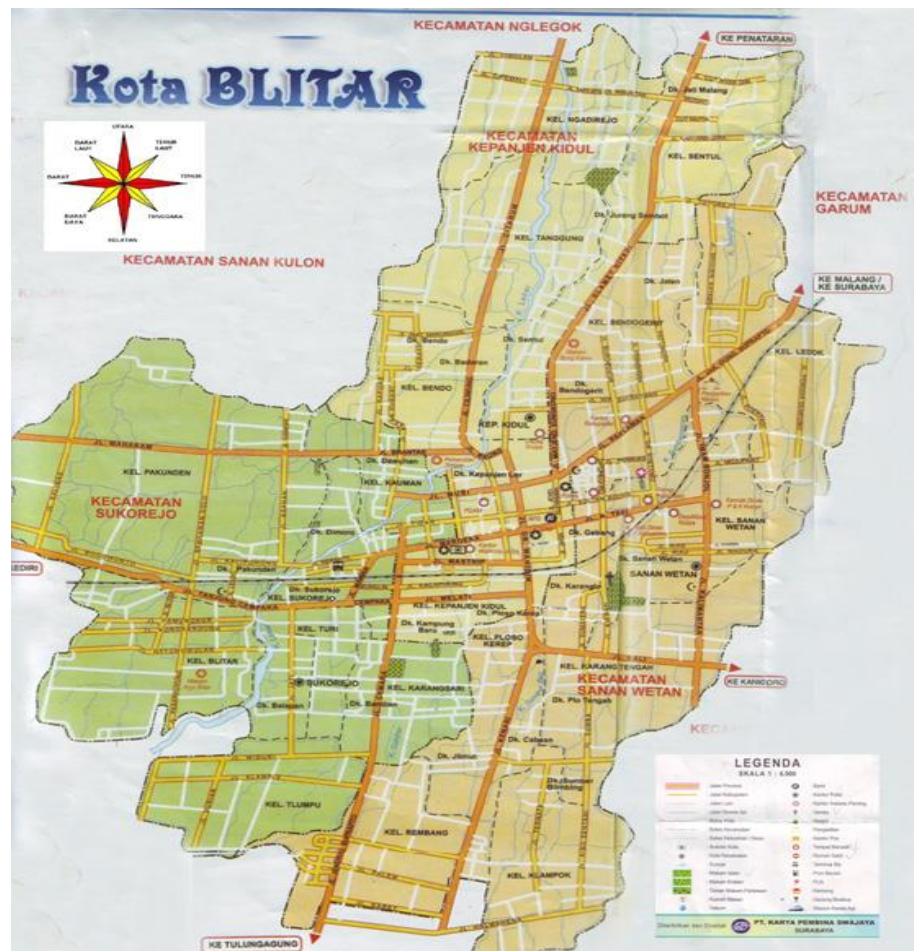
BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

Kota Blitar masuk wilayah Provinsi Jawa Timur, secara geografis terletak diujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut. Kota Blitar berada dikaki Gunung Kelud dan berjarak 160 kilometer sebelah tenggara Kota Surabaya, dengan posisi geografis berada di 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan, sebagaimana gambar berikut :



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Blitar, bahwa Kota Blitar dengan luas wilayah $\pm 32,58 \text{ km}^2$ merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah administratif kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sananwetan yang mencapai luas wilayah $12,152 \text{ km}^2$ dan yang terkecil Kecamatan Sukorejo yaitu hanya seluas 9.925 km^2 . Dengan batas-batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Dengan rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m, secara topografi memiliki wilayah dengan udara cukup sejuk berkisar antara 24° C - 34° C . Ketinggian di bagian Utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 20 sampai 150 , bagian tengah 175 m dan bagian Selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 00 sampai 20. Dilihat dari Topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. Kondisi topografi Kota Blitar dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kondisi topografi tersebut menggambarkan Kota Blitar sebagai daerah datar pada dataran rendah dengan kemiringan 0 – 2%.

Daerah tangkapan hujan ditentukan berdasarkan dari topografi pada daerah tertinggi serta luas pengaliran yang ada memungkinkan aliran dari saluran induk masuk ke sungai terdekat, sehingga limpahan air permukaan mengalir dan terkumpul pada tiga sistem drainasi utama main drain, yaitu :

- ❖ DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat.
- ❖ DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur.
- ❖ DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat

Kota Blitar berada di sebelah selatan katulistiwa dengan tipe iklim C-3. Berdasarkan data literatur yang bersumber dari 4 (empat) stasiun pengamatan hujan yaitu stasiun Kali Badak, Sumber ringin, Bendogerit dan Rembang, tercatat bahwa rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan April dan terendah pada Bulan Mei, Agustus dan September. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari sedangkan terendah adalah Bulan Nopember. Dengan jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah Litosol dan Regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanis Gunung Kelud. Jenis tanah Regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur, dimana tanah regosol yang di Kota Blitar berasosiasi dengan tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai intermediet. Jenis tanah litosol ini mempunyai konsistensi gembur, porositas, daya tahan untuk menahan air dan tahan terhadap erosi.

Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya sebesar 25% memiliki tekstur sedang yang sifatnya kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari penyediaan unsur hara maka tekstur halus ini relatif baik dibandingkan tekstur sedang.

Kota Blitar yang memiliki luas 32,58 Km² terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, dengan luas 9,93 Km², Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 Km² dan Kecamatan Sananwetan 12,15 Km². Dari

tiga Kecamatan tersebut terbagi menjadi 21 Kelurahan. kawasan terbangun mencapai 1.638 Ha atau sekitar 50,27 % dari keseluruhan wilayah dan kawasan belum terbangun sekitar 1.620 Ha.

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,23%. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Blitar sebesar 148.834 jiwa, maka pada tahun 2012 mencapai 150.670 jiwa. Berdasarkan data registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, dari jumlah penduduk tersebut memilikirasio jenis kelamin 0,996 yang artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Sedangkan berdasarkan tingkat sebaran penduduknya, Kecamatan Sananwetan mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 56.139 jiwa, diikuti Kecamatan Sukorejo sebanyak 51.228 jiwa, dan terakhir dengan jumlah penduduk paling sedikit Kecamatan Kepanjenkidul hanya 43.303 jiwa. Sedangkantingkat kepadatan pendudukKota Blitar pada tahun 2012 sebesar 4.626 jiwa/km² atau sekitar 4 orang/m², dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukorejo sebesar 4.801 jiwa/km², diikuti Kecamatan Sananwetan sebesar 4.578 jiwa/km² dan terakhir adalah Kecamatan Kepanjenkidul dengan kepadatan penduduk sebesar 4.315 jiwa/km², selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel.2.1.
Luas Wilayah dan Penduduk Menurut Jumlah dan Kepadatan Tiap
Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Sukorejo	9,923	51.228	4.801
2	Kepanjenkidul	10,501	43.303	4.315
3	Sananwetan	12,149	56.139	4.578
	Jumlah Kota	32,573	150.670	4.626

Sumber : Dispenduk & Capil Daerah Kota Blitar, 2014

Berdasarkan tabel di atas, meskipun Kecamatan Sananwetan paling luas dan paling banyak penduduknya, tetapi kepadatan penduduknya hanya 4.578 jiwa/km² masih dibawah kepadatan rata-rata tingkat Kota Blitar yang mencapai 4.626 jiwa/km². Sedangkan secara terperinci jumlah penduduk masing-masing kelurahandapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
dan Kepadatannya Akhir Tahun 2013

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Kepanjenkidul	0,867	4.122	4.396	8.518	9.824
2.	Ngadirejo	1,910	1.737	1.727	3.464	1.814
3.	Sentul	2,683	3.867	3.917	7.784	2.901
4.	Kauman	0,680	3.191	3.250	6.441	9.472
5.	Tanggung	2,230	2.748	2.641	5.389	2.417
6.	Bendo	1,518	2.813	2.813	5.626	3.706
7.	Kepanjenlor	0,613	3.009	3.072	6.081	9.920
8.	Pakunden	2,262	5.390	5.238	10.628	4.698
9.	Blitar	1,332	2.263	2.365	4.628	3.474
10.	Tlumpu	1,015	1.823	1.816	3.639	3.585
11.	Turi	0,508	1.552	1.594	3.146	6.193
12.	Karangsari	0,882	2.802	2.754	5.556	6.299
13.	Sukorejo	1,466	7.588	7.453	15.041	10.260
14.	Tanjungsari	2,458	4.345	4.245	8.590	3.495
15.	Gedog	2,650	5.452	5.448	10.900	4.113
16.	Ploso kerep	1,248	2.324	2.370	4.694	3.761
17.	Klampok	1,530	2.270	2.226	4.496	2.939
18.	Sanan wetan	2,127	7.100	7.301	14.401	6.771

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan		
19.	Rembang	0,844	1.498	1.565	3.063	3.629
20.	Karangtengah	1,795	3.922	3.826	7.748	4.316
21.	Bendogerit	1,955	5.362	5.475	10.837	5.543
Jumlah Kota		32,573	75.178	75.492	150.670	4.626

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Blitar, Desember 2013

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat disini berbicara tentang analisis kinerja terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Blitar yang meliputi : pertumbuhan PDRB, nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB serta perkembangan kontribusi sektor terhadap PDRB. Termasuk menganalisis pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk). Disamping itu, juga akan diberikan gambaran analisis terhadap pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk), dan laju inflasi di Kota Blitar.

Fokus kesejahteraan masyarakat akan berbicara tentang analisis kinerja terhadap indikator-indikator berikut pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), laju inflasi dan PDRB per kapita, dengan perkembangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2013
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Ribu Rp) Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2011		2012		2013 **)	
		(Rp)	(%)	(Rp)		(%)	
1	PRIMER	71,990,450	6.85	70.740.268	6.30	71,990,450	6.85
	1.1. Pertanian	71,850,276	99.81	70.614.274	99.82	75.173.483	6.95
	1.2. Pertambangan	140,174	0.19	125.994	0.18	108.697	0,10
2	SEKUNDER	179,592,181	17.08	193.842.536	17.27		
	1.1. Industri Pengolahan	116,199,784	64.70	126.613.080	65.32	130.689.408	64.70
	1.2. Listrik, Gas dan Air	16,342,739	9.10	16.986.724	8.76	16.328.217	9.10

No	Sektor / Lapangan Usaha	2011		2012		2013 **)	
		(Rp)	(%)	(Rp)		(%)	
	1.3. Bangunan	47,049,658	26.20	50.242.732	25.92	50.671.781	26.20
3	TERSIER	799,614,474	76.07	857.880.644	76.43	799,614,474	76.07
	1.1. Perdagangan, Hotel Restoran	328,122,694	41.04	356.731.111	41.58	386.481.447	41.04
	1.2. Angkutan dan Komunikasi	141,312,859	17.67	150.512.238	17.54	157.829.107	17.67
	1.3. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	115,991,105	14.51	125.250.581	14.61	132.690.238	14.51
	1.2. Jasa - jasa	214,187,816	26.79	225.386.715	26.27	247.957.529	26.79
	KOTA BLITAR	1,051,197,104	100	1.122.463.449	100	1,051,197,104	100

Keterangan : **) Angka sementara
Sumber : BPS Kota Blitar , 2013

Data perkembangan laju inflasi di Kota Blitar dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d 2013 Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2011	2012	2013 **)	Rata-rata Pertumbuhan
1	PRIMER	3.83	4.70		
	1.1. Pertanian	3.84	4.70	5.88	7.34
	1.2. Pertambangan	1.71	5.69	2.55	5.79
2	SEKUNDER	4.84	5.21		
	1.1. Industri Pengolahan	4.92	5.13	7.34	7.43
	1.2. Listrik, Gas dan Air	2.83	1.12	4.16	5.14
	1.3. Bangunan	5.07	6.41	.93	8.93
3	TERSIER	5.25	5.83		
	1.1. Perdagangan, Hotel, Restoran	5.55	5.01	6.23	7.53
	1.2. Angkutan dan Komunikasi	4.22	4.93	5.25	5.75
	1.3. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	5.41	7.30	6.90	7.66
	1.2. Jasa - jasa	5.26	6.57	5.66	7.15
	INFLASI PDRB KOTA BLITAR	5.04	5.59		

1). *Tingkat Pendidikan Masyarakat*

Tabel 2.6.
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Blitar Tahun 2011 - 2013

NO	Uraian	2011	2012	2013*)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun bisa membaca dan menulis	35.764	36.280	34.295
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	37.073	37.437	35.023
3	Angka melek huruf (%)	96,47	96,91	97,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2013

Tabel 2.7
Angka Melek Huruf Tahun 2012 Kota Blitar

N0	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 th bisa membaca & menulis	Jumlah pend usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf (%)
1.	Sananwetan	12.335	12.729	96,90
2.	Kepanjenkidul	10.427	10.759	96,91
3.	Sukorejo	13.518	13.949	96,91
J u m l a h		36.280	37.437	96,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2013

Tabel 2.5.
APK dan APM Kota Blitar Tahun 2011-2013

Indikator	Tahun	SD/MI	SMP/MTs/ SMPLB	SMA/SMK/MA
A P K	2011	147,24 %	116,31 %	129,59 %
	2012	123,41%	147,24%	158,79%
	2013 *)	133,46 %	134,36 %	145,29 %
A P M	2011	123,41 %	147,24 %	158,79 %
	2012	147,24%	116,31%	129,59%
	2013 *)	126,35 %	134,01 %	149,00 %

2). *Angka Rata-Rata Lama Sekolah*

Rata-rata lama sekolah Tahun 2011-2013 Kota Blitar sebagaimana dalam tabel dibawah berikut :

Tabel. 2.8.
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2011	2012	2013
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,75	10,00	10,10

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2013

3). *Derajat Kesehatan Masyarakat*

Rata-rata Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Blitar pada tahun 2011 sebesar 70,55 dan pada tahun 2012 sebesar 70,88, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Blitar 2011-2013

No	Tahun	Usia Harapan Hidup
1	2011	72,45
2	2012	72,70
3	2013	72,98

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2013

4). *Perkembangan* Penduduk Miskin

Tabel 2.10
Jumlah dan Prosentase KK dan Penduduk Miskin Kota Blitar

Tahun	Jumlah KK	KK MISKIN	% KK miskin	Penduduk (Jiwa)	Penduduk miskin (Jiwa)	% Pendu- duk miskin
2011	40.420	4.288	10,60 %	148.784	11.903	8,00 %
2012	43.773	5.462	12,47 %	150.670	10.185	6,76 %
2013 *)	44.490	4.555	10,23 %	150.940	8.905	5,90 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim Penyusun RKPD 2014

*) data sementara, kondisi s/d bulan Maret 2013

Tabel 2.11
Jenis Usaha menurut Kategori dan Kecamatan

No	Kategori	Jumlah Usaha			
		Sukorejo	Kepajen kidul	Sanan wetan	Kota Blitar
1.	Pedagang besar & eceran	3.465	3.295	2.136	8.896
2.	Akomodasi & makan minum	1.156	1.121	920	3.197
3.	Industri Pengolahan	694	831	469	1.994
4.	Jasa kemasyarakatan, sosbud, hiburan & perorangan lainnya	692	595	628	1.915
5.	Transpotasi, pergudangan dan komunikasi	684	533	848	2.065

Sumber : BPS Kota Blitar, 2012

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Selain melalui beberapa aspek sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur berdasarkan aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang berbentuk pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pada aspek pelayanan umum diukur melalui perkembangan indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar.

2.1.3.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib

1). Pendidikan

Kota Blitar menetapkan urusan pendidikan sebagai prioritas pertama dalam Visi dan misi daerahnya. Konsekuensi logis dari penempatan urusan pendidikan pada prioritas utama di dalam RPJMD 2011-2015 adalah prosentase penyediaan anggaran pembangunan urusan pendidikan pada APBD Kota Blitar lebih dari 20 %. Implementasi program dan kegiatan dari misi ini antara lain berupa Pendidikan Gratis untuk seluruh siswa yang tercatat sebagai warga Kota Blitar. Rincian pelaksanaan pendidikan gratis tersebut meliputi pembebasan siswa dari biaya operasional sekolah, pengadaan buku wajib dan LKS, termasuk seragam sekolah terdiri dari baju, sepatu dan tas.

Penyediaan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20 % pada APBD Kota Blitar yang dilakukan pada setiap tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar ketaatan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang salah satunya mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % dari total APBN atau APBD.

Selain implementasi melalui pendidikan gratis pembangunan pendidikan juga diimplementasikan melalui beberapa program, seperti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Luar Biasa serta Program Pendidikan Non Formal. Indikator penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Indikator Capaian berikut :

TABEL 2.16
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.1.	Pendidikan dasar:				
1.1.1.	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A	17.160	16.015	16.015	12.283
1.1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	13.216	13.945	13.987	14.964
1.1.3.	Angka Partisipasi Murni (SD)	120,03%	114,84 %	100 %	100%
1.1.4.	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B	10.697	9.194	9.194	6.257
1.1.5.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	8.123	7.405	7.405	7.550
1.1.6	Angka Partisipasi Murni (SMP)	131,68 %	124,16 %	96 %	98%
	Jumlah Guru SD	874	855	855	
1.1.3.	Rasio Guru Terhadap Murid (SD)	1 : 17,60	1 : 17,35	1:17.00	1:16.00
	Jumlah Guru SLTP	661	658	658	
1.1.4.	Rasio Guru Terhadap Murid (SLTP)	1 : 13,40	1 : 13,38	1:13,10	1:13,00
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV (SD)	568	727	770	
1.1.5	Prosentase Guru Layak (SD)	100%	61,01%	81 %	85%
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV (SLTP)	595	626	657	
1.1.6	Prosentase Guru Layak (SLTP)	100%	80,80%	93 %	94%
	Jumlah siswa putus sekolah (SD)	8	4	0	0
1.1.7.	Angka Putus Sekolah (SD)	0,09%	0,08%	0,03%	0,00%
	Jumlah siswa putus sekolah (SLTP)	8 siswa	4 siswa	7 siswa	5 siswa
1.1.8	Angka Putus Sekolah (SLTP)	0,09%	0,08%	0,07%	0,00%
	Jumlah ruang kelas (SD)	562	560	560	

1.1.9	Rata rata jumlah murid dalam 1 rombel (SD)	26,1	25,8	25,8	25,4
	Jumlah ruang kelas (SLTP)	268	268	268	
1.1.10	Rata-rata jumlah murid dalam 1 rombel (SLTP)	26	26	26	25,5
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	2.418	2.425	2.425	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI Pada tahun ajaran sebelumnya	2.418	2.425	2.425	
1.1.11	Angka kelulusan Unas SD	100%	100%	99,7 %	99,9%
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	3.407	3.415	3.415	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs Pada tahun ajaran sebelumnya	3.413	3.415	3.415	
1.1.12	Angka kelulusan Unas SMP	99,82%	98,74%	99,9 %	100%
1.2.	PENDIDIKAN MENENGAH				
	Jumlah siswa usia 15-19 thn dijenjang SLTA/Paket C	14.385	14.382	14.382	
	Jumlah penduduk kelompok usia 15-19 thn	12.000	12.119	12.119	
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	100 %	100 %	100 %	100%
	Jumlah Guru di SLTA/Paket C	6	6	6	
1.2.2	Rasio Guru Murid (SLTA)	1 : 13,80	1 : 12,46	1:13,60	1:13,55
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV (SLTA)	1.079	1.044	1.044	
1.2.3	Jumlah Guru Layak (%)	100%	71,32%	94 %	94,5%
	Jumlah siswa usia 15-19 thn dijenjang SLTA putus sekolah	145	280	14	
1.2.4	Angka Putus Sekolah (SLTA)	1,01 %	1,95%	0,1 %	0,05%
	Jumlah kelas pada jenjang SLTA	257	257	257	
1.2.5	Rata-rata jumlah murid dalam 1 rombel (SLTA)	31	32	32	31
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	4.417	4.420	4.417	
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA Pada tahun ajaran sebelumnya	4.434	4.441	4.434	
1.2.6	Angka kelulusan Unas SLTA	99,62%	98,17%	99,80 %	99,90%

4

2). Kesehatan

Target pencapaian **Pembangunan Milenium** : *Millennium Development Goals (MDGs)* untuk dicapai pada tahun 2015 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang

terurai dalam **Deklarasi Milenium**. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Bebebrapa tujuan yang dideklarasikan antara lain mengurangi kematian anak balita hingga dua pertiga, meningkatkan kesehatan ibu dan Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.

Sebagai salah satu pemerintahan daerah yang pemerintahan pusatnya turut serta meratifikasi deklarasi tersebut maka pemerintah kota Blitar turut serta bertanggungjawab menyelenggarakan upaya pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan. Selain sudah menjadi tujuan MDGs, Pemerintah Kota Blitar menyadari bahwa kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan modal pembangunan khususnya ketersediaan Sumber daya manusia yang produktif. Kebijakan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 ditempatkan sebagai kebijakan prioritas dan menjadi komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk menjamin Hak Kesehatan masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk ketaatan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 pasal 28 ayat 1.

Dalam rangka perwujudan visi dan misi Kota Blitar pada urusan kesehatan, program dan kegiatan implementasi melalui upaya preventif dan promotif dan kuratif serta rehabilitatif. 4 (Empat) program utama pembangunan kesehatan berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- Ω Peningkatan Kesehatan Dasar Masyarakat;
- Ω Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- Ω Peningkatan Perilaku dan Lingkungan Sehat;
- Ω Peningkatan pelayanan RSUD dan UPTD Kesehatan

Beberapa indikator capaian pada urusan kesehatan yang telah diselenggarakan antara lain Sarana kesehatan, Mortalitas (angka kematian), status gizi dan umur harapan hidup digunakan sebagai indikator derajat kesehatan untuk melihat status kesehatan masyarakat dan keberhasilan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Hasil capaian tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan proyeksi capaian pada 2014 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.17
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013*)	2014
1.	Jumlah RW	187	187	187	187
2.	Jumlah posyandu balita	163	163	163	163
3.	Rasio posyandu balita per RW	1 : 0,87	1 : 0,87	1 : 0,87	1 : 0,97
4.	Jumlah Kelurahan	21	21	21	21
5.	Jumlah posyandu Lansia	21	21	21	21
6.	Rasio Posyandu Lansia per Kelurahan	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
7.	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu	26	26	26	26
8.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per jumlah kelurahan	1 : 1.24	1 : 1.24	1 : 1.24	1 : 1
9.	Jumlah Tenaga Medis	103	129	129	
10.	Jumlah Penduduk	148.872	150.670	150.940	152.992
11.	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	69	96	95	95
12.	Jumlah pasien rujukan maskin di sarkes strata 2 dan strata 3	18.821	9.236	16.633	
13.	Jumlah masyarakat miskin	16.633	20.482	20.482	20.482
14.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100%

3). Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup di Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu global dan kebijakan nasional saat ini yang lebih banyak didominasi pada adaptasi dan mitigasi penanggulangan perubahan iklim global. Bahwa saat ini kerusakan lingkungan telah banyak memberikan dampak negatif pada siklus normal kehidupan manusia. Kesadaran untuk melakukan konservasi terhadap lingkungan mutlak diperlukan untuk menjadi kehidupan manusia dapat terus lestari.

Program Pengelolaan Lingkungan hidup diarahkan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis seiring dengan cepatnya perkembangan penduduk yang memberikan konsekuensi terhadap pembukaan baru kawasan pemukiman, penutupan lahan resapan, ruang terbuka hijau dan kawasan terbangunan lainnya yang merubah fungsi lahan. Perkembangan masyarakat tidak dapat dihindari untuk itu pembangunan daerah harus terus berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan, pemanfaatan sumberdaya yang ada secara bijaksana, merehabilitasi kerusakan lingkungan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan kualitas lingkungan hidup, sehingga terwujud visi: KOTA BLITAR YANG BERSIH ASRI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Perencanaan pembangunan lingkungan hidup di Kota Blitar sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Kota Blitar 2011-2015, merupakan program lintas SKPD. Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Kota Blitar dalam konservasi lingkungan. Seluruh SKPD mendapatkan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini artinya orientasi pembangunan harus mempertimbangkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Fokus penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah peningkatan kebersihan kota dan peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat berbagai kegiatan seperti perindustrian, pemukiman, pertanian dan transportasi serta kegiatan pembangunan lainnya.

Untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kota Blitar ditetapkan beberapa indikator capaian sebagai alat ukur sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

TABEL 2.18
Indikator Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
3.1	Luas Wilayah	32,5 km	32,5 km	32,5 km	32,5 km
3.2	Luas RTH	4,55 km	4,55 km	4,55 km	
3.3	% Ruang Terbuka Hijau Publik	14 %	14 %	16 %	16,,5%
3.4	Jumlah Rumah Tangga / Permukiman dengan sanitasi sehat	34.636	34.636	34.636	45.569
3.5	Jumlah Rumah Tangga	39.472	39.472	39.472	45.691
3.6	Rasio Permukiman dengan sanitasi sehat	67 %	70 %	73 %	99,73 %
3.7	Jumlah Timbulan Sampah	354,5 m3	354,5 m3	354,5 m3	414 m3
3.8	Jumlah Sampah terangkut	220,5 m3	220,5 m3	220,5 m3	294
3.9	Prosentase sampah yang tertangani	62,45%	62,50%	62,50 %	71,01%
3.10	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air				
3.11	jumlah usaha dan / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	9	9	9	
3.12	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	26	26	26	
3.13	Presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	35 %	42 %	80 %	95%
3.14	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak				
3.15	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	2	2	2	2
3.16	jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah dinventarisasi	4	4	4	4
3.17	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	50 %	50 %	80 %	95%
3.18	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa				
3.19	luasan lahan yang telah ditetapkan melalui keputusan walikota) dan informasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	0	0	0	0
3.20	Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	0	0	0	0
3.21	Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0 %	0 %	80 %	80 %
3.22	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup				

3.22	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1	1	0	1
3.23	Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kota dalam satu tahun bersangkutan.	1	1	0	1
3.24	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100%

4). Pekerjaan Umum

Dalam rangka menuju Kota Blitar sebagai Kota perdagangan barang dan jasa unggulan serta pariwisata maka, kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum difokuskan pada program peningkatan kuantitas infrastruktur layanan perdagangan dan jasa serta mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang mampu membuka akses dan berdampak pada peningkatan sekaligus pertumbuhan perekonomian masyarakat kelompok mikro, kecil dan tingkat menengah serta memperkuat perekonomian makro Kota Blitar, dengan capaian kinerja dan Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.19
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014 *)
4	PEKERJAAN UMUM				
4.1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	262,695	263,195	263,195	263,195
4.2	Panjang seluruh jalan kota	263,195	263,195	263,195	263,195
4.3	Rasio jalan dalam kondisi baik	99.81%.	100%	100 %	100 %
4.4	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	81	85	93	93
4.5	Jumlah seluruh Jembatan	93	93	93	93
4.6	Rasio Jembatan dalam kondisi baik	84.9%.	87.09%	100 %	100 %

5). Tata Ruang

Untuk pemanfaatan ruang di Kota Blitar sehingga memenuhi unsur etika (ketentuan dan keamanan) estetika (keindahan dan kenyamanan) serta memenuhi azas keadilan pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan keterpaduan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis maka ditetapkan dokumen perencanaan tata ruang ke dalam peraturan daerah.

Perencanaan tata ruang juga merupakan teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama. Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang di Daerah Kota Blitar dilakukan dalam perspektif perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perspektif perencanaan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Pada perspektif pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan ruang-ruang publik sebagai harmonisasi dari perkembangan dan peningkatan kuantitas ruang privat yang cukup pesat dengan menyelenggarakan perijinan mendirikan bangunan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1991 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Perspektif pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan melakukan pengawasan pemanfaatan ruang oleh pemerintah, instansi maupun masyarakat. Pengawasan pada aspek pengendalian dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan dari berdirinya bangunan pada suatu lahan / ruang yang ada di Kota Blitar.

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan tata ruang dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 2.20
Indikator Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
5.1	Keberadaan PERDA RTRW				
5.1.1	Perda RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada
5.1.2	Perda RDTR	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5.1.3	Perda RKS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.1.4	Perda RTBL	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.2.	Penataan Ruang Informasi				
5.2.1	Tersedianya informasi rencana tata ruang(RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Jumlah peta analog berisi RTRW Kota dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun (kabupaten/kota dan kecamatan)	6	30	40	40
	Jumlah peta analog berisi RTRW Kota dan rencana rincinya yang tersedia akhir tahun (kelurahan)	Belum	Belum	Belum	Belum
5.2.1.1	Jumlah peta digital				
5.2.1.2	Jumlah peta digital seluruh kota/kecamatan/kelurahan	0	3	3	3
5.2.2	Penataan Ruang: Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	0	3	3	3
	Jumlah konsultasi publik	1	3	3	3
	Jumlah konsultasi publik kota	1	3	3	3
5.2.2.1	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang,yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	50 %	50 %	50 %	50 %
5.2.3	Ijin Pemanfaatan Ruang				
	Jumlah Perda tentang RTRW Kota	1	1	2	2
	Jumlah Perda tentang RTRW Kota yang seharusnya ada(RTRW, RDTR, RKS,RTBL)	4	4	4	4
5.2.3.1	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya (RTRW, RDTR, RKS,RTBL)	25 %	25 %	50 %	50 %
5.2.4	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang				

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
	Jumlah kasus yang tertangani	0	0	0	0
	Jumlah kasus yang seharusnya tertangani (belum ada)	0	0	0	0
5.2.4.1	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	0	0	0	0
5.2.5	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik				
	Luasan RTH publik yang tersedia	453,17 Ha	550,37 Ha	550,37 Ha	550,37 Ha
	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia	647,38 Ha	647,38 Ha	647,38 Ha	647,38 Ha
5.2.5.1	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	70 %	85 %	85 %	85 %

6). Perencanaan

Memenuhi azas kepastian arah penyelenggaraan pemerintahan maka telah disusun rencana pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan ditetapkan dimaksudkan untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pembangunan sehingga pada setiap tahunnya dapat ditetapkan skala prioritas pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah / daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan seluruh pemangku kepentingan di daerah turut serta sebagai bagian yang tak bisa terpisahkan. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi kebijakan pemerintah yang akan diterapkan kepada masyarakat.

Dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan maka perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara penyusunan perencanaan yang menghasilkan rencana – rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dan elemen lain di daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran pelaksana kebijakan dokumen perencanaan pembangunan meliputi Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD dan DPA SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dari dokumen tersebut selanjutnya di implementasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahun. RPJM Daerah merupakan penjelasan dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kesadaran bahwa pembangunan merupakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan maka dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tahap awal penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara pasti aspirasi masyarakat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kebutuhan pembangunan melalui musrenbang. Musrenbang dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Bahkan untuk memperoleh detail rencana yang menjadi kebutuhan masyarakat, forum penjaringan aspirasi dilakukan sampai tingkat organisasi kelompok masyarakat terkeci yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam rangka keseimbangan, selain melalui musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan oleh DPRD melalui Jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) pada masa reses DPRD sesuai dengan daerah perwakilan anggota DPRD . Semua hasil penjaringan ini kemudian dijabarkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Rancangan PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas untuk masing – masing urusan, dan plafon anggaran sementara untuk masing – masing program dan kegiatan.

Rancangan KUA dan PPAS ini kemudian dibahas bersama DPRD Kota Blitar yang sekaligus sebagai wahana integrasi hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum musrebang oleh pihak pemerintah kota Blitar (eksekutif) dan forum JASMAS (reses) oleh pihak DPRD (legislatif). Hasil integrasi keduanya kemudian disepakati dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. Berdasarkan nota kesepakatan, dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang akan diimplementasikan dalam waktu satu tahun dalam bentuk APBD.

Tahap akhir dari penyelenggaraan urusan perencanaan adalah pengendalian, evaluasi dan pengawasan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja, Aparat Pengawas Fungsional, DPRD dan masyarakat. Evaluasi hasil capaian kegiatan dilaksanakan oleh Pimpinan Satuan Kerja, Bappeda, DPRD dan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dilaksanakan oleh Walikota kepada DPRD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dilaksanakan oleh Walikota kepada Presiden melalui Gubernur.

Capaian kinerja dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.21
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
6.1	TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN : RPJMD YG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERDA/PERKADA				
6.1.1	Keberadaan PERDA RPJP	Ada	Ada	Ada	Ada
6.1.2	Keberadaan PERDA RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN : RPKD YANG TELAH DITETAPKAN DGN PERKADA				
6.2.1	Keberadaan PERDA RPKPD	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	PENYELENGGARAAN PROGRAM				
6.3.1	Jumlah Program RPJMD	26	29	27	27
6.3.2	Jumlah Penjabaran Program RPJMD kedalam RPKD	26	30	118	118
6.4.3	Penjabaran Program RPJMD kedalam RPKD	100 %	100 %	118 %	118 %
6.4.	PELAKSANAAN MUSRENBANG				
6.4.1	Tingkat RT / RW	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4.2	Tingkat Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4.3	Musrenbang RPKD di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %

7). Perumahan.

Sebagaimana layaknya karakteristik yang dimiliki oleh kota pada umumnya, dalam hal pertumbuhan kebutuhan terhadap pemukiman di Kota Blitar juga cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan penduduk baik secara alamiah melalui jumlah kelahiran maupun akibat migrasi sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan pendapatan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk membangun perumahan.

Kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan di Kota Blitar diarahkan pada terwujudnya penyediaan sarana permukiman masyarakat yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat dengan memperhatikan estetika dan keterbatasan lahan.

Kebijakan dalam rangka penyediaan perumahan masyarakat yang layak huni, aman dan nyaman dilakukan melalui program fasilitasi pemerintah dalam bentuk bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, subsidi perolehan rumah sederhana, pembangunan infrastruktur kawasan perumahan, pembangunan rumah susun sewa dan penerbitan regulasi bidang perumahan.

Berbagai kebijakan daerah pada urusan perumahan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan, masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pembangunan hunian vertikal (rumah susun), baik rumah susun hak milik maupun sewa maka kawasan kumuh perkotaan dapat dikurangi karena para penghuni kawasan kumuh yang tidak mampu membangun rumah sendiri menjadi sasaran prioritas untuk menempati rusunawa. Sedangkan perwujudan terhadap pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki lahan dan rumah yang tidak layak huni diberikan fasilitasi berupa bantuan stimulan rehabilitasi berupa dana hibah untuk dipergunakan mengadakan rehabilitasi rumah menjadi lebih layak. Karena bentuk bantuan hanya stimulan maka mekanisme pembangunan rehabilitasi pembangunan dilakukan secara bergotong royong.

Khusus pembangunan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah kawasan padat dan kumuh di perkotaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan atau lokasi perdagangan dan jasa. Hal ini dimaksudkan bahwa kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah yang lain yakni peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan indikator penyelenggaraan urusan perumahan yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 2.22
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perumahan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013 *)	2014
7	PERUMAHAN				
7.1	Keberadaan PERDA IMB	Ada	Ada	Ada	Ada
7.2	Jumlah Rumah / Bangunan ber IMB	8.442 Unit	9.296 Unit	9.543 unit	9.543 unit
7.3	Jumlah Rumah / Bangunan	39.657 Unit	39.657 Unit	39.657 Unit	39.657 Unit
7.4	Rasio Rumah ber IMB	21,85 %	23,44 %	24,06 %	24,06 %
7.5	Keberadaan Rusunawa	0	0	1	1

8). Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas, kebijakan pada penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Blitar diarahkan Peningkatan kapasitas dan kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah, peningkatan kualitas kesehatan melalui pemasyarakatan olah raga sehingga terwujud pemuda prima, berkualitas dan siap pakai serta memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda melalui pemasyarakatan olah raga dilakukan melalui peningkatan prestasi olahraga daerah. Ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap menjadi fokus pencapaian strategi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga. Peningkatan prestasi pemuda dalam bidang olah raga dilakukan melalui penyediaan sarana keolahragaan , pembinaan organisasi keolahragaan, peningkatan kapasitas KONI sebagai wadah berhimpun Cabang – Cabang Olah Raga prestasi daerah, serta pengembangan jaringan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai lembaga formal dan informal terkait lainnya.

Pembinaan pemuda dalam upaya pengembangan kemampuan terhadap potensi pemuda, pelajar dan mahasiswa dilakukan melalui fasilitasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga kepemudaan dengan titik berat pada peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Karang Taruna

sebagai wadah aktualisasi keikutsertaan Pemuda dalam proses pembangunan kepemudaan, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.23
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
8	KEPEMUDAAN & OLAHRAGA				
8.1	Jumlah karang taruna	25	25	21	21
8.2	Jumlah lapangan olah raga per kelurahan	1	1	1	1
8.3	jumlah penduduk	148.834	150.670	150.940	150.940
8.4	Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	27	27	27	27
8.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) dibandingkan penduduk	0,01%	0,01%	0,01 %	0,01 %
8.6	Lapangan olahraga dibandingkan jumlah penduduk	0,05%	0,05%	0,05 %	0,05 %

9). Penanaman Modal

Kebangkitan ekonomi pada suatu daerah tertentu sangat dipengaruhi dengan besarnya modal (investasi) yang ditanamkan pada suatu daerah tersebut. Penanaman modal (investasi) merupakan salah satu faktor penggerak dalam pembangunan ekonomi. Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan di suatu daerah maka proses perputaran roda pembangunan akan semakin cepat mendongkrak nilai pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Menyadari peran krusial dari modal (investasi) dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah, maka Kebijakan penanaman modal yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar diarahkan pada penyusunan program dan kegiatan yang bertujuan menarik investasi yang berasal dari luar daerah sebanyak-banyaknya menuju daerah,

peningkatan penanaman modal pemerintah daerah dan penanaman modal dari daerah sendiri oleh masyarakat di Kota Blitar.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal di daerah, Pemerintah Kota Blitar menetapkan kebijakan urusan penanaman modal melalui strategi peningkatan pembangunan sarana / prasarana dan infrastruktur fasilitas umum Kota Blitar untuk peningkatan akses ekonomi yang lebih besar dan menjaga/memelihara situasi yang kondusif di daerah.

Capaian kinerja yang dikukur berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

TABEL 2.24
Indikator Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
9.	PENANAMAN MODAL				
9.1	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,25 milyar	2 milyar	22,83 milyar	22,83 milyar
9.2	Jumlah perbankan	16	17	18	19
9.3	Jumlah Anjungan Tunai Mandiri	40	40	29 lokasi	29 lokasi

10). Koperasi

Menghadapi tantangan perkembangan ekonomi global dengan orientasi kapitalis yang cenderung mengedepankan ekonomi modal besar, maka fokus pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Blitar sesuai arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 adalah pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan Koperasi. Dengan penyelenggaraan urusan koperasi maka usaha mikro, usaha kecil dan menengah dapat dapat terlindungi dari tantangan ekonomi kapitalis.

Dengan tingkat kualitas produksi masyarakat yang relatif masih belum mampu bersaing dengan produk kapitalis yang menggunakan teknologi tinggi, pembinaan koperasi mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan usaha produktif masyarakat

yang seringkali terkendala dengan keterbatasan modal usaha, kualitas dan kuantitas produksi, pemasaran, manajerial, dan kebutuhan primer harian.

Oleh karenanya maka pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah layak menjadi prioritas pembangunan yang harus diwujudkan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan kemiskinan, mendinamisasikan sektor riil dan memperbaiki pendapatan masyarakat.

Capaian kinerja dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.25
Indikator Penyelenggaraan Urusan Koperasi

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
10.	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA				
10.1	Jumlah koperasi aktif	217	232	238	300
10.2	Jumlah koperasi	309	309	321	321
10.3	Prosentase koperasi aktif	70,22%	75,08%	74,14 %	75%

11). Kependudukan & Catatan Sipil

Urusan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk mencapai sasaran yaitu terwujudnya dokumen kependudukan sebagai bukti otentik berupa akta pencatatan sipil yang berkelanjutan dalam sistem administrasi kependudukan, tersedianya dokumen tentang data sebagai sumber informasi yang lengkap dan akurat untuk landasan perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) dan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan kependudukan diimplementasikan dalam kegiatan yang meliputi penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam melaksanakan administrasi kependudukan, pemerintah di Daerah telah melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sistem informasi ini menghasilkan database kependudukan yang lengkap, akurat dan mutakhir, dengan capaian kinerja dari indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

TABEL 2.26
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
11.1	Pengurusan E-KTP dan Akta Lahir				
11.1.1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	109.111	110.274	112.235	110.235
11. 1.2	Jumlah Penduduk Wajib KTP ber KTP NIK	88.853	94.189	96.563	96.563
11. 1.3	Rasio Penduduk Wajib KTP dengan yang ber KTP NIK	81,433 %	85,413 %	86,036 %	99%
11. 1.4	Jumlah kelahiran	1.965	1.945	2.000	2150
11. 1.5	Jumlah bayi lahir memperoleh akta kelahiran	1.815	1.945	2.000	2150
11. 1.6	Cakupan akta kelahiran terhadap jumlah kelahiran	92,36 %	100 %	100 %	100%
11. 1.7	penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11.2	BIAYA KTP				
11.2.1	PERDA Biaya KTP	Ada	Ada	Ada	Ada

12). Ketenagakerjaan

Keterbatasan sumber daya alam di Kota Blitar upaya peningkatan perekonomian daerah tidak dapat dioptimalkan melalui eksplorasi sumber daya alamnya. Salah satu kebijakan dan strategi daerah untuk mewujudkan upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan potensi lain berupa sumber daya manusia (SDM).

Jumlah penduduk Kota Blitar didominasi oleh penduduk usia produktif untuk bekerja. Tenaga Kerja merupakan potensi SDM daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan riil perkapita. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas kemampuan tenaga kerja maupun peningkatan kuantitas ketersediaan lapangan kerja terutama industri kreatif.

Kebijakan program bidang ketenagakerjaan dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diarahkan kepada peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan produktivitas daerah. sehingga produk barang dan jasa daerah akan semakin mampu bersaing di pasar skala lokal, regional, nasional maupun global. Implementasi kegiatan peningkatan ketenagakerjaan meliputi peningkatan peluang/kesempatan kerja dan usaha, pemberian jaminan dan perlindungan kerja, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penegakan hukum serta pengawasan terhadap keselamatan kerja yang mendukung dalam peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas daerah.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.27
Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
12	KETENAGAKERJAAN				
12.1	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	54.618	64.931	65.642	65.900
12.2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	96.463	98.061	98.061	98.161

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			2014
		2011	2012	2013	
12.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	56,62 %	63,32 %	63,32 %	63,50 %
12.4	Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif	5.647	6.287	6.287	7.250
12.5	Jumlah pekerja	7.923	9.902	9.902	9.702
12.6	Pelayanan Kesertaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	71 %	63%	63 %	63 %
12.7	Jumlah Pelayanan Pelatihan Kerja	9	11	13	15
12.8	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	678	797	88	100
12.9	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	56	86	63	65
12.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	35 %	35 %	60 %	70 %
12.11	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	56	86	63	65
12.12	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat		700	275	285
12.13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	45,5 %	90 %	50%	60%
12.14	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	678	797	88	100
12.15	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan		35	25	20
12.16	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	79,4 %	100 %	100 %	100 %
12.17	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		35	25	25
12.18	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		271	143	143
12.19	Jumlah pencari kerja yang terdaftar		762	229	229
12.20	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5,42 %	35,56 %	60%	60%
12.21	Jumlah Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial				
12.22	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		1	3	4
12.23	kasus yang dicatatkan		1	4	4
12.24	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100 %	100 %	50%	100%
12.25	Jumlah Pelayanan Kepesertaan Jamsostek				
12.26	Jumlah pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK				
12.27	Jumlah pekerja/buruh	7.923	9.902	9.902	9.902
12.28	Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	71 %	63 %	63 %	63 %
12.29	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan				
12.30	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	-	40	16	16
12.31	Jumlah perusahaan yang terdaftar	310	349	349	349

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			2014
		2011	2012	2013	
12.32	Besaran pemeriksaan perusahaan	85,5 %	85,5 %	45%	45%
12.34	Jumlah peralatan yang telah diuji				
12.35	Jumlah peralatan yang terdaftar				
12.36	Besaran pengujian peralatan di Perusahaan	100 %	100 %	50%	50%

13). Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan kehidupannya. Ketersediaan terhadap pangan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin situasi dan kondisi di masyarakat agar tetap kondusif. Demikian juga yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar. Oleh karena hasil produksi daerahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri maka ketersediaan pangan perlu diatur melalui mekanisme ketahanan pangan.

Dalam implementasinya ketahanan pangan di Kota Blitar dilakukan melalui tiga subsistem, yaitu subsistem ketersediaan, konsumsi dan distribusi pangan. Subsistem ketersediaan pangan dibangun dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dalam segi jumlah maupun mutu gizinya bagi seluruh rumah tangga masyarakat. Pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketersediaan pangan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi pemerintah.

Subsistem konsumsi pangan dibangun dalam upaya meningkatkan pola konsumsi pangan agar cukup jumlah maupun energi yang didapatkan dan aman bagi kesehatan. Pola konsumsi pangan yang diharapkan adalah pola makan 3B1A, yaitu Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman. Pola ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap salah satu jenis pangan, memperoleh energi yang cukup dari pangan yang dikonsumsi dan menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh makanan yang tidak layak konsumsi. Penyelenggaraan subsistem konsumsi pangan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Subsistem distribusi pangan diatur berdasarkan mekanisme pasar yang kompetitif. Dalam subsistem ini pemerintah berperan mengatur regulasi perdagangan bahan pangan pokok, melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi bahan pangan. Tujuan pengaturandistribusi pangan agar terpenuhinya kebutuhan pangan secara merata dan terjangkau sampai rumah tangga. Kedaulatan pangan mengandung pengertian sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Sedangkan kemandirian pangan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memberi penegasan tentang tugas, tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat sebagai pemenuhan hak azasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

NO	URUSAN / INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (ton)	76.008,99 (ton) /th	74.403,55 (kg) /th	74.737.630 (kg) /th	74.938.630 (kg) /th
3.	Jumlah penduduk	148.834	150.670	150.670	152.670
4.	Ketersediaan pangan utama (ton/th/jiwa)	0,51	0,49	0,49	0,50

14). Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan peningkatan kapasitas dan peran perempuan sehingga terjadi peningkatan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan terhadap hak – hak anak secara simultan. Implementasi dari penyelenggaraan urusan ini adalah pemberdayaan Organisasi Wanita serta upaya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan yang menambah ketrampilan. Kegiatan yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan upaya penanggulangan atau pencegahan pelanggaran terhadap perempuan dalam masyarakat, rumah tangga yang diharapkan berimplikasi terhadap terpenuhinya hak-hak anak.

Arah kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah meliputi tiga bidang pokok, yaitu di bidang ekonomi melalui kegiatan pelatihan ketrampilan, sosialisasi manajemen usaha dan pemberian pinjaman modal usaha pada kelompok usaha wanita difasilitasi oleh dana P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kelompok bidang sosial budaya dan politik adalah peningkatan wawasan dibidang hak-hak perempuan untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak terkait dengan reproduksi, menyusui, mendapat perlakuan yang sama dalam pengambilan keputusan, pendidikan dan sebagainya.

Beberapa bentuk kegiatan antara lain penguatan Blitar Kota Layak Anak , perlindungan hak perempuan dan anak melalui KP2A (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak), pengawasan status gizi perempuan yang sedang hamil (bumil) dan anak balita serta anak sekolah, termasuk bentuk kegiatan lainnya dengan prioritas pada pengurangan angka kasus KDRT dan trafiking yang sampai saat ini sangat sulit penanganannya , kasus pekerja anak, menekan angka perceraian, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL. 2.29
Indikator Penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah perempuan dalam lembaga pemerintahan	2.219	2.230	2.230	2.240
2.	Jumlah pegawai/ Anggota DPR/DPD/DPRD	25	25	25	25
3.	Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintahan	50, 2 %	50, 2 %	≥ 50 %	≥ 50 %
4.	Jumlah Keluarga	45.697	46.382	47.037	47.137
5.	Jumlah KDRT	20	14	0	0
6.	Rasio KDRT terhadap Jumlah Keluarga	0,04 %	0,03 %	0	0
7.	Jumlah perempuan usia 15th keatas	20.569	20.877	20.877	20.900
8.	Jumlah perempuan usia 15th keatas bisa baca tulis	19.294	19.729	19.729	19.729
9.	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	93,8 %	94,5 %	94,5 %	95,5 %
10.	Jumlah Angkatan Kerja perempuan	1.015	1.069	1.069	1.132
11.	Jumlah perempuan usia kerja (15-64 thn)	20.569	20.877	20.877	20.9717
12.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4,93 %	5,12 %	5,12 %	5,30 %
13.	Jumlah kasus Kekerasan pada anak	8	7	7	5
14.	Jumlah tenaga kerja anak	0	0	0	0
15.	Jumlah Pemulihan Kondisi Psikis/ Rehabilitasi	58	18	18	14
16.	Jumlah pendampingan yang dilakukan	31	53	53	45
17.	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat	105	105	105	105

15). Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah menciptakan keseimbangan antara penambahan jumlah penduduk melalui kelahiran dengan kualitas hidup masyarakat. Implementasi dari penyelenggaraan urusan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian tingkat pertumbuhan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan serta ketahanan keluarga.

Beberapa kegiatan yang mendukung arah kebijakan antara lain meliputi peningkatan kualitas kesehatan reproduksi penduduk baik melalui pemasangan alat kontrasepsi dan pematangan usia perkawinan maupun pemeriksaan kesehatan secara berkala, peningkatan keikutsertaan dan peran serta pria dalam Keluarga Berencana, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Produktifitas Keluarga Sejahtera (UPPKS), Penundaan Usia Perkawinan dan pencegahan perkawinan dini dikalangan remaja serta pencegahan sex bebas di kalangan remaja melalui Pusat informasi kesehatan reproduksi Remaja (PIK KRR) yang ada di tingkat kota dan tingkat kecamatan. Bentuk lain dari pengendalian pertumbuhan penduduk melalui sarana promosi yang mengangkat slogan “ Dua anak lebih baik”.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL. 2.30
Indikator Penyelenggaraan
Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah keluarga	45.697	46.382	45.691	47.137
2.	Jumlah anak dalam tanggungan orang tua	2	1	2	2
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,49	1,06	1,53	1,65
4.	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1	5.787	5.777	5.073	5.453

5.	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 dibanding jumlah keluarga	18,82%	18,79 %	16,5 %	17,5 %
6.	Jumlah PUS	23.147	24.042	24.042	25.042
7.	Jumlah Peserta KB Aktif	17.360	17.704	17.704	17.904
8.	Prevalensi peserta KB aktif	72,65 %	73,71 %	72,94%	73%
9.	Jumlah Penduduk	143.218	148.834	148.834	149.834
10.	Pertumbuhan penduduk	4,55%	1,37%.	0,60 %	0,63 %
11.	Jumlah RW	187	187	187	187
12.	Jumlah Posyandu Balita	185	185	185	185
13.	Rasio Posyandu Balita per RW	1 : 0, 85	1 : 0, 85	0,93 : 1	0,97 : 1
14.	Jumlah Kelurahan	21	21	21	21
15.	Rasio Posyandu Balita per Kelurahan	1 : 7, 62	1 : 7, 62	1:1	1:1

16). Perhubungan

Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola penyelenggaraan urusan perhubungan di daerahnya. Kewenangan penyelenggaraan tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk dapat menetapkan kebijakan daerah bidang perhubungan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan, kondisi, kearifan lokal yang berada pada suatu daerah.

Implementasi di Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan urusan perhubungan tersebut menyusun kegiatan menuju terciptanya sistem pelayanan transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat yang didukung dengan sarana dan prasarana transportasi representatif. Wujud nyata dari kebijakan tersebut antara lain Peningkatan SDM Aparat Perhubungan , Mewujudkan transportasi, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban berdasarkan manajemen dan rekayasa lalu-lintas , Mewujudkan pelayanan prima, dibidang jasa transportasi yang meliputi : jasa terminal, jasa parkir, jasa perijinan dan jasa pengujian serta optimalisasi sumber-sumber pemberdayaan daerah. Sebagaimana arahan RPJMD 2011-2015

Kota Blitar, menempatkan perhubungan sebagai daya dorong pembangunan dan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan sistem jasa dan pelayanan transportasi menyongsong era globalisasi dan pasar bebas..

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.31
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
16.1	Kondisi LPJU				
16.1.1	Panjang jalan	272.096	272.096	272.096	272.096
16.1.2	Panjang jalan yang diterangi PJU	78.958	149.100	171.077	212.096
16.1.3	Rasio panjang jalan yang diterangi PJU (%)	29 %	54.79 %	62.87%	73%
16.2	Angkutan Jalan : Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan				
16.2.1	Jumlah Jaringan jalan Protokol	9	9	9	9
16.2.2	Jumlah Jaringan jalan Protokol Yang dilalui Angkutan Umum	9	9	9	9
16.2.3	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/kota	75 %	75 %	75%	75%
16.2.4	Wilayah terpencil dan tertinggal	-	-	-	-
16.2.5	Jumlah Jaringan jalan Yang dilalui Angkutan Umum	15	15	15	15
16.2.6	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60 %	60 %	60 %	60 %
16.3	Angkutan Jalan : Jaringan Prasarana Angkutan Jalan				
16.3.1	Jumlah halte	5	5	5	5
16.3.2	Jumlah Trayek Angkutan Umum Kota	5	5	5	5
16.3.3	Tersedianyahalte pada setiapKabupaten/Kota yang telahdilayaniangkutanumumdalam trayek.	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
16.3.4	Jumlah Terminal	3	3	3	3
16.3.5	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100 %	100 %	40 %	40 %
16.4	Angkutan Jalan : Fasilitas Perlengkapan Jalan				
16.4.1	Panjang Jalan Nasional Panjang Jalan Propinsi Panjang Jalan Kota	8 5.51 263.195	8 5.51 263.195	8 5.51 263.195	8 5.51 263.195
16.4.2	Panjang jalan dengan marka	92.083	92.083	98.684	98.684
16.4.3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	30 %	30 %	65 %	65 %
16.5	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor				
16.5.1	Jumlah Balai Uji Kendaraan	1	1	1	1
16.5.2	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	60%	60%	60%
16.6	Angkutan Jalan : Sumber Daya Manusia (SDM)				
16.6.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	28	29	29	29
16.6.2	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten /Kota yang telah memiliki terminal.	50%	50%	50%	50%
16.6.3	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	2	3	4	4
16.6.4	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	40%	40%	40%	40%
16.6.5	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada Kabupaten/Kota.	22	22	22	22

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
16.6.6	Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada Kabupaten/Kota.	100 %	100 %	40%	40%
16.6.7	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	2	3	4	4
16.6.8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100 %	100 %	100%	100%
16.7	Angkutan Jalan : Keselamatan				
16.7.1	Panjang Jalan	272.096	272.096	272.096	272.096
16.7.2	Panjang Jalan kondisi baik - Jalan Nasional - Jalan Propinsi - Jalan Kota	6.350 3.051 262.695	6.350 3.051 262.695	6.350 3.051 262.695	6.350 3.051 262.695
16.7.3	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100 %	100 %	100 %	100 %

17). Komunikasi & Informatika

Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks.

Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai cara, sarana tanpa terhalang ruang, waktu, maupun batas negara. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless), perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan, serta mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.

Mengingat begitu dominan dan strategisnya, teknologi informasi dan komunikasi maka pemerintah Kota Blitar menetapkan arah kebijakan berupa pemanfaatan dan pengaturan teknologi dan informasi untuk kepentingan pembangunan daerah. Beberapa sarana yang efektif dimanfaatkan sebagai alat untuk penyebarluasan informasi untuk organisasi dan masyarakat dan instansi pemerintah lainnya. Pemanfaatan ini dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan responsif sesuai dengan amanah dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan Komunikasi & Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.32
Indikator Penyelenggaraan
Urusan Komunikasi & Informasi

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
17	KOMUNIKASI & INFORMATIKA				
17.1	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada
17.2	Media Cetak / Majalah	Ada	Ada	Ada	Ada
17.2	Papan Pengumuman	Ada	Ada	Ada	Ada
17.2	Media Elektronik (Radio)	Ada	Ada	Ada	Ada
17.2	Pameran/expo	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

18). Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, meliputi :

1. Ijin lokasi.
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Ijin Membuka Tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.

Sekalipun terdapat 9 sub bidang urusan pertanahan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kota Blitar, namun pada kenyataannya hingga saat ini, belum dapat menjalankan ke-9 kewenangan dimaksud. Beberapa kendala dalam menjalankan 9 kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada tanah yang masuk kategori hak ulayat/ tanah adat;
2. Tidak memiliki wilayah khusus seperti hutan rakyat yang pemanfaatan tanahnya memerlukan ijin tertentu yaitu ijin membuka tanah.

Saat ini sub bidang urusan pertanahan yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Kota Blitar antara lain Ijin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan dan Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai berikut :

TABEL 2.33
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah lahan bersertifikat (Ha)	211.897,1	212.797	212.797	213.797
2.	Luas lahan yang seharusnya bersertifikat	325.784,9	325.784,9	325.784,9	325.784,9
3.	Jumlah kasus tanah negara	2	1	0	0
4.	Kasus Tanah Negara diselesaikan	1	0	0	0
5.	Penyelesaian kasus tanah negara	50%	0 %	0 %	0 %
6.	Jumlah ijin yang diajukan	0 *)	17	16 **)	16 **)
7.	Jumlah ijin diberikan	0 *)	17	16 **)	16 **)
8.	Jumlah ijin yang diajukan dan diselesaikan	0 *)	17	16 **)	16 **)

19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sebagai daerah yang mendeklarasikan daerahnya sebagai dapurnya nasionalisme, Kota Blitar secara intensif berupaya meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan serta toleransi antar sesama tanpa membedakan ras, suku dan agama.

Sekalipun tidak pernah terjadi kasus SARA di Kota Blitar, tetapi upaya untuk memupuk rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat serta meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama terus secara rutin dilakukan. Implementasi dari penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Blitar dilakukan melalui berbagai kegiatan yang antara lain memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kota Blitar, pemahaman HAM yang diikuti oleh aparatur pemerintah, pendidik, pelajar, ormas wanita, LSM dan masyarakat.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

TABEL 2.34
Indikator Penyelenggaraan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Kerusuhan	0	0	0	0
2.	Jumlah kerusuhan yang berbau SARA	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
5.	Jumlah Penduduk	143.206	144.456	145.081	146.081
6.	Jumlah tempat ibadah	431	437	445	455
7.	Rasio tempat ibadah dan penduduk	1 : 332	1 : 476,7	1:326	1:322
8.	Jumlah TPS	-	-	229	229
9.	Jumlah Petugas Linmas	763	763	763	763
10.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Pelaksanaan Pemilu	-	-	1 kali	3 kali
12.	Tingkat partisipasi politik masyarakat	0 %	0 %	72 %	72 %
13.	Waktu yang dibutuhkan PMK sampai di TKP Kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
14.	Tingkat Waktu Tanggap Respon daerah layanan	100 %	100 %	100 %	100 %
15.	Radius Pelayanan yang diwajibkan	7 km	7 km	7 km	7 km
16.	Radius Pelayanan yang diberikan	30 km	30 km	30 km	30 km
17.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	120 %	54%	100 %	100 %

20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Ω URUSAN OTONOMI DAERAH

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena otonomi daerah pada prinsipnya merupakan pemberian kewenangan

untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan secara mandiri dengan prinsip bertanggungjawab, transparan jujur dan adil. Dengan otonomi, daerah dapat menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan mengeksplorasi potensi daerahnya secara optimal dan bijaksana, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.35
Indikator Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
20.1.1	Sistim Informasi Manajemen Pemda	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah
20.1.2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Ω URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai pelaksana urusan kewenangan di daerah. Prinsip pembentukan lembaga daerah ini adalah untuk melindungi, melayani, membina masyarakatnya. Seluruh urusan kewenangan daerah didelegasikan secara merata kepada seluruh SKPD. Sebagai pelaksana SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah selaku pemegang otorisasi kewenangan di daerah.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah yang tidak terakomodasi dalam kewenangan yang terdelegasikan pada SKPD. Sifat kebutuhan ini biasanya insidental, tidak bersifat teknis, mendesak dan cenderung perlu dilakukan penanganan secara cepat. Terhadap hal-hal yang demikian ini maka fungsi SKPD penyelenggara fungsi pemerintahan umum dan atau Kepala daerah yang harus melaksanakan.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.36
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
20.2	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
20.2.1	Unit layanan pengaduan masyarakat	ada	ada	ada	ada
20.2.2	Jumlah SKPD	80	80	80	80
20.2.3	Jumlah SKPD Yang mempunyai jaringan IT (LAN/WAN)	80	80	80	80
20.2.4	Prosentase SKPD yang mempunyai jaringan IT (LAN/WAN)	100 %	100 %	100 %	100 %

Ω URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Transparansi pengelolaan keuangan daerah identik dengan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat undang undang, Pemerintah Kota Blitar menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan nama SIP SKPD (Sistem Informasi Pengelolaan SKPD). Selain pengelolaan keuangan daerah akan semakin tertib baik dalam pencatatan maupun penggunaannya, akuntabilitas terhadap seluruh kekayaan daerah baik berupa anggaran, barang modal dan aset daerah semakin dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatan SIP SKPD juga membantu dan mempermudah pelaksanaan tugas pejabat pengelola keuangan dalam menatausahakan keuangan tanpa meninggalkan dasar-dasar materi pengelolaan keuangan daerah.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Administrasi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.37
Indikator Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
20.3.1	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)				
20.3.1	Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Ω URUSAN PERANGKAT DAERAH

Otonomi daerah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah merupakan kewenangan yang luas dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya lembaga yang secara formal bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Penyelenggaraan urusan kewenangan di daerah adalah tanggungjawab kepala daerah. Pada implementasinya penyelenggaraan urusan ini perlu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana sebagai perangkat daerah. Lembaga pelaksana ini disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan daerah, SKPD secara operasional dilandasi dengan Peraturan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota. SKPD berwenang melaksanakan berbagai urusan pemerintah daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.38
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah SKPD	69	80	80	80
2.	Jumlah SKPD citizen charter/ISO	2	13	22	22
3.	Prosentase lembaga pelayanan publik yang menerapkan citizen charter/ISO	2,9 %	16,25 %	27,5 %	27,5 %

Ω URUSAN KEPEGAWAIAN

Pemerintah Kota Blitar memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut maka unsur-unsur pelaksana urusan kewenangan harus

memiliki kompetensi cukup. Oleh karena itu maka pegawai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar perlu dibekali pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tersebut melalui upaya peningkatan meningkatkan kualitas pegawai dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat kepemimpinan/struktural maupun teknis fungsional, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan UrusanKepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.39
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
20.5	URUSAN KEPEGAWAIAN				
20.5.1	Jumlah Pegawai	4.237	4.103	4.061	4.109
20.5.2	Jumlah Pegawai berijazah diploma keatas	2.806	2.741	2.736	2.784
20.5.3	Prosentase aparat berijazah diploma keatas	66 %	67 %	67 %	67 %

Ω URUSAN PERSANDIAN.

Urusan Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan urusan persandian di Kota Blitar ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Kerahasiaan, yaitu merahasiakan seluruh informasi yang karena sifatnya harus dirahasiakan. Beberapa informasi yang bersifat rahasia tersebut hanya dapat hak (otorisasi)
- b) Keutuhan, yaitu memastikan informasi yang diterima merupakan informasi yang sama dari pihak pemberi informasi (sumber berita) untuk sampai kepada penerima informasi baikinformasi yang bersifat rahasia untuk pihak yang memiliki hak (otorisasi) maupun informasi penting lainnya.

- c) Keaslian, yaitu memastikan keaslian berita atau dokumen elektronik dapat diindentifikasi dengan benar
- d) Ketersedian, yaitu memastikan kesiap siagaan sarana persandian yang meliputi perangkat dan personal.
- e) Tidak ada pengingkaran, yaitu memastikan baik pengirim maupun penerima berita tidak dapat menyangkal informasi beritanya.

Capaian kinerja dan indikator capaian penyelenggaraan Urusan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.40
Indikator Penyelenggaraan Urusan Persandian

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013 *)	2014
20.6	URUSAN PERSANDIAN.				
20.6.1	Jumlah Surat Masuk	6.886	6.405	2.070	3.120
20.6.2	Jumlah Surat Masuk terdistribusi tepat waktu	6.886	6.405	2.070	3.120
20.6.3	Prosentase pencapaian target Persandian	100 %	100 %	100 %	100 %

*) : sampai dengan Akhir Tahun 2013

21). Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, pemerintah Kota Blitar menetapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan dengan sasaran seluruh sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena secara ekonomi terdapat strata di masyarakat, maka kebijakan pembangunan terutama bidang usaha perekonomian disusun berdasarkan pertimbangan klasifikasi kelas sosial yang ada di masyarakat.

Kebijakan pembangunan sebagaimana disebutkan diatas dimaksudkan untuk menjamin terjadinya interaksi sosial antar anggota masyarakat yang tedistribusi kedalam kelas sosial di semua tingkatan sehingga terjadi proses pemberdayaan. Keberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Blitar, karena dengan keberdayaan masyarakat usaha ekonomi yang mengangkat kebutuhan

kehidupannya dapat dicapai , mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya. Dengan kondisi masyarakat yang berdaya maka dapat membantu bisa menolong diri sendiri.

Beberapa metode pengembangan konsep pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan di Kota Blitar adalah melalui Sistem Pembangunan Partisipatif. Dengan konsep pemberdayaan ini maka masyarakat diberikan peran yang cukup besar untuk turut serta menentukan arah pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan sejak proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan serta pengawasan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Khusus dalam penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin ditetapkan dengan tiga arah tujuan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan UrusanPemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 2.41
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
21	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.				
21.1	Jumlah LPMK aktif	21	21	21	21
21.2	Jumlah PKK	1.580	1.580	1.580	1.580
21.3	Jumlah PKK aktif	800	800	800	1200
21.4	Prosentae PKK aktif	50,63%	50,63%	50,63%	75%
21.5	Jumlah Posyandu	185	185	185	185
21.6	Jumlah Posyandu aktif	185	185	185	185
21.7	Prosentase Posyandu aktif	100 %	100 %	100 %	100 %

22). Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial di Kota Blitar diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui peningkatan intensitas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta program pemberdayaan masyarakat serta kesiapsiagaan penanganan bencana.

Dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial, pemerintah Kota Blitar melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat agar tidak mengalami masalah kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial sebagai berikut :

TABEL 2.42
Indikator Penyelenggaraan Urusan Sosial

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
22.1	Jumlah Rumah Tangga	45.697	46.382	47.037	47.037
22.2	Jumlah Rumah Tangga Miskin	5.787	4.601	3.293	3.293
22.3	% Rumah Tangga Miskin	9,92 %	9,92 %	7 %	6 %
22.4	IPM	77,89	77,89	79.00	79.79
22.5	Rasio PDRB perkapita dibanding kebutuhan hidup minimal	169,8 %	169,8 %	168 %	172 %
22.6	Penanganan Sosial				
22.6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13 buah	15 buah	15 buah	15 buah
22.6.2	Jumlah PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	10 buah	12 buah	13 buah	13 buah

22.6.3	Jumlah PMKS skala kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	13 buah	15 buah	15 buah	15 buah
22.6.4	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	76,83%	76,83%	86,67 %	86,67 %
22.7	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial : penyelenggaraan jaminan sosial				
22.7.1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun			50	
22.7.2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun			589	
22.7.3	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	17,5%	17,5%	5 %	
22.8	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial. : Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala kabupaten/kota.				
22.8.1	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis				
22.8.2	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kota				
22.8.3	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	23,8 %	23,8 %	23,8 %	23,8 %
22.9	Penyediaan sarana dan prasarana sosial : penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota				
22.9.1	Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.				

22.9.2	Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.				
22.9.3	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	9,5 %	9,5 %	60%	60%
22.10	Penangggulangan korban bencana : bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota.				
22.10.1	Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuansosial selama masa tanggap darurat.				
22.10.2	Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masatanggap darurat.				
22.10.3	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggal darurat	0 %	0 %	0 %	0 %

23). Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan budaya memiliki dimensi yang luas dan dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan urusan kebudayaan dilakukan melalui pelestarian nilai-nilai adiluhung bangsa sehingga menumbuhkan karakter dan jatidiri bagi generasi penerus. Eksplorasi budaya pada perspektif lain juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar menganggap daerahnya sebagai dapurnya nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu Kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang budaya diarahkan pada melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan kearah pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pelestarian budaya mempunyai makna strategis dalam rangka membangun identitas sosio kultural, membentuk karakter dan jati diri. Lebih dari itu, pembangunan bidang budaya juga menjadi fondasi pembangunan sikap mental,

memajukan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Capaian kinerja dan indikator capaian penyelenggaraan UrusanKebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.43

Indikator Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah grup kesenian	147	175	179	179
2.	Jumlah even budaya khas kota Blitar	5	4	5	5
3.	Jumlah sarana pementasan seni budaya	11	11	11	11
4.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	7	9	9	9
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	10
6.	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%

24). Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Blitar diarahkan pada penyediaan informasi berupa data yang akurat, akuntabel, terkini dan komprehensif mengenai kondisi dan potensi di Kota Blitar sebagai dasar penetapan kebijakan daerah di segala bidang. Data data yang akurat, akuntabel, terkini dan komprehensif sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan perencanaan yang baik. Dengan ketersediaan data yang mencukupi, dapat diproyeksikan langkah langkah pemerintah daerah kedepan dan kegiatan antisipasi terhadap tantangan yang akan muncul.

Pada pelaksanaannya penyediaan informasi berupa data Kota Blitar, dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait terutama Badan Pusat Statistik sebagai lembaga penyelenggara kewenangan pengelolaan data.

Capaian kinerja dan indikator capaian penyelenggaraan UrusanStatistik dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.44
Indikator Penyelenggaraan Urusan Statistik

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
24	Statistik				
24.1	Buku "kota dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada
24.2	Buku "PDRB kota"	Ada	Ada	Ada	Ada
24.3	MOU Kerjasama dengan BPS	Belum	Belum	Ada	Ada

25). Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kota Blitar diarahkan terjaminnya ketersediaan, keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai tindaklanjut dari hal tersebut, sebagai upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, maka dilaksanakan beberapa program dan kegiatan kearsipan dalam rangka penataan arsip dan peningkatan kualitas kearsipan sehingga menjadi lebih tertib, mudah dan akuntabel. Beberapa kegiatan tersebut ditujukan pada peningkatan kualitas sarana, system pengelolaan maupun peningkatan kualitas personal bidang kearsipan, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.45
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
25	Kearsipan				
	Jumlah SKPD	80	80	80	80
	Jumlah SKPD menerapkan arsip baku	38	39	39	39
25.1	Penerapan pengelolaan arsip baku	47,5 %	48,75 %	48,75 %	48,75 %
25.2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.

26). Perpustakaan

Sejalan dengan penyelenggaraan urusan pendidikan, maka penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Blitar menjadi bidang yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah. Kesadaran terhadap fungsi perpustakaan sebagai sumber pengetahuan masyarakat sebagai pertimbangan utama kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan

Namun demikian pada pelaksanaannya pelaksanaan urusan perpustakaan tidak dilaksanakan secara keseluruhan karena di Kota Blitar terdapat perpustakaan Nasional Bung Karno yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat Kota Blitar dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Fokus penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Blitar lebih diarahkan pada peningkatan kualitas minat baca masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi secara intensif.

Beberapa kegiatan lainnya pelaksanaan urusan perpustakaan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas para tenaga pendidik / guru.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.46
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
26	Perpustakaan				
26.1	Jumlah perpustakaan umum	0	0	1	1
26.2	Jumlah koleksi buku (exmplr)	10.237	12.360	14.000	14.000
26.3	Pengunjung perpustakaan	1.116	1.538	1.700	1.700

2.1.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

27). Pertanian & Perikanan

Sebagaimana umumnya karakteristik wilayah perkotaan, maka tantangan besar dalam penyelenggaraan urusan pertanian terbatasnya lahan produktif yang dapat dijadikan sebagai produksi tanaman pangan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pesatnya perkembangan kawasan permukiman. Kondisi tersebut menimbulkan jumlah pengurangan lahan setiap tahun sangat signifikan dan terjadinya penurunan kesuburan lahan pertanian. Tantangan lain dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan utama di wilayah adalah pergantian musim yang tidak menentu akibat pengaruh pemanasan global.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik umum wilayah perkotaan sebagaimana tersebut diatas maka penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Blitar diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manajemen agribisnis dan kualitas produk yang dihasilkan dari usaha di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Khususnya pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di Kota Blitar diarahkan pada diversifikasi tanaman pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat.

Capaian kinerja dan indikator capaian penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.47
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Perikanan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,84 %	6,29 %	6,95, %	7,7 %
	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	17.652,540	14.001,780	14.501,2304	14.501,230
	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	2.493,29	1.857,00	2.354	2.354
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,08 ton/ha	7,54 ton/ha	7,72 ton/ha	7,72 ton/ha
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,28 %
	Jumlah Produksi Ikan (ton)	160,77 ton	161,07ton	161,07ton	161,07ton

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
	Target Daerah (Ton)	166,85 ton	166,85 ton	166,85 ton	166,85 ton
4	Produksi perikanan	96,35%	96,53%	95,99%	95,99%
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)/kapita/hari	10,42 kg/kapita/th	10,60 kg/kapita/th	14,92 kg/kapita/th	14,92 kg/kapita/th
	Target Daerah (Kg)	16,4 kg/kapita/th	16,4kg/kapita/th	16,4kg/kapita/th	16,4kg/kapita/th
5	Konsumsi ikan	91,03%	91,03%	91,03%	91,03%

28). Pariwisata

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar menetapkan Visi Kota Blitar pada tahun 2025 sebagai Kota perdagangan produk barang dan jasa unggulan. Oleh sebab itu maka walaupun urusan pariwisata merupakan salah satu urusan yang tidak wajib dilaksanakan atau sebagai urusan pilihan , tetapi bagi Pemerintah Kota Blitar urusan wisata merupakan urusan yang wajib dilaksanakan. Kebijakan ini juga dilandasi oleh sangat terbatas potensi sumber daya alam Kota Blitar yang dapat dieksplorasi.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pariwisata, sesuai dengan kearifan lokal maka pengembangan bidang pariwisata di Kota Blitar diarahkan pada pariwisata sejarah. Potensi Kota Blitar sebagai bagian penting dari proses perjuangan kemerdekaan merupakan modal utama dalam menarik minat para wisatawan yang berasal dari dalam negeri.

Implementasi pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Blitar dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas masyarakat sadar wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, eksplorasi benda dan kawasan bersejarah, sarana penunjang daerah tujuan wisata, peningkatan kerjasama antar pelaku wisata dan pembangunan sarana wisata moderen sebagai pendukung wisata sejarah yang menjadi prioritas utama, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Pariwisata sebagai berikut :

TABEL 2.48
Indikator Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
2.1	Jumlah wisatawan per tahun	505.318	662.599	725.000	750.000
2.2	Lama Inap Tamu/wisatawan	1,4 hari	1,34 hari	1,30 hari	1,65 hari
2.3	Tingkat hunian hotel	17,32 %	17,88 %	18,54 %	23,35 %
2.4	Kapasitas kamar hotel	702	705	707	750
2.5	Jumlah restoran/rumah makan	50	63	63	65
2.6	Penambahan obyek wisata	0	0	0	0
2.7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	30,61 %	31,4 %	31,4 %	31,4 %

29). Perindustrian

Dalam rangka Penyelenggaraan urusan perindustrian, Pemerintah Kota Blitar mengambil peran sebagai fasilitator yang berfungsi mengarahkan, memberdayakan dan mengkoordinasikan ide, potensi dan masukan yang berasal dari berbagai elemen pemerintahan meliputi unsur pengusaha, lembaga penelitian dan pengembangan / lembaga pendidikan, instansi penyedia permodalan dan masyarakat. Salah satu kebijakan umum Pemerintah Kota Blitar di bidang Peningkatan perindustrian adalah penempatan prioritas daerah pengembangan ekonomi lokal dengan titik berat kepada pemberdayaan pelaku ekonomi mikro, terutama kalangan pengusaha kecil dan menengah. Penguatan industri pada kelas usaha ekonomi menengah, kecil dan mikro ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang kreatif, inovatif dan semakin merata, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Melalui penataan struktur industri di Kota Blitar diharapkan akan terjaga keseimbangan pertumbuhan industri dalam suatu sistem perekonomian yang terpadu. Penguatan hubungan antar elemen pembangunan industri utama, industri pendukung dan industri lainnya dalam satu sistem klaster industri yang sinergis dan saling menguntungkan akan berdampak pada penguatan industri itu sendiri terutama penguatan

terhadap resesi ekonomi regional, nasional dan global yang mungkin terjadi.

Dengan memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku industri kecil dan menengah di Kota Blitar untuk mengekspresikan kemampuan dan potensi yang dimilikinya dalam mengembangkan usaha industri, meningkatkan pangsa pasar dan jaringan usaha kemitraan antara usaha industri kecil, menengah dan industri besar, kemampuan industri akan semakin meningkat, dengan capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.49
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
3	PERINDUSTRIAN				
3.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11.22%	11.3%	11.3%	11.3%
3.2	Jumlah Industri	2.102	2.011	2.011	2.011
3.3	Pertumbuhan Industri	0,29 %	4.53%	4.53%	4.53%

30). Perdagangan

Sebagaimana Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar, pelaksanaan urusan perdagangan lebih ditekankan pada bidang penyediaan prasarana perdagangan berupa pasar yang didukung kemajuan teknologi, inovasi, transparansi informasi serta peningkatan pembiayaan dan fasilitasi perdagangan, yang didukung dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang memadai, baik jumlah maupun tingkat pendidikan.

Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 2015 mendatang perhatian utama ditujukan pada daya saing produk dan ekspansi pemasaran produk melalui fasilitasi promosi. Ini dilakukan dengan maksud bahwa ketika pemberlakuan kebebasan akses pasar internasional, kebebasan berinvestasi, kebebasan mobilitas tenaga kerja, dan bebasnya pergerakan arus modal dapat dihadapi oleh Masyarakat Kota Blitar.

Tantangan yang mungkin mungkin dihadapi seperti belum adanya standar baku mengenai sertifikasi tenaga kerja internasional, dari Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) , standarisasi, kejelasan payung hukum mengenai aktivitas perdagangan bebas perlu mendapat perhatian khusus pada masa mendatang. Oleh sebab itu upaya intensif harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam membangun pertumbuhan perdagangan, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.50
Indikator Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
4	PERDAGANGAN				
4.1	Jumlah pasar tradisional	6	6	6	6
4.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	26,73 %	31,4%	31,4%	31,4%
4.3	Ekspor Bersih Perdagangan	0 US\$.	0 US\$.	0 US\$.	0 US\$.
4.4	Jumlah Usaha Mikro dan kecil	9.975	10.005	10.015	10.015
4.5	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	94,13%	74,96%	74,96%	74,96%

31). Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi merupakan urusan yang menjadi perhatian bagi Kota Blitar mengingat pertumbuhan penduduk , kepadatan penduduk dan luas wilayah kota wilayah yang cukup terbatas. Melalui kebijakan transmigrasi maka sesungguhnya permasalahan kependudukan seperti pemerataan penduduk serta pengangguran dapat diminimalisir yang akhirnya tingkat kemiskinan akan berkurang. Tetapi perkembangan perekonomian di Kota Blitar berdampak pada keengganan masyarakat untuk meninggalkan Kota Blitar menuju daerah pemukiman baru di daerah transmigrasi.

Capaian kinerja dan indikator kinerja capaian penyelenggaraan Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.51
Indikator Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

NO	URUSAN / INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
5	Transmigrasi				
5.1	Jumlah Peserta Pendaftar Transmigrasi	1	0	0	0
5.2	Jumlah Peserta Transmigrasi diberangkatkan	0	0	0	0
5.3	Prosentase Transmigran swakarsa	0 %	0 %	0 %	0 %

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, yang dilanjutkan dengan capaian kinerja sampai dengan tribulan I tahun anggaran 2014. Dalam melaksanakan evaluasi ini dipergunakan data yang berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 yang didasarkan pada pencapaian kinerja masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Dalam melaksanakan evaluasi ini maka akan dijelaskan mengenai realisasi program masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perencanaan program kegiatan dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk realisasi anggaran dalam DPA-SKPD Tahun 2014 sampai dengan Tribulan I.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berbicara permasalahan pembangunan, senantiasa beriringan dengan dinamika pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan yang bersifat dapat diramalkan (*predictable*) maupun tidak dapat diramalkan (*unpredictable*). Namun demikian dinamika yang muncul tersebut hendaknya dapat dikelola secara baik sehingga akan memperkaya khazanah wacana pembangunan di daerah. Pelaksanaan prinsip “Rukun Agawe Santoso” menjadi sangat relevan dengan kondisi aktual masyarakat Kota Blitar saat ini.

Melihat permasalahan pembangunan Kota Blitar secara umum ditahun 2013, dapat dielaborasi dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Disamping itu, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan optimal, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan Pembangunan Kota Blitar diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global. Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kota Blitar Penuh untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dengan visi Kota Blitar, Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015, telah ditetapkan 5 misi daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Permasalahan pembangunan daerah, yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disini berhubungan erat dengan pencapaian visi dan misi Kota Blitar sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANG GUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal	Jumlah konflik SARA	BAKESBANG POL LINMAS	100
	Jumlah grup kesenian	DIN KOMINPARDA	Tidak Tercapai
	Jumlah even budaya khas kota Blitar		100
	Sarana penyelenggaraan seni budaya	DIN KOMINPARDA	Tercapai Melebihi
Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sarana ibadah dibanding penduduk	BAKESBANG POL LINMAS DINSOSNAKER BAGIAN KESRA	Tidak Tercapai
	Rasio lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain	BAKESBANG POL LINMAS DINSOSNAKER BAGIAN KESRA DIKDA	100
	Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga	BAPEMAS DAN KB	Tercapai Melebihi
	Konflik karena agama	BAKESBANG POL LINMAS	100
Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma	Prosentase kriminalitas yang bisa terselesaikan	BAKESBANG POL	99,4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Sosial		LINMAS	
	Jumlah pelanggaran lalu lintas	BAKESBANG POL LINMAS	Tidak Tercapai
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	SAT POL PP	Tercapai Melebihi
	Prosentase poskamling aktif	BAKESBANG POL LINMAS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Tercapai Melebihi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan	- SD	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tercapai Melebihi
	Jumlah guru berkualifikasi sesuai dengan kompetensi/guru layak :		
	- SD	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tidak Tercapai
	Rasio guru dan murid :		
	- SD	DIKDA	100,23
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tercapai Melebihi
	Rata - rata Nilai Ujian Nasional		
	- SD	DIKDA	Tercapai Melebihi
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tidak Tercapai
	Angka Rata-rata Lulusan Ujian Nasional		
	- SD	DIKDA	100,4
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tidak Tercapai
Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi sekolah		
	- SD	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SMP	DIKDA	Tidak Tercapai
	- SLTA	DIKDA	Tidak Tercapai
	Angka putus sekolah (murni siswa berasal dari Kota Blitar)		
	- SD	DIKDA	Tercapai Melebihi
	- SMP	DIKDA	Tercapai Melebihi
	- SLTA	DIKDA	Tercapai Melebihi
Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi pekerti	Jumlah kurikulum muatan local	DIKDA	100
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	DIKDA	Tidak Tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Prosentase angkatan kerja berpendidikan tinggi	DIKDA	Tidak Tercapai
	Jumlah perpustakaan umum	DIKDA	100
	Jumlah koleksi buku perpustakaan	DIKDA	Tidak Tercapai
	Pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun	DIKDA	Tidak Tercapai
	Angka melek huruf (%)	DIKDA	Tidak Tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	DINAS KESEHATAN	Tercapai Melebihi
	Rasio Puskesmas, puskesmas per kelurahan	DINAS KESEHATAN	Tidak Tercapai
	Tingkat cakupan Peserta KB aktif (%)	DINAS KESEHATAN BAPEMAS DAN KB	Tidak Tercapai
	Rasio posyandu balita per RW	DINAS KESEHATAN BAPEMAS DAN KB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tidak Tercapai
	Rasio posyandu lansia per kelurahan	DINAS KESEHATAN BAPEMAS DAN KB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi
	Prosentase rumah tangga miskin yang terlayani jaminan kesehatan (%)	DINAS KESEHATAN BAPEMAS DAN KB DISOSNAKER BAGIAN TAPEM KECAMATAN KELURAHAN	100
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	DINAS KESEHATAN	Tidak Tercapai
	Prevalensi gizi kurang	DINAS KESEHATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANG GUNGJAWAB	PERMASALAHAN
	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	DINAS KESEHATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi
	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	DINAS KESEHATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tidak Tercapai
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 penduduk	DINAS KESEHATAN KECAMATAN KELURAHAN	Tidak Tercapai
	Angka kesakitan demam berdarah	DINAS KESEHATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tidak Tercapai
	Jumlah Rumah tangga yang dipantau dan ber PHBS (%)	DINAS KESEHATAN KLH BAPPEDA DPU BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANG GUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	DPU BEPPEDA BAGIAN PEMBANGUNAN	Tidak Tercapai
	Panjang jalan yang diterangi PJU dengan panjang jalan keseluruhan (%)		Tercapai Melebihi
	Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan baku sawah	DPU DIPERTA BEPPEDA BAGIAN PEMBANGUNAN	100%
	Prosentase Rumah tangga pengguna listrik	BAPPEDA	100%
	Jumlah pasar tradisional	KPPD	Tercapai Melebihi
	Jumlah restoran/rumah	DINKOMINPARD	Tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANG GUNGJAWAB	PERMASALAHAN
	makan	A	Melebihi
	Jumlah objek wisata	DINKOMINPARD A	100%
	Jumlah wisatawan per tahun	DINKOMINPARD A	Tercapai Melebihi
	Lama inap tamu/wisatawan	DINKOMINPARD A	Tidak Tercapai
	Tingkat hunian hotel	DINKOMINPARD A	Tercapai Melebihi
	Jumlah lokasi anjungan tunai mandiri (ATM)	BAGIAN PEREKONOMIAN	Tercapai Melebihi
	Jumlah perbankan	BAGIAN PEREKONOMIAN	Tercapai Melebihi
	Perijinan satu pintu	KPT	100%
	Rasio Jembatan dalam kondisi baik	DPU BEPEDA BAGIAN PEMBANGUNAN	Tidak Tercapai
	Payung hukum perijinan	BAGIAN HUKUM	100%
	Kapasitas kamar hotel	DINKOMINPARD A	Tercapai Melebihi
Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan	Prosentase sektor tersier dalam PDRB (%)	BAPPEDA	Tercapai Melebihi
	PDRB per Kapita (ADHB)	BAPPEDA	Tidak Tercapai
	Prosentase koperasi Aktif	DINKOP DAN UKM	Tercapai Melebihi
	Jumlah Koperasi	DINKOP DAN UKM	Tercapai Melebihi
	Jumlah industri kecil menengah	DINKOP DAN UKM DISPERINDAG	Tercapai Melebihi
	Prosentase sector pertanian pada PDRB	BAPPEDA DIPERTA	Tidak Tercapai
	Pertumbuhan PDRB	BAPPEDA	Tidak Tercapai
	Laju inflasi	BAPPEDA	Tidak Tercapai
	Produksi padi per hektar (ton)	DIPERTA	Tercapai Melebihi
Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Rumah Tangga Miskin	DINSOSNAKER BAPPEDA BAGIAN KESRA	Tidak Tercapai
	IPM	BAPPEDA	Tidak Tercapai
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dibanding jumlah keluarga	DINSOSNAKER BAPEMAS DAN KB BAGIAN KESRA	Tidak Tercapai
	Rasio PDRB perkapita di	BAPPEDA	Tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
	banding kebutuhan hidup minimal		Melebihi
	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	BAPEMAS DAN KB DISPENDUK	Tercapai Melebihi
	Pertumbuhan penduduk dalam satu tahun	BAPEMAS DAN KB DISPENDUK	Tidak Tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat RT sampai kota	BAPPEDA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELURAHAN	100%
	Jumlah LPMK aktif	BAPEMAS DAN KB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELURAHAN	100%
	Jumlah karang taruna	BAPEMAS DAN KB DINSOSNAKER BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi
	Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah	BAPEMAS DAN KB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KELURAHAN	Tercapai Melebihi
	Ketersediaan dokumen perencanaan	BAPPEDA	100%
	Tingkat Partisipasi politik masyarakat	BAKESBANGPOL INMAS	Tidak Tercapai
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Rasio penduduk wajib KTP yang ber KTP (%)	DISPENDUK	Tidak Tercapai
	Jumlah SKPD yang menerapkan sistem AKIP dengan predikat baik (%)	INSPEKTORAT BAGIAN ORTALA	Tidak Tercapai
	Lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter atau ISO (%)	BAGIAN ORTALA	Tercapai Melebihi
	Jumlah aparat berijazah diploma ke atas (%)	BKD	100,13
	Cakupan akta kelahiran terhadap jumlah kelahiran dalam satu tahun (%)	DISPENDUK	Tidak Tercapai
	Ketersediaan unit layanan pengaduan masyarakat	DINKOMINPARD A	100%
	Ketersediaan informasi	BAPPEDA	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SKPD PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN
	mengenai tata ruang	DPU	
	Prosentase SKPD yang mempunyai jaringan berbasis komputer (LAN / WAN)	DINKOMINPARD A BAGIAN ORTLA	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Prosentase volume sampah yang tertangani (%)	DKP	Tidak Tercapai
	Permukiman dengan sanitasi sehat (%)	KLH DINKES DPU	Tercapai Melebihi
	Jumlah lapangan olah raga per kelurahan	BAPEMAS DAN KB KECAMATAN KELURAHAN	100%

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN WAJIB

a. Urusan Pendidikan

Perlu kebijakan untuk lebih mengembangkan sekolah kejuruan pada tingkat SLTA adalah kebijakan rasional yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kota Blitar guna menjamin lulusan sekolah-sekolah tersebut langsung siap untuk memasuki dunia kerja. Selain itu yang perlu dilakukan ke depan adalah menempatkan program pendidikan menengah sebagai program prioritas, disertai dengan pelaksanaan kegiatan penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak.

b. Urusan Kesehatan

Masih ditemukan kematian bayi dan balita khususnya pada keluarga warga miskin. Adapun solusi untuk menangani dengan mengoptimalkan semua fungsi sarana dan prasana yang ada serta memberikan pendalaman dan refreasing pada tenaga kesehatan yang ada guna lebih baik dalam melakukan pekerjaannya.

c. **Urusan Lingkungan Hidup**

Mulai berkurangnya ruang terbuka hijau secara signifikan dari tahun ke tahun, pencemaran sungai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, terus berkurangnya debit mata air dan lemahnya koordinasi stakeholders dalam bidang lingkungan hidup. Adapun solusi yang dilakukan antara lain sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya kesadaran menjaga lingkungan sekitar, rehabilitasi IPAL, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program SANIMAS dan koordinasi antara stakeholders.

d. **Urusan Pekerjaan Umum**

Dalam urusan pekerjaan umum permasalahan yang dihadapi yaitu fasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran untuk berswadaya, belum optimalnya kinerja industri jasa konstruksi, masih adanya penyelesaian pekerjaan yang melewati batas akhir kontrak, pembangunan infrastruktur yang tidak didasarkan pada prioritas kebutuhan dan kurang maksimalnya hasil pengerjaan. Adapun solusi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terulang di 2013 yaitu dengan pemutakhiran data base program-program pembangunan khususnya infrastruktur sehingga apabila sewaktu-waktu ada pengalokasian anggaran dari sumber manapun tidak lagi harus membuat perencanaan dari awal, peningkatan kualitas pelaksana konstruksi baik perencana maupun pelaksana melalui bimbingan teknis tentang pembangunan, penataan kembali sistem dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, perlunya dilaksanakan evaluasi rekanan/ penilaian rekanan sebagai pembinaan bagi rekanan, dilakukan penertiban administrasi dan diberikan sanksi atas keterlambatan dan perlu kerjasama perencana, pelaksana dan pengawas lapangan.

b. Urusan Penataan Ruang

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang yaitu semakin berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, ruang terbuka hijau, lahan pertanian serta meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi mengakibatkan beralihfungsinya kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Solusi yang akan dilaksanakan yaitu dengan membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tetap berpihak pada masyarakat.

c. Urusan Perencanaan Pembangunan

Belum optimalnya kemampuan aparat perencana di SKPD serta belum tertatanya dokumen perencanaan secara optimal baik dari segi substansi dokumen perencanaan maupun wujud fisik dari dokumen tersebut. Untuk mengatasinya dilakukan bimbingan teknis perencana kepada aparat perencana di Kota Blitar serta penataan kembali dokumen-dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

d. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan dan solusi yang diambil dalam pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga yaitu :

- Potensi Pemuda Kota Blitar cukup besar, tetapi Pemuda yang mau terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih terbatas jumlahnya solusi yang diberikan dengan memperluas kesempatan kepada pemuda melalui berbagai kegiatan. Kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan perlu digilir. Pemerintah kelurahan juga perlu menginventarisir potensi pemuda agar lebih mudah untuk mendorong pemuda aktif dalam pembangunan.
- Masih ada cabang olahraga yang belum tertangani secara profesional, sebagai solusinya dilakukan pembinaan olahraga

dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik sarana olahraga berprestasi maupun olahraga masyarakat yang secara bertahap ditingkatkan. Pemberian penghargaan berupa dana pembinaan bagi atlet berprestasi maupun pelatih merupakan upaya untuk mendorong para olahragawan agar bersemangat meraih prestasi di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

e. **Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi di bidang penanaman modal di Kota Blitar antara lain:

- Pola pikir masyarakat agraris sebagai pekerja masih cukup kental dikalangan masyarakat Kota Blitar;
- Daya beli masyarakat yang masih terbatas;
- Lemahnya akses IKM terhadap sumber-sumber permodalan;
- Kurangnya terobosan dalam pemasaran produk;
- Lemahnya potensi daerah yang kecil dibidang penanaman modal.

Sedangkan langkah – langkah pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- Pembinaan mentalitas kewirausahaan yang tangguh;
- Himbauan / sosialisasi agar masyarakat menggunakan / mencintai produk local;
- Menghimbau kepada para pelaku usaha agar dapatnya memanfaatkan teknologi informasi maupun sarana promosi yang ada;
- Melakukan ekstensifikasi potensi sumber perekonomian daerah agar menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Blitar;
- Deregulasi dan debirokratisasi mekanisme penanaman modal di Kota Blitar;
- Untuk pelaksanaan ditahun – tahun mendatang lemahnya akses

IKM terhadap sumber-sumber permodalan dan lain-lain perlu lebih mendapatkan perhatian yang serius dengan jalan lebih mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi program lintas SKPD serta penetapan prioritas program yang relevan.

f. Urusan Koperasi dan UKM

Berpijak dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2010 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang dapat diidentifikasi permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain :

- Aplikasi beberapa perundang-undangan tentang perkoperasian masih sangat lemah dan cenderung kontradiktif, untuk menyikapi kondisi yang seperti ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- Sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat belum efektif untuk menyikapinya Pemerintah Kota Blitar senantiasa meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program-program dan kegiatan yang berhubungan dengan koperasi dan UKM yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

g. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama dalam pengelolaan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan yaitu : membebaskan biaya retribusi beberapa dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil dan memberikan sosialisasi baik melalui media elektronik dengan

jalan dialog interaktif maupun sosialisasi langsung di kelurahan.

h. Urusan Ketenagakerjaan

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yaitu :

- Jumlah pengangguran masih relatif besar; pengurangan tingkat pengangguran merupakan permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan ekonomi makro maupun mikro, solusi yang diambil yakni dengan mengarahkan seluruh kebijakan, usaha, dan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya bermuara untuk meningkatkan peluang bekerja/kesempatan kerja secara bertahap.
- Pemerintah Kota juga berusaha dengan cara memanfaatkan potensi SDM yang ada. Salah satu strateginya adalah bekerja sama dengan berbagai lembaga latihan kerja swasta untuk membuka peluang berusaha dan bekerja melalui pemberian ketrampilan ekonomis produktif dan bekerjasama dengan PJTKI untuk menyalurkan dan memberikan pembinaan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Masih adanya beberapa perusahaan yang belum memberlakukan gaji karyawannya sesuai Upah Minimal Kota (UMK) di Kota Blitar yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) . Memberikan mediasi dan fasilitasi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha.

i. Urusan Ketahanan Pangan

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kota Blitar adalah belum maksimalnya fungsi pembinaan,

pengendalian dan pengawasan ketersediaan dan distribusi pangan karena terbatasnya kewenangan pejabat yang menangani ketahanan pangan. Saat ini dalam struktur organisasi Pemkot Blitar ketahanan pangan ditangani seorang Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi), sehingga tidak memungkinkan melakukan pemantauan dan pembinaan ketahanan pangan secara maksimal. Sedangkan urusan ketahanan pangan mencakup lingkup yang luas serta berkaitan dengan banyak pihak, sehingga penanganan urusan ini memerlukan kewenangan yang lebih besar.

Strategi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan perbaikan struktur organisasi ketahanan pangan dan optimalisasi fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar dalam meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mantap. Ke depannya, Dewan Ketahanan Pangan akan dimaksimalkan perannya untuk memantau kondisi ketahanan pangan dan menentukan kebijakan ketahanan pangan.

j. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Berpijak dari pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2010 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang, secara khusus dapat diidentifikasi permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain belum seimbangny jumlah tenaga penyuluh keluarga berencana (P-KB) dengan jumlah kelurahan sasaran penyuluhan KB. Sebagai tenaga pelaksana tugas operasional pada Bapemas & KB di lapangan, personal P-KB hanya 15 orang, sedangkan jumlah kelurahan yang ada 21 buah, maka semaksimal mungkin Pemerintah Kota Blitar berusaha mengoptimalkan kinerja mereka. Sehingga ada petugas P-KB yang mempunyai tugas penyuluhan di kelurahan dengan kriteria luas wilayah dan jumlah penduduk kelurahan yang bersangkutan. Disamping itu, untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja petugas

P-KB secara rutin dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan tetap memberikan *reward* kepada penyuluh KB yang berprestasi.

k. Urusan Perhubungan

Adapun masalah yang muncul dalam pengelolaan urusan perhubungan yaitu tidak tercapainya Target Parkir Umum yang disebabkan oleh banyaknya juru parkir liar yang mengganggu juru parkir resmi, kurang tertibnya juru parkir untuk menyetorkan hasil pungutan dan perubahan musim beberapa waktu terakhir juga turut andil dalam penurunan jumlah pendapatan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : peningkatan volume patrol setiap bulan sehingga banyak juru parkir liar yang tidak berani mengganggu atau mengambil alih lokasi juru parkir resmi, untuk mengatur jam kerja dan meningkatkan penertiban oleh petugas pengawas dan penertiban juru parkir untuk mendorong juru parkir agar menyetorkan hasil pungutan retribusi secara tertib dan sesuai target yang telah ditetapkan.

l. Komunikasi dan Informatika

Satu permasalahan yang dihadapi dalam mengelola urusan komunikasi dan informatika yaitu Operator ULPIM di masing-masing SKPD belum optimal, sehingga mengakibatkan keterlambatan jawaban dari pengaduan masyarakat melalui ULPIM. Adapun pemecahan masalah tersebut yaitu perlu adanya pelatihan bagi operator ULPIM di masing-masing SKPD di Kota Blitar serta adanya sarana dan prasarana khusus untuk pengelolaan ULPIM di masing-masing SKPD.

m. Urusan Pertanahan

Secara umum pelaksanaan urusan pertanahan selama tahun 2010 sudah berjalan cukup baik dan tidak ada persoalan menonjol yang terjadi di masyarakat. Namun demikian dalam praktiknya, secara khusus ada beberapa persoalan yang perlu segera ditangani agar peningkatan pelayanan di masa yang akan datang bisa jauh lebih

baik dalam pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan, diantaranya adalah sulitnya penelusuran atas status tanah asset. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan dibentuknya Tim Penelusuran Tanah aset yang terdiri dari Instansi Terkait (Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah, Kantor Pertanahan, Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan), selain itu juga perlu adanya tambahan personil yang memiliki kompetensi di bidang Pertanahan

n. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Semakin menurunnya semangat dan pengetahuan generasi muda di Kota Blitar akan wawasan kebangsaan serta nasionalisme menjadi masalah utama dalam pengelolaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Adapun solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam memecahkan masalah tersebut yaitu melaksanakan sosialisasi, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan terkait isu dan tema wawasan kebangsaan bagi generasi muda.

o. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

• Otonomi Daerah

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan otonomi daerah terutama terkait dengan pelaporan antara lain adalah teknis penyampaian laporan oleh SKPD sebagai pelaksana kebijakan. Kendala yang sering dijumpai adalah beragamnya penafsiran terhadap sistematika pelaporan dan Indikator Kinerja Kunci yang dijadikan sebagai pedoman. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran petugas yang pada tahun sebelumnya telah mendapatkan pembekalan berganti dengan petugas yang masih baru. Terhadap kendala yang demikian solusi yang diberikan memberikan penjelasan

serta contoh laporan yang dibuat pada tahun sebelumnya

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi lebih banyak disebabkan oleh seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan otonomi itu sendiri. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan ini secara hirarki tentu saja peraturan perundangan yang diterbitkan daerah harus disesuaikan. Dampak dari perubahan inilah yang kemudian menjadi hambatan karena organisasi yang semestinya sudah berjalan harus kembali melakukan harmonisasi dan penyesuaian. Terhadap permasalahan ini solusi yang diberikan adalah mengadakan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya secara intensif pada jajaran birokrasi maupun masyarakat.

- **Pemerintahan Umum**

Sebagaimana sifatnya maka urusan pemerintahan umum adalah urusan yang sebagiannya tidak dapat diprediksikan sehingga tidak semua terencanakan dalam dokumen perencanaan anggaran (DPA SKPD). Oleh karena itu maka kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ini adalah menurunnya tingkat kepedulian personal yang memangku kewenangan urusan pemerintahan umum terkait pada hal-hal yang belum terencanakan penyelenggaraanya. Terhadap kendala ini solusi yang diberikan adalah pembinaan secara terus menerus kepada personal pemangku kepentingan. Penanaman jiwa kepamongprajaan adalah salah satu cara paling efektif dalam peningkatan kepedulian ini.

- **Administrasi Keuangan Daerah**

Sering terjadi perubahan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemahaman aparatur kurang optimal dalam pengelola keuangan. Adapun

solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan workshop akan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

- **Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai implementasi dari urusan perangkat daerah terdapat beberapa kendala antara lain Pembentukan lembaga baru dalam struktur pemerintahan seringkali berdampak pada kesulitan pemilahan administrasi yang melekat pada kewenangan yang dilaksanakan setiap lembaga yang mengalami perubahan. Kesulitan ini terutama pada administrasi berupa dokumen kearsipan yang semestinya harus dipelihara. Penanggungjawab atas arsip yang telah dihasilkan oleh lembaga yang lama biasanya tidak ditentukan dengan tegas pada awal pembentukan lembaga baru. Kondisi ini berdampak pada sulitnya pencarian arsip atau bahkan kehilangan pada arsip tertentu. Terhadap permasalahan ini solusi yang dilakukan adalah dengan pembinaan secara intensif yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk mengurangi resiko kehilangan arsip terutama arsip yang dikategorikan arsip aktif dan penting.

- **Kepegawaian**

Masih rendahnya tingkat pemahaman dan ketaatan PNS di Kota Blitar terhadap aturan kepegawaian. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan daerah terkait kepegawaian oleh PNS di Kota Blitar sangat rendah. Hal ini dikarenakan minimnya minat PNS untuk memahami aturan tersebut serta penyampaian informasi kepegawaian oleh pejabat terkait dimasing-masing SKPD tidak sampai ke seluruh jajaran SKPD. Kondisi ini berakibat fungsi pengawasan melekat oleh pimpinan SKPD terkait kepegawaian tidak berjalan secara optimal. Guna mengatasi permasalahan ini maka solusi yang

telah dilaksanakan yaitu mengadakan sosialisasi secara intensif dan terus menerus baik formal maupun non formal serta inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian di masing-masing SKPD dalam rangka menegakkan disiplin pegawai.

- **Persandian**

Terbatasnya tenaga pengelola urusan sandi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan memanfaatkan tenaga dari karyawan/wati yang berada di Bagian Umum untuk ikut membantu kelancaran kegiatan dimaksud yang sifatnya umum.

p. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Koridor pemberdayaan masyarakat dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) memandang bahwa proses pembangunan adalah proses yang berkesinambungan. Maka, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Hal ini akan membawa konsekuensi terhadap biasanya indikator pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu dilakukan solusi dengan jalan penyesuaian SKPD pengelola anggaran untuk pelaksanaan program – program pemberdayaan dengan harapan dapat meluruskan paradigma dan koridor pemberdayaan sesuai dengan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Blitar.

q. Urusan Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial Kota Blitar selama tahun 2012, berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diinventarisasikan sebagai berikut :

- Dari segi kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat aktif pada pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas petugas sosial khusus di tingkat Kecamatan sehingga menghambat adanya informasi, sosialisasi dan pemantauan lebih dekat mengenai perkembangan penanganan masalah sosial di daerah.
- Koordinasi antara pelaku kegiatan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih lemah dan terkesan belum sinergis dan terpadu, terutama dalam tataran teknis pelaksanaan kegiatan.
- Masih rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, karena program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas.
- Lemahnya integrasi program dan kegiatan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program kegiatan pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku kegiatan sosial (pemerintah, pemerhati sosial, dunia usaha, masyarakat madani).
- Belum optimalnya kelembagaan pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan.
- Masih banyaknya warga yang mengaku miskin yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori miskin ketika pemerintah meluncurkan bantuan sosial untuk masyarakat miskin, baik itu berupa pemberian dana bantuan sosial, pembagian barang kebutuhan pokok melalui pembelian dengan harga murah, dll. yang merupakan program pemerintah sebagai wujud perhatian dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.
- Masih ditemuinya permintaan bantuan sosial dari lembaga sosial dan atau masyarakat yang sama, baik pengajuan yang masuk di SKPD yang berbeda maupun di satu SKPD, dan ironisnya

bantuan sosial yang masuk tersebut terjadi antara 3 – 4 kali pengajuan dalam satu tahun anggaran. Adapun bantuan sosial dimaksud seperti bantuan rehab masjid, kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, dll.

Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi atau meminimalisir permasalahan tersebut sebagai penyempurnaan untuk tahun kedepan antara lain :

- Memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya (kompetensi) petugas sosial yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk mengumpulkan data dan informasi perkembangan warga miskin, PMKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait.
- Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang ada, seperti pengurus karang taruna, organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan menerima manfaat kegiatan, dengan melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat kelurahan dan masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial.
- Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program.
- Mengingat kompleksitasnya permasalahan sosial maka pendataan urusan sosial mutlak dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan data yang akurat (valid), misalnya ditingkatan RT/RW dan Kelurahan perlu dilakukan pendataan yang valid mengenai warga miskin, sehingga bagi penerima bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Selain itu bisa dengan melakukan pendataan

yang bekerjasama dengan BPS dan instansi terkait serta didukung oleh dana yang memadai dari daerah.

- Dalam menangani permasalahan sosial yang dinilai sangat memerlukan penanganan, dilakukan pemilihan kegiatan yang menggunakan skala prioritas yang sifatnya mendesak.
- Perlu dilakukan inventarisir, peningkatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial yang telah diajukan oleh masyarakat dan lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan, baik permintaan bantuan yang disetujui/telah dibantu maupun yang tidak disetujui/yang tidak dibantu setelah melalui hasil verifikasi.

*r. **Urusan Kebudayaan***

Dari sekian banyak agenda kegiatan pelestarian kebudayaan pada masyarakat Kota Blitar selama tahun 2012, secara umum sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa permasalahan antara lain :

- Belum terorganisasi dengan baik data base kesenian di masing-masing Kelurahan sehingga ada sebagian kelompok/group kesenian yang belum dapat kesempatan giliran tampil. Untuk tahun mendatang diharapkan untuk masing-masing kelurahan mempunyai data base kesenian sehingga kelompok kesenian yang belum dapat tampil dapat kesempatan tampil sesuai jadwal;
- Adanya beberapa kelurahan yang tidak memiliki potensi kesenian tradisional dihimbau untuk memotivasi seniman dan warganya untuk membentuk group/kelompok kesenian tradisional.

*s. **Urusan Statistik***

Dalam penyusunan Kota Blitar Dalam Angka dan penyusunan PDRB tidak bisa langsung dilaksanakan diawal tahun, karena kelengkapan data yang dibutuhkan masih belum bisa terkumpul secara keseluruhan. Selain itu, data yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari lokal Kota Blitar, tetapi juga dibutuhkan data skala regional Jawa Timur. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan

himbauan dan permintaan partisipasi aktif dari instansi terkait sehingga penyiapan data yang dibutuhkan segera terlaksana tanpa meninggalkan kaidah validitas data.

Analisis dalam buku Kota Blitar Dalam Angka saat ini masih ada keterbatasan, beberapa analisis yang dibutuhkan oleh dinas terkait sebagian belum tercakup. Selain data dasar yang ditampilkan, untuk tahun mendatang bisa juga ditampilkan prediksi dari data itu beberapa tahun kedepan sehingga bisa dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang akan datang.

t. Urusan Kearsipan

Kesadaran terhadap pentingnya kearsipan baru muncul dan menguat saat kearsipan menjadi urusan wajib sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Berpangkal dari rendahnya anggapan dan apresiasi terhadap kearsipan akhirnya bermuara ke banyak sisi, antara lain :

- Kesalahan persepsi mengenai arsip : arsip hanya dilihat dari segi fisik bukan dari informasi didalamnya. Dampaknya pengelola arsip merasa dan dianggap sebagai penjaga gudang kertas yang seolah hanya bisa mendapat tambahan penghasilan dengan cara menjual kertas –kertas bekas.

Solusi : meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi kearsipan, diseminasi peraturan kearsipan dan peraturan lain yang relevan dalam upaya merubah paradigma arsip dilihat dari aspek fisik kepada paradigma informasi, sehingga *mindsetnya* pengelolaan arsip adalah pengelolaan informasi.

- Kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab kearsipan : hingga saat ini perhatian dan apresiasi organisasi terhadap urusan kearsipan masih sangat rendah. Disadari atau tidak, salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah administrasi pemerintahan, dan suka atau tidak dalam melaksanakan administrasi pemerintahan setiap aparatur pasti

bersinggungan dan bergelut dengan urusan arsip. Jadi arsip secara otomatis tercipta seiring (*by product*) dengan berjalannya kegiatan organisasi, tidak ada arsip berarti tidak ada administrasi sebaliknya tidak ada administrasi tanpa kehadiran arsip. Namun kenyataan yang ada hingga saat ini adalah persoalan kearsipan seakan hanya menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan, dan bukan instansi pencipta arsip. Arsip baru dianggap penting dan sangat dibutuhkan saat terjadi kasus hukum yang berdampak finansial sehingga harus menghadirkan arsip sebagai bukti utama.

Solusi : Memperkuat lembaga kearsipan dan unit-unit kearsipan SKPD, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak –pihak terkait lain. Adanya apresiasi dan komitmen dari pucuk pimpinan tertinggi di Kota Blitar dengan prinsipnya bahwa reformasi birokrasi diawali dengan penataan arsip merupakan titik terang bagi pengembangan kearsipan di masa mendatang.

- Sumber Daya Manusia : yang ahli dan terampil di bidang kearsipan sangat terbatas Padahal sumber daya manusia merupakan penggerak, perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan di setiap bidang dan lini organisasi, demikian halnya bidang kearsipan.

Solusi : mengintensifkan pembentukan jejaring kearsipan melalui penunjukan tenaga kearsipan SKPD dan Arsiparis yang ditindaklanjuti dengan kegiatan – kegiatan sbb :

- ✓ peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang kearsipan melalui penyelenggaraan, pengaturan serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- ✓ pengaturan peran dan kedudukan hukum tenaga kearsipan SKPD dan Arsiparis;

- ✓ penyediaan insentif/jaminan kesehatan bagi tenaga kearsipan SKPD dan tunjangan profesi bagi Arsiparis;
- ✓ pemberian penghargaan kepada tenaga kearsipan SKPD dan Arsiparis melalui mekanisme kompetisi ilmiah kearsipan, lomba tertib arsip dan kegiatan lain yang sejenis.
- Sarana dan prasarana : bidang kearsipan sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan peralatan dan pusat arsip masih belum memenuhi syarat baik secara jumlah maupun standar kearsipan. Untuk saat ini penelusuran dan penyediaan informasi kearsipan masih belum memanfaatkan teknologi otomasi. Demikian halnya produk hukum daerah yang mampu memberikan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan kearsipan juga masih minim.

Solusi : Pada tahun 2010 dilaksanakan pengadaan brankas sebagai sarana penyimpanan arsip vital berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Blitar dan BPKB kendaraan dinas, 1 (satu) unit Roll O'Pack/ File Mobile guna penyimpanan arsip inaktif SKPD di Pusat Arsip KPABD Kota Blitar serta 1 (satu) unit Mesin Penghancur Kertas. Dan untuk selanjutnya, secara bertahap akan terus dilaksanakan pengadaan dan penyediaan peralatan dan pusat arsip yang sesuai standar kearsipan melalui mekanisme penganggaran dalam APBD. Sedangkan untuk optimalisasi manajemen kearsipan melalui penggunaan teknologi otomasi akan dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan telematika dan disiplin ilmu lain yang relevan. Dalam rangka penyediaan dan penguatan produk hukum kearsipan daerah selalu diintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan institusi kearsipan untuk memperoleh kesepahaman dan memperlancar dan proses penyusunan produk hukum daerah.

u. Urusan Perpustakaan

Yang menjadi permasalahan klasik selama ini adalah terbatasnya pagu anggaran serta minimnya fasilitas dan bahan pustaka sehingga membuat pengembangan perpustakaan tidak bisa dilaksanakan. Disamping permasalahan klasik terbatasnya pagu anggaran, pengembangan perpustakaan daerah terkendala karena adanya keterbatasan kewenangan pengelolaan perpustakaan yang hanya dijalankan oleh UPTD, sehingga dalam hal ini nantinya dapat dijadikan perhatian oleh Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan evaluasi organisasi.

URUSAN PILIHAN

a. Urusan Pertanian dan Perikanan

Luas lahan pertanian yang terus-menerus mengalami penurunan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pertanian tanaman pangan yang berarti juga mengancam ketersediaan pangan masyarakat. Jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis dalam perlindungan lahan pertanian, dikhawatirkan terjadinya krisis pangan. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu dikaji pemberlakuan regulasi perlindungan lahan pertanian di Kota Blitar dengan adanya penetapan lahan sawah abadi.

b. Urusan Pariwisata

Usaha Pemerintah Kota Blitar dalam mengembangkan sektor pariwisata pada umumnya telah berjalan dengan baik. Namun dalam realisasinya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri kurang optimal. Solusi yang dapat diberikan adalah bekerjasama dengan pelaku wisata untuk ikut serta dalam mempromosikan potensi wisata di Kota Blitar terutama untuk mengisi materi promosi. Selain itu juga dapat diupayakan untuk

menciptakan ide, kreasi dan inovasi baru dalam mengemas media promosi sehingga memberikan kesan yang kuat bagi pelaku wisata untuk mengenal Kota Blitar karena ada keunggulan yang dimilikinya.

- Fungsi layanan informasi dan branding pariwisata untuk mendukung pemasaran pariwisata belum berjalan maksimal. Informasi mengenai kepariwisataan menjadi hal yang sangat penting bagi pemasaran wisata khususnya bagi pelaku wisata yang membutuhkan layanan informasi tentang pariwisata. Apabila transfer informasi kepariwisata tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal maka upaya pemasaran wisata Kota Blitar juga akan terhambat. Oleh karena itu perlu memaksimalkan beberapa sarana prasarana untuk memperkuat layanan informasi wisata seperti pembuatan papan informasi (bisa berupa tugu/gapura atau baliho/papan billboard) yang memberikan gambaran potensi wisata Kota Blitar di setiap pintu masuk Kota Blitar. Selain itu ruang layanan informasi harus bisa memberikan pemahaman kepada setiap wisatawan bahwa Kota Blitar memiliki banyak alternatif lokasi yang bisa dikunjungi. Sehingga ke depan PIPP bisa benar-benar berfungsi sebagai jendela informasi pariwisata, tidak hanya Kota Blitar namun juga kota-kota disekitar.

c. Urusan Perdagangan dan Industri

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri, khususnya industri kecil dan menengah serta pengrajin di Kota Blitar pada Tahun 2012 telah menunjukkan hasil yang signifikan yang mengarah pada perkembangan yang positif walaupun pertumbuhannya lambat, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit dikontrol oleh pelaku industri, disamping faktor internal juga belum sepenuhnya dapat menunjang percepatan pertumbuhan industri sebagaimana yang diharapkan.

Hal-hal yang dihadapi dan menjadi permasalahan dalam pengembangan sektor industri di Kota Blitar antara lain :

- Kultur masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan industri;
- Daya beli masyarakat yang masih terbatas;
- Keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Keterbatasan ketrampilan, kreatifitas dan daya cipta SDM;
- Ketergantungan terhadap barang import masih relatif tinggi;
- Lemahnya akses IKM terhadap sumber-sumber permodalan;
- Lemahnya jiwa kewirausahaan para pelaku industry;
- Upaya peningkatan kualitas produk masih kurang;
- Kurangnya terobosan dalam pemasaran produk.

2.1.4. Aspek Daya Saing

Menurut *Institute of Management and Development* (IMD) yang dimaksud daya saing adalah kemampuan suatu Negara atau suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan daerah/Negara dengan cara mengelola asset dan proses, daya tarik dan agrevitas, globalitas, serta menginterasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan social. Daya saing juga bisa dimaknai sebagai kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Blitar dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan potensi daerah dalam rangka menarik investor masuk ke daerah. Salah satu strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menggali sumber – sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuhkan investasi di daerah. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk

megukur daya saing daerah (Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2007) yaitu (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) system keuangan, (4) infrastruktu dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber Daya Manusia, (7) kelembagaan, (8) *governance* dan kebijakan pemerintah, dan (9) manajemen dan ekonomi mikro.

1). Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, permasalahan yang timbul saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota Blitar. Produktivitas sektor PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12% per tahun.

Kemampuan ekonomi daerah pada daya saing daerah merupakan kemampuan daerah membuat daya tarik para pelaku ekonomi untuk tetap berinvestasi atau menarik investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kota Blitar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong meningkatnya PDRB suatu daerah ditinjau dari sisi penggunaannya. Jumlah konsumsi yang semakin besar mengindikasikan adanya peningkatan pada pendapatan masyarakat. Dimana kenaikan pendapatan yang kemudian dibelanjakan kembali tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai PDRB Kota Blitar

Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran/ konsumsi, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan, semakin tinggi pendapatan / kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk makanan semakin menurun, sedangkan pengeluaran untuk non makanan akan terjadi sebaliknya yaitu proporsi akan semakin meningkat. Pergeseran

komposisi dan pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi.

Indikator selanjutnya adalah jumlah penginapan / hotel yang ada di Kota Blitar. Perkembangan wisata di Kota Blitar dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor produk wisata yang meliputi obyek wisata, daya tarik wisata, serta aksesibilitas. Sedangkan faktor yang kedua adalah jumlah wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara. Objek dan daya tarik wisata di Kota Blitar terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata religius/ziarah, dan wisata buatan.

2). Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola kawasan perkotaan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitas serta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah sehingga diharapkan akan memberikan nilai lebih atau keunggulan kompetitif bagi Kota Blitar. Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur antara lain perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, ketersediaan listrik dan penginapan.

3). Fokus Iklim Berinvestasi

Peran investasi terhadap pembangunan di daerah sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian. Investasi sebagai unsur pokok terhadap peningkatan daya saing harus dikelola secara optimal. Peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dilaksanakan melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi, pemberdayaan

BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

Penciptaan iklim yang kondusif merupakan elemen utama didalam meningkatkan investasi. Keberhasilan suatu daerah dalam menarik investor menggambarkan daya tarik dan daya saing daerah yang bersangkutan. Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh : a). Kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal; b). Keamanan, politik dan sosial budaya; c).Ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; d)Tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. e). Infrastruktur fisik baik ketersediaan infrastruktur atau kualitas dari infrastruktur yang ada.

Jaminan keamanan dan ketertiban, iklim usaha yang baik dan proses perijinan yang mudah merupakan salah satu indikator penciptaan iklim yang kondusif. Secara umum kondisi keamanan di Kota Blitar relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diatasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan keamanan lingkungannya.

Selain itu, upaya peningkatan iklim yang kondusif menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan peraturan perundang – undangan di daerah, perbaikan pelayanan perijinan dan non perijinan, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatkan peluang investasi dilaksanakan dalam upaya peningkatan fasilitasi untuk pengembangan produk-produk unggulan di Kota Blitar telah dikembangkan, baik yang mempunyai daya dukung untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal maupun yang mampu dan mempunyai potensi untuk keperluan perdagangan luar negeri.

TABEL 2.56
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI TAHUN 2014
KOTA BLITAR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN										
1.01 01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah APK Pendidikan Anak Usia Dini	28620 siswa	6934 siswa	5722 siswa	6934 siswa		5722 siswa			Dinas Pendidikan
1.01 01 15 58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penyelenggaraan lomba kreatif anak dalam HAN RA/TK	80 TK & 70 SD/MI selama 5 tahun	80 TK & 70 SD/MI	80 TK & 70 SD/MI	80 TK & 70 SD/MI	84,97	80 TK & 70 SD/MI	80 TK & 70 SD/MI		
1.01 01 15 64	Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan Bimtek Guru bidang manajemen operasional Paud di Tingkat Kota	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		
1.01 01 15 67	Penyelenggaraan lomba kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan anak usia dini	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.01 01 15 68	Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi	105 PAUD selama 5 tahun	164 PAUD	105 PAUD	164 PAUD	156%	105 PAUD	164 PAUD		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain				1 Keg	1 Keg	100%	1 keg	1 keg		
	Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir										
	Pengadaan Mebeleur Sekolah										
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini										
1.17 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Prosentase fasilitasi kelompok kesenian	100%		100%			100%			
1.17 01 15 05	Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya	Prosentase fasilitasi kelompok Paduan Suara	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
1.01 01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Meningkatnya kualitas Pendidikan dasar 9 tahun yang diukur dari :									
		Prosentase APK SD/MI/Paket A	135%		135%			135%			
		Prosentase APK SMP/MTs/Paket B	150%		150%			150%			
		Prosentase APM SD/MI/Paket A	120%	114,84%	120%	114,84%	96%	120%			
		Prosentase APM SMP/MTs/Paket B	116%	124,16%	116%	124,16%	107%	116%			
		Angka Kelulusan SD/MI	100%	1	100%	100%	100%	100%			
		Angka kelulusan SMP/MTs	100%	99,08%	100%	99,08%	99,08%	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 01 16 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah sekolah penerima dana BOS,BKSM dan Sekolah Kritis	66 sekolah selama 5 tahun	66 sekolah	66 sekolah	66 sekolah	100%	66 sekolah	66 sekolah		
1.01 01 16 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Frekuensi penyelenggaraan paket B dan setara SMP	5 kali 500 siswa	1 kali 500 siswa	1 kali 500 siswa	1 kali 500 siswa	100%	1 kali 500 siswa	3 kali 500 siswa		
1.01 01 16 70	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa bidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah siswa Pendidikan Dasar yang berprestasi di bidang olahraga, seni dan budaya	330 siswa		66 siswa	23 siswa	35%	66 siswa	99 siswa		
1.01 01 16 79	Penyelenggaraan UAN SD/MI	Frekuensi penyelenggaraan UAN SD/MI	5 kali 2500 siswa	1 kali 2200 siswa	1 kali 2500 siswa	1 kali 2500 siswa	100%	1 kali 2500 siswa	3 kali 2500 siswa		
1.01 01 16 80	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Dasar	Jumlah penyediaan pakaian seragam siswa SD	10200 stel/5100 anak	10200 stel/5100 anak	10.200 stel	10.200 stel	100%		20400 stel/5100 anak		
1.01 01 16 81	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP	Jumlah penyediaan pakaian seragam siswa SMP	4976 stel/2488 anak	4976 stel/2488 anak	4.976 stel	4.976 stel	100%				
1.01 01 16 82	Fasilitasi Pemberantasan Buta Huruf	Frekuensi penyelenggaraan kejar paket A	5 keg		1 keg			1 keg	2 keg		
1.01 01 16 83	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	85%		85%			85%	85%		
1.01 01 16 84	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Frekuensi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.01 01 16 85	Fasilitasi pelaksanaan lomba bidang studi Matematika dan IPA	Frekuensi pelaksanaan lomba bidang studi Matematika dan IPA	10 kali lomba	2 kali lomba	2 kali lomba	2 kali lomba	100%	2 kali lomba	9 kali lomba		
1.01 01 16 86	Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas SD	Frekuensi penyelenggaraan lomba kreatifitas SD	45 kali lomba	9 kali lomba	9 kali lomba	9 kali lomba	100%	9 kali lomba	27 kali lomba		
1.01 01 16 87	Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah	5 kali 150 lembaga	1 kali 150 lembaga	1 kali 150 lembaga	1 kali 150 lembaga	100%	1 kali 150 lembaga	3 kali 150 lembaga		
1.01 01 16 88	Pengembangan Kepribadian/ Pembentukan Mental Siswa SMP	Frekuensi penyelenggaraan peningkatan kepribadian siswa SMP	16 sekolah selama 60 bulan		16 sekolah selama 12 bulan	16 sekolah selama 12 bulan	100%	16 sekolah selama 12 bulan	16 sekolah selama 24 bulan		
1.01 01 16 91	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Pendidikan 2010)	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang terbangun	95 sekolah	19 sekolah	16 sekolah	16 sekolah	100%	19 sekolah	57 sekolah		
	Pengadaan Sepatu Siswa SMP	Jumlah penyediaan sepatu untuk siswa SMP			108 pasang	108 pasang	100%		108 pasang		
1.01 01 16 92	Penyelenggaraan UAN SMP/MTS	Pelaksanaan UAN SMP/MTS							1 keg		
1.01 01 16 93	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar									
1.01 01 16 98	Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Angka drop out pendidikan dasar									
1.01 01 16 ##	Fasilitasi penerimaan siswa baru	Penerimaan Siswa							1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 01 17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah yang diukur dari :			150%			150%			
		Prosentase APK SMA/SMK/Paket C	150%		125%			125%			
		Prosentase APM SMA/SMK/Paket C	125%		100%	192,35%		100%			
		Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100%		99,60%	98,17%					
	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah untuk SMA 4			6 unit	6 unit	100%		6 unit		
	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah mebeleur sekolah untuk siswa		15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%				
1.01 01 17 15	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Prosentase penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu	Jumlah penerima bantuan beasiswa		1253 siswa		1253 siswa					
1.01 01 17 63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Frekuensi penyelenggaraan Paket C	5 kali 900 siswa	1 kali 900 siswa	1 kali 900 siswa	1 kali 900 siswa	100%	1 kali 900 siswa	3 kali 900 siswa		
1.01 01 17 67	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa bidang olahraga, seni dan budaya	Frekuensi pelaksanaan seleksi siswa berprestasi bidang olahraga, seni dan budaya	48 bulan		12 bulan			12 bulan	12 bulan		
1.01 01 17 69	Fasilitasi penerimaan siswa baru	Frekuensi penerimaan Siswa Baru SMP dan SMA Negeri	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg 2500 siswa	100%	1 keg	3 keg		
1.01 01 17 70	Fasilitasi Lomba Kompetensi Siswa SMK	Frekuensi penyelenggaraan Lomba Kompetensi siswa SMK Tk.Nasional	5 kali 105 siswa	1 kali 105 siswa	1 kali 105 siswa	1 kali 105 siswa	100%	1 kali 95 siswa	3 kali 95 siswa		
1.01 01 17 71	Penyelenggaraan uji kompetensi siswa didik	Frekuensi penyelenggaraan uji kompetensi siswa didik	5 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	100%	1 kali 3378 siswa	3 kali 3378 siswa		
1.01 01 17 72	Fasilitasi publikasi dan sosialisasi SMK	Frekuensi publikasi dan sosialisasi SMK	5 kali 49 sekolah	1 kali 49 sekolah	1 kali 49 sekolah	1 kali 49 sekolah	100%	1 kali 49 sekolah	3 kali 49 sekolah		
1.01 01 17 74	Penyelenggaraan program seleksi Paskibraka	Frekuensi penyelenggaraan seleksi paskibraka	5 kali 86 orang	1 kali 86 orang	1 kali 86 orang	1 kali 86 orang	100%	1 kali 86 orang	3 kali 86 orang		
1.01 01 17 75	Penyelenggaraan UAN SMK	Frekuensi penyelenggaraan UAN SMK	5 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	1 kali 3378 siswa	100%	1 kali 3378 siswa	3 kali 3378 siswa		
1.01 01 17 76	Fasilitasi penyelenggaraan lomba Olah Raga dan Science siswa SMP dan SMU	Frekuensi penyelenggaraan lomba olah raga dan science siswa SMP dan SMU	5 keg	1 keg	1 keg 105 siswa	1 keg 105 siswa	100%	1 keg	3 keg		
1.01 01 17 79	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/ SMA	Frekuensi penyelenggaraan ujian nasional SMP/SMA	5 kali 4250 siswa	1 kali 4250 siswa	1 kali 4250 siswa	1 kali 4250 siswa	100%	1 kali 4250 siswa	3 kali 4250 siswa		
1.01 01 17 80	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Menengah	Jumlah penyediaan pakaian seragam siswa sekolah menengah	8432 stel selama 5 tahun		8432 stel	8432 stel	100%	8432 stel	8432 stel selama 2 tahun		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 01 17 81	Fasilitasi kegiatan PMDK/Penerimaan Siswa Baru SMK	Frekuensi penyelenggaraan kegiatan PMDK/ Penerimaan siswa baru SMK	5 kali 1500 siswa	1 kali 1500 siswa	1 kali 1500 siswa	1 kali 1500 siswa	100%	1 kali 1500 siswa	3 kali 1500 siswa		
1.01 01 17 82	Pengembangan Kepribadian/ Pembentukan Mental Siswa SMA dan SMK	Prosentase peningkatan kepribadian / pembentukan mental siswa SMP	24 sekolah selama 5 tahun		24 sekolah	21 sekolah	87.5%	24 sekolah	21 sekolah selama 2 tahun		
	Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah	Jumlah sepatu siswa SMA swasta		40 pasang	108 pasang	108 pasang	100%		148 pasang		
	Pengembangan Sarana dan Prasarana SMK Model B	Jumlah Gedung Sekolah untuk Siswa SMKN 1			1 unit	1 unit	100%		1 unit		
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah										
1.01 01 17 87	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP	Tersedianya sarpras SMP yang memadai							1 unit		
1.17 01 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	65%								
1.17 01 17 08	Fasilitasi Pengembangan Kesenian Daerah	Frekuensi pengiriman duta seni dan budaya	5 jenis cabang seni	5 cabang seni 290 siswa	5 cabang seni 290 siswa	5 cabang seni 290 siswa	100%		5 jenis cabang seni		
	Penyelenggaraan Lomba Kesenian Daerah										
	Pengadaan Mebeleur Sekolah										
	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Serbaguna/Aula										
	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU										
	Penyelenggaraan Uji kompetensi Siswa SMK										
	Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru										
	Fasilitasi Lomba Kompetensi SMK										
	Penyelenggaraan uji kompetensi Siswa didik										
	Fasilitasi Publikasi dan Sosialisasi Sekolah menengah										
	Penyelenggaraan Program Seleksi Paskibraka										
	Penyelenggaraan UAN SMK										
	Fasilitasi Penyelenggaraan lomba olahraga dan Science Siswa										
	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMA										
	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa sekolah menengah										
	fasilitasi kegiatan PMDK/ Penerimaan Siswa Baru SMK										
	Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa SMA										
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA										
	Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah menengah							550 pasang	550 pasang		
	Pembangunan Gedung Sekolah										
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK										
1.01 01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Prosentase peningkatan kualitas lembaga pendidikan non formal	90%		75%			75%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 01 18 02	Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Non Formal	Tercipta kemudahan dalam operasional pendidikan non formal	85 lembaga selama 5 tahun	85 lembaga	85 lembaga	85 lembaga	100%	85 lembaga			
1.01 01 18 14	Pengembangan kreatifitas Pendidikan Non Formal	Prosentase siswa pendidikan non formal yang berprestasi dalam lomba kreatifitas.	120 siswa	100 siswa	24 siswa	24 siswa	100%	24 siswa	72 siswa		
1.01 01 18 15	Pembangunan Sanggar Pramuka	Prosentase bangunan sanggar pramuka yang terbangun	100%								
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah pameran			1keg	1keg	100%		1 keg		
1.01 01 18 20	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan non Formal							1 unit			
	Pengadaan sarana, peralatan dan Kelembagaan AUTIS CENTER	Terbentuknya kelembagaan Autis Center							1 unit		
1.01 01 19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	Prosentase Kelulusan Pendidikan Luar Biasa	100%		100%			100%			
1.01 01 19 60	Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas murid PLB	Frekuensi pelaksanaan Proseni dan Pramuka PLB	5 kali 110 siswa	1 kali 110 siswa	1 kali 110 siswa	1 kali 110 siswa	100%	1 kali 110 siswa	3 kali 110 siswa		
1.01 01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart kompetensi	60%		35%			35%			
1.01 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah pendidik yang tersertifikasi	1500 guru	252 guru	300 guru	252 guru	84%	300 guru	852 guru		
1.01 01 20 02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan kepala sekolah yang memenuhi standart kompetensi	850 orang	170 orang	170 orang	170 orang	100%	170 orang	510 orang		
1.01 01 20 10	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah GTT dan PTT yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	870 GTT/PTT selama 5 tahun	870 GTT/PTT	870 GTT/PTT	870 GTT/PTT	100%	870 GTT/PTT	870 GTT/PTT selama 3 tahun		
1.01 01 20 13	Fasilitasi penilaian angka kredit	Frekuensi pelaksanaan penilaian angka kredit	5 kali 600 org	1 kali 600 org	1 kali 600 org	1 kali 600 org	100%	1 kali 600 org	3 kali 600 org		
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan										
1.01 01 20 14	Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi	Jumlah guru dan kepala sekolah yang berprestasi	250 org	50 org	50 org	50 org	100%	50 org	150 org		
1.18 01 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Prosentase prestasi olahraga siswa	86%								
1.18 01 20 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah siswa berprestasi bidang olahraga tingkat daerah yang mendapatkan pembinaan	23 orang	23 orang	23 orang	23 orang	100%		46 orang		
1.18 01 20 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga	3 jenis olahraga (80 atlet)	3 jenis olahraga (80 atlet)	1 paket	1 paket	100%		3 jenis olahraga (80 atlet)		
1.18 01 20 19	Penyelenggaraan kompetisi olahraga Walikota Cup	Frekuensi penyelenggaraan kompetisi olahraga walikota cup	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%		3 kali		
1.01 01 21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Prosentase peningkatan Pelayanan Pendidikan	85%		85%			85%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 01 21 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan citizen charter (CC)	15 sekolah		3 kali	3 kali	100%	3 kali	6 kali		
1.01 01 21 2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	terselenggaranya kerjasama bidang pendidikan						1 keg	1 keg		
1.01 01 21 8	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Dokumen perencanaan dan laporan kegiatan									
1.01 01 22	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang diukur dari :									
		Angka rata-rata lama sekolah	11 tahun		11 tahun			11 tahun			
		angka melek huruf	99%		99%			99%			
1.01 01 22 01	Rintisan Sekolah Gratis	Prosentase penyaluran dana pendidikan rintisan sekolah gratis bagi pendidikan dasar dan menengah	123 sekolah selama 5 tahun	117 sekolah	123 sekolah	117 sekolah	95.12%	123 sekolah	360 sekolah		
1.01 01 22 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Frekuensi kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	20 kali		5 kali	5 kali	100%	5 kali			
1.01 01 22 08	Penyelenggaraan pelatihan , seminar dan lokakarya,serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Frekuensi pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	20 kali		8 kali				8 kali		
1.01 010 15 1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Prosentase peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	85%		80%			80%			UPTD. Kep. Kidul
1.01 010 15 09 1	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun	6 TK/RA	20 m / 54 m	20 m / 54 m	20 m / 54 m	100%	6 TK/RA	6 TK/RA		
1.01 010 15 15 1	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan LKS siswa SD	26003 buah	28800 buah	5198 buah	28800	554%	5198 buah	39095 buah		
1.01 010 15 18 1	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa TK	7 jenis	5 jenis	7 jenis	5 jenis	71%	7 jenis	7 jenis		
1.01 010 15 19 1	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah penyediaan mebeleur sekolah TK	5 jenis	8 jenis	5 jenis	8 jenis	160%	5 jenis	5 jenis		
1.01 010 15 20 1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan perlengkapan sekolah TK	14 jenis	5 jenis	14 jenis	5 jenis	98,92%	14 jenis	14 jenis		
1.01 010 15 21 1	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah penyediaan alat rumah tangga sekolah	4 jenis	17 jenis	4 jenis	17 jenis	425%	4 jenis	4 jenis		
1.01 010 15 23 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang dilakukan pemeliharaan	6 TK/RA	6 TK/RA	6 TK/RA	4 TK/RA	66.57%	6 TK/RA			
1.01 010 15 42 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang dilakukan rehabilitasi	3 sekolah	2 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	66.67%	3 sekolah	3 sekolah		
1.01 010 15 59 1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	21 TK/RA	21 TK/RA	21 TK/RA	21 TK/RA	100%	21 TK/RA	21 TK/RA		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 010 16 1	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			
1.01 010 16 09 1	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun	15 unit	3 unit	3 unit	4 unit	133%	3 unit	11 unit		
1.01 010 16 15 1	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan Buku Pelajaran bagi siswa SMA		973	973	973	100%	973	2919		
1.01 010 16 41 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang dilakukan rehabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit		
1.01 010 16 70 1	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Frekuensi pelaksanaan lomba tingkat SD	8 jenis lomba selama 5 tahun	8 jenis lomba	8 jenis lomba	8 jenis lomba	100%	8 jenis lomba	8 jenis lomba selama 3 tahun		
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah lembaga yang difasilitasi untuk mengikuti pameran			24 sekolah	24 sekolah	100%	24 sekolah			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Peserta UNAS yang dimonitoring		601 orang	601 orang	601 siswa	100%	601 siswa	1202 siswa		
	Pengadaan Sepatu Siswa SD	Jumlah penyediaan sepatu siswa		1.806 pasang	1.806 pasang	1.806 pasang	100%	1.806 pasang	3.612 pasang		
	Fasilitasi Kantin Kejujuran SD	Jumlah kantin kejujuran				1 sekolah		1 sekolah	2 sekolah		
	Fasilitasi Kegiatan UKS										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir										
1.01 010 20 2	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Uji kompetensi		88 lembaga	88 lembaga	88 lembaga	100%	88 lembaga	88 lembaga		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg			
1.01 010 15 2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Prosentase peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	90%		85%			85%			UPTD. Kec. Sukorejo
1.01 010 15 01 2	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang terbangun	1 unit		1 unit			1 unit			
1.01 010 15 07 2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana bermain	35 sekolah	4 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	100%	7 sekolah	18 sekolah		
1.01 010 15 09 2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun	9 unit	9 unit	10 meter	10 meter	100%	10 meter			
1.01 010 15 13 2	Pembangunan Jaringan Listrik sekolah dan perlengkapannya	Prosentase penyediaan jaringan listrik	100%								
	Pengadaan Buku - buku dan Alat Tulis Siswa			1400 set	1400 set	1400 set	100%	1400 set	1400 set		
1.01 010 15 18 2	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK/RA	25 jenis	9 jenis	5 jenis	9 jenis	180%	5 jenis	19 jenis		
1.01 010 15 29 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Bermain	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bermain						12 bln	12 bln		
1.01 010 15 19 2	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah penyediaan mebeleur sekolah TK/RA	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	15 jenis		
1.01 010 15 20 2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Penyediaan perlengkapan sekolah	25 jenis	6 jenis	5 jenis	6 jenis	120%	5 jenis	15 jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 010 15 42 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Prosentase bangunan sekolah RA/TK yang terrehabilitasi	5 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	3 lokasi		
1.01 010 15 45 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah RA/TK yang terrehabilitasi	5 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	3 lokasi		
1.01 010 15 56 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang ter rehabilitasi	15 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	3 sekolah	100%	3 sekolah	9 sekolah		
1.01 010 15 58 2	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi pelaksanaan kegiatan HAN TK/RA	1 kali	1 kali	28 sekolah	28 sekolah	100%		2 kali		
1.01 010 15 65 2	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	48 bulan		12 bulan			12 bulan	36 bln		
1.01 010 15 67 2	Pengembangan Lomba Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi penyelenggaraan lomba kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini	4 keg		1 keg			1 keg	3 keg		
1.01 010 16 2 2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			
1.01 010 16 02 2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas yang terbangun	1 unit								
1.01 010 16 09 2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun	1 lokasi	186 meter		186 meter	100%		1 lokasi		
1.01 010 16 11 2	Pembangunan Ruang Ibadah	Jumlah ruang ibadah yang terbangun	1 lokasi		1 lokasi			1 lokasi			
1.01 010 16 14 2	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Jumlah saluran air yang terbangun	2 sekolah		1 sekolah			1 sekolah			
1.01 010 16 15 2	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	16425 siswa	3280 siswa	3280 siswa	3280 siswa	100%	3280 siswa	9840 siswa		
1.01 010 16 18 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa									
1.01 010 16 19 2	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah penyediaan mebelair SD/MI	2 jenis untuk 39 lembaga		2 jenis untuk 20 sekolah			2 jenis			
1.01 010 16 41 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terrehabilitasi	1 unit	1 unit		1 unit	100%		2 unit		
1.01 010 16 44 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehab ruang kelas yang terrehabilitasi	2 sekolah	1 sekolah	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 sekolah	2 sekolah		
1.01 010 16 53 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah	Jumlah ruang ibadah yang terrehabilitasi	2 lokasi						1 lokasi		
1.01 010 16 55 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan	Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah yang direhabilitasi	2 lokasi								
1.01 010 16 70 2	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Frekuensi pelaksanaan lomba olahraga HAN SD, MAPEL, MIPA, Siswa berprestasi dan gebyar seni	10 keg	2 keg	6 jenis	6 jenis	100%	2 keg	5 keg		
1.01 010 16 73 2	Penyebarnya luasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar	Frekuensi penyebaran luasan dan sosialisasi program kegiatan pendidikan dasar	60 bulan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	12 bulan	24 bulan		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 010 6 2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan									
1.01 010 15 3	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Prosentase peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	90%		80%			85%			UPTD Kec. Sananwetan
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir			3 paket			100%		6 paket		
1.01 010 15 15 3	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan peraga Siswa		14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	14 jenis	14 jenis		
1.01 010 15 19 3	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah penyediaan mebeleur sekolah	60 meja 120 kursi	60 meja 120 kursi	60 meja 120 kursi	60 meja 120 kursi	100%	60 meja 120 kursi	60 meja 120 kursi		
1.01 010 15 58 3	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Frekuensi penyelenggaraan lomba HAN RA/TK	1 kali		1 kali			1 kali			
1.01 010 15 59 3	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase penyaluran dana DOP RA/TK	35 TK/RA		35 TK/RA			35 TK/RA			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah		60 buah	60 buah	60 buah	100%	60 buah	60 buah		
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat rumah tangga sekolah		5 macam			167%		8 macam		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehab ruang kelas		4 sekolah			100%				
	Penyelenggaraan lomba Kreatifitas Pendidikan Anak usia Dini	Jumlah Lomba HAN RA/TK		1 macam			100%	1 macam			
1.01 010 16 3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			
1.01 010 16 2 3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	jumlah rumah penjaga sekolah yang terbangun						1 unit%	1 unit		
1.01 010 16 07 3	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang terbangun	5 lokasi		1 lokasi			1 lokasi			
1.01 010 16 09 3	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terbangun	30 lokasi	30 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100%	6 lokasi			
1.01 010 16 15 3	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	4166 LKS selama 5 tahun	4166 LKS selama 5 tahun	4166 LKS	4166 LKS	100%	4166 LKS			
1.01 010 16 19 3	Pengadaan Mebeluur Sekolah	Jumlah penyediaan mebeleur sekolah	Meja 250 bh, kursi 290 bh	Meja 8 buah	Meja 50 bh, kursi 58 bh	8 buah almari	100%	Meja 50 bh, kursi 58 bh			
1.01 010 16 57 3	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah guru berprestasi hasil seleksi tingkat kecamatan	620 orang	54 orang	124 orang	124 orang	100%	124 orang			
1.01 010 16 69 3	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase peningkatan kegiatan MKKS, Gugus, sanggar OR dan PAI	10 MKSS, 40 gugus, 20 sanggar OR, 10 PAI	2 MKSS, 40 gugus, 20 sanggar OR, 10 PAI	2 MKSS, 8 gugus, 4 sanggar OR, 2 PAI	2 MKSS, 8 gugus, 4 sanggar OR, 2 PAI	100%	2 MKSS, 8 gugus, 4 sanggar OR, 2 PAI			

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 010 16 3 6	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya 3 ruang kelas bertingkat									
1.01 010 16 14 6	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Tersedianya 3 kamar mandi siswa									
1.01 010 16 22 6	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pengadaan motor roda 3 Viar									
1.01 010 16 44 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terselesaikanya rehabilitasi 9 ruang kelas									
1.01 01 16 71 0.6	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Tersedianya Tenaga Pendidik dan sistem Pengajaran yang Handal									
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg			
1.01 010 16 8	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			UPTD SMP Negeri 4 Blitar
1.01 010 16 15 8	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	543 buah selama 5 tahun	12 macam 6 buah	12 macam 6 buah	12 macam 6 buah	100%	543 buah	543 buah		
1.01 010 16 20 8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan perlengkapan sekolah	85 buah selama 5 tahun	24 buah	85 buah	85 buah	100%	85 buah	194 buah		
	Pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan	Pengadaan Tanah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	2 unit		
	Fasilitas Kantin Kejujuran SMP	Jumlah Kantin Kejujuran	1 unit	1 unit		1 unit			1 unit		
	Pengadaan Sepatu SMP	Jumlah sepatu siswa	567 pasang		567 pasang	567 pasang		567 pasang	567 pasang		
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Upacara							1 unit	1 unit		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan sekolah							1 keg	1 keg		
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik							1 keg	1 keg		
	Pembangunan Sarana dan Prasana Kependidikan							1 keg	1 keg		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN					1 keg					
	Fasilitas Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional					1 keg		1 keg	1 keg		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.01 010 1 8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.01 010 2 8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Pemenuhan sarana dan prasarana									
1.01 010 6 8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.01 010 21 8	Program Peningkatan SarANA DAN PRASANA Olah raga	Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana olah raga									
1.01 010 21 6 8	Pemeliharaan tutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga						12 bln	12 bln		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 011 16 63 0	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Terpenuhinya buku LKS siswa									
	Pengadaan Sepatu SMP	Jumlah sepatu siswa	444 pasang	444 pasang	444 pasang	444 pasang		444 pasang	888 pasang		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.01 011 1 0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.01 011 2 0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terpenuhinya gedung kantor dan kelas									
1.01 011 6 0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya penyusunan laporan kinerja keuangan									
1.01 011 16 1	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			UPTD SMP Negeri 7 Blitar
	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah ruang baru terbangun		1 unit		1 unit			1 unit		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang terbangun		1 unit		1 unit			1 unit		
	Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi		3 jenis		3 jenis			3 jenis		
1.01 011 16 18 1	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	25 unit	25 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit			
1.01 011 16 19 1	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah penyediaan mebelair sekolah	105 buah	21 buah	21 buah	21 buah	100%	21 buah	63 buah		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							1 keg	1 keg		
1.01 011 16 23 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara	59 paket selama 5 tahun	59 paket	59 paket	59 paket	100%	59 paket	59 paket selama 3 tahun		
1.01 011 16 41 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah yang direhabilitasi	15 paket	3 paket				3 paket	6 paket		
1.01 011 16 90 1	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa Didik	Frekuensi pelaksanaan ujian MID Semester	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	6 kali		
	Pengadaan Sepatu SMP	Jumlah sepatu siswa									
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.01 011 1 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran									
1.01 011 2 1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.01 011 6 1	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya Pelaporan Kinerja dan Keuangan									
1.0 011 16 1 2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		85%			85%			UPTD SMP Negeri 8 Blitar

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 011 16 13 2	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan	Prosentase penambahan jaringan daya jaringan listrik	100%	100%					100%		
1.01 011 16 14 2	Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang terbangun	6 unit	162 m2		162 m2	100%		162 m2		
1.01 011 16 15 2	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	5 jenis selama 5 tahun	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis selama 2 tahun		
1.01 011 16 18 2	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	50 jenis	9 jenis	10 jenis	9 jenis	90%	10 jenis	29 jenis		
1.01 011 16 19 2	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah penyediaan mebelair sekolah	64 pasang	4 jenis			100%		8 jenis		
1.01 011 16 20 2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan Perlengkapan Sekolah	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis		
	Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah	Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap		Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap	Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap	Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap		Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap	Perbaikan atap gudang 40 m2, perbakan talang 24 m2, pengecatan atap		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekloah	Jumlah perpustakaan yang terbangun		40 pasang	40 pasang	40 pasang		40 pasang			
	Pengadaan Sepatu Siswa SMP	Jumlah sepatu siswa		506 pasang	506 pasang	506 pasang		506 pasang	1012 pasang		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.0 011 1 1 3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya jasa administrasi perkantoran									
1.0 011 2 1 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Pengadaan peralatan dan pemeliharaan perlengkapan kantor									
1.0 011 6 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Program dan kegiatan pelaporan									
1.0 011 16 1 3	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan dasar 9 tahun	95%		80%			85%			UPTD SMP Negeri 9 Blitar
1.01 011 16 05 3	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Jumlah Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah yang terbangun	10 lokal	1 lokal	2 lokal	1 lokal	50%	2 lokal	6 lokal		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga		1 unit		1 unit			1 unit		
1.01 011 16 13 3	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapan	Prosentase penambahan daya Jaringan Instalasi Listrik Sekolah	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%		100%		
1.01 011 16 15 3	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku buku dan alat tulis siswa	23 jenis selama 5 tahun	23 jenis	23 jenis	23 jenis	100%	23 jenis	23 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 16 18 3	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 011 2 4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.01 011 6 4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase tersedianya dokumen dan pelaporan									
1.0 011 17 1 5	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			UPTD SMA Negeri 1 Blitar
1.01 011 17 18 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	15 jenis		
1.01 011 17 19 5	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah penyediaan mebeleur sekolah	8 jenis selama 5 tahun	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis	8 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 20 5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan perlengkapan sekolah	10 jenis selama 5 tahun	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 23 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah	Prosentase bangunan sekolah yang terpelihara	100%	100%	100%			100%	100%		
1.01 011 17 30 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Prosentase taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara	100%		100%			100%	0%		
1.01 011 17 38 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang terpelihara	20 jenis	19 jenis	5 jenis			5 jenis	19 jenis		
1.01 011 17 57 5	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru yang memenuhi standar kompetensi	200 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	80 orang		
1.01 011 17 68 5	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa	Frekuensi penyelenggaraan ujian	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	6 kali		
1.01 011 17 77 5	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah penyediaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	20 jenis selama 5 tahun	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	20 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 20 5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart kompetensi	10%		10%			10%			
1.01 011 20 03 5	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Frekuensi penyelenggaraan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	50 peserta	10 peserta	10 peserta	10 peserta	100%	10 peserta	30 peserta		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.01 011 1 5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Proesentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.01 011 6 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAI-AN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan									
1.01 011 17 6	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			UPTD SMA Negeri 2 Blitar

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.0 011 17 1 7	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			UPTD SMA Negeri 4 Blitar
	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah jaringan listrik			1 unit 66000 VA	1 unit 66000 VA	100%		1 unit 66000 VA		
1.01 011 17 15 7	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan		
1.01 011 17 18 7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	1 buah		1 buah	1 buah	100%	18 jenis	1 buah		
1.01 011 17 20 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan perlengkapan sekolah	1 unit LCD		1 unit LCD	1 unit LCD	100%	10 jenis	1 unit LCD		
1.01 011 17 23 7	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	jumlah sepeda motor			1 unit	1 unit	100%	2 unit	1 unit		
1.01 011 17 23 7	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah	Jumlah gedung yang dipelihara						1 unit	1 unit		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.0 011 1 1 7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.0 011 2 1 7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.0 011 17 1 8	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			SMK Negeri 1 Blitar
1.01 011 17 15 8	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan buku-buku dan alat tulis siswa	10 jenis	5 jenis	2 jenis	9 jenis	450%	2 jenis	14 jenis		
1.01 011 17 18 8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	19 jenis selama 5 tahun	12 jenis	19 jenis	12 jenis	63,16%	19 jenis	19 jenis selama 3 tahun		
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meja siswa, kursi siswa dan meja praktik		36 unit meja siswa, 216 unit kursi, 36 unit meja praktik	36 unit meja siswa, 216 unit kursi, 36 unit meja praktik	36 unit meja siswa, 216 unit kursi, 36 unit meja praktik	100%	36 unit meja siswa, 216 unit kursi, 36 unit meja praktik	36 unit meja siswa, 216 unit kursi, 36 unit meja praktik		
	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah alat rumah tangga sekolah		31 jenis	31 jenis	31 jenis	100%	31 jenis	31 jenis		
	Fasilitasi Pemetaan Sekolah Menengah SMK	1 unit antena sektoral, 4 unit wireless acces point, 1 box UTP Cable Belden, 1 pak RJ 45 Connector, 2 pcs. Pigtail MMCX ADSL, dan 1 unit printer		1 unit antena sektoral, 4 unit wireless acces point, 1 box UTP Cable Belden, 1 pak RJ 45 Connector, 2 pcs. Pigtail MMCX ADSL, dan 1 unit printer			100%		1 unit antena sektoral, 4 unit wireless acces point, 1 box UTP Cable Belden, 1 pak RJ 45 Connector, 2 pcs. Pigtail MMCX ADSL, dan 1 unit printer		
1.01 011 17 20 8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan perlengkapan sekolah	11 jenis selama 5 tahun	9 jenis	11 jenis			11 jenis	9 jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 011 17 21 8	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah penyediaan alat rumah tangga sekolah	19 jenis selama 5 tahun	10 jenis	19 jenis			19 jenis	10 jenis		
1.01 011 17 30 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang terpelihara	3 jenis selama 5 tahun		3 jenis			3 jenis	3 jenis		
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah							1 keg			
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.0 011 1 1 8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.0 011 2 1 8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.0 011 6 1 8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.0 011 17 1 9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			SMK Negeri 2 Blitar
1.01 011 17 15 9	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	77 jenis selama 5 tahun	58 jenis	77 jenis	58 jenis	75,32%	77 jenis	77 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 18 9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan alat praktik dan peraga siswa	23 jenis selama 5 tahun	16 jenis	23 jenis	16 jenis	69,56%	23 jenis	23 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 21 9	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah penyediaan alat rumah tangga sekolah	9 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis		
1.01 011 17 36 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang terpelihara	6 jenis selama 5 tahun	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00%	6 jenis	6 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 57 9	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru yang memenuhi standar kompetensi	30 orang	100 orang	6 orang	100 orang	75,32%	6 orang	18 orang		
1.01 011 17 67 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil capaian Belajar Siswa	Jumlah penyediaan buku induk, legger, raport dan nominatif siswa	4 jenis selama 5 tahun	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00%	4 jenis	4 jenis selama 3 tahun		
1.01 011 17 68 9	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa	Frekuensi penyelenggaraan Try Out tingkat III	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	75,32%	3 kali	9 kali		
1.01 011 17 72 9	Fasilitasi publikasi dan sosialisasi SMK	Frekuensi pelaksanaan publikasi dan sosialisasi SMK	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	75,32%	12 bulan	36 bulan		
1.01 011 17 3 9	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya dana untuk pembangunan 4 (empat) lokal Ruang Kelas Baru						4 lokal	4 lokal		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 011 17 5 9	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain	Tersedianya dana untuk pembangunan Lab Multi Media : Master consul, power suply,Headset, amplifier,konecting kabel saklar,TV,master DVD,LCD,Monitor,AC, Karpel,Spiker dan 40 Komputer. untuk Pembangunan Usaha Perjalanan Wisata dan Pengadaan Alat Lab. UPW: Kompter 15 Unit,AC,Software ABAGUS Gailo, Air Lines System dan 1 Unit Mobil Elf untuk Pengadaan alat Lab. Akuntansi : 10 Unit Komputer, AC dan Loker						2 paket	2 paket		
1.01 011 17 19 9	Pengadaan Meubelair sekolah	Pembelian meja kursi sekolah						1 keg	1 keg		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.0 011 1 1 9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.0 011 2 1 9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentasi Pemenuhan Sarana Prasarrana Aparaturr									
1.0 011 6 1 9	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Kegiatan									
1.0 011 18 1 9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan									
1.0 011 18 10 1 9	Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional	Keikutsertaan dalam kegiatan event daerah dan hari besar nasional						4 keg	4 keg		
1.0 01 17 1 20	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase peningkatan kualitas Pendidikan Menengah	95%		85%			85%			UPTD SMK Negeri 3 Blitar
1.01 012 17 15 0	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Jumlah penyediaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	18 jenis selama 5 tahun	18 jenis	18 jenis	18 jenis	100%	18 jenis	18 jenis selama 3 tahun		
1.01 012 17 18 0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7 jenis selama 5 tahun	18 jenis	7 jenis	18 jenis	257%	7 jenis	7 jenis selama 3 tahun		
1.01 012 17 20 0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah penyediaan Perlengkapan Sekolah	10 jenis selama 5 tahun	13 jenis	10 jenis	13 jenis	130%	10 jenis	10 jenis selama 3 tahun		
1.01 012 17 21 0	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Jumlah penyediaan alat rumah tangga sekolah	3 jenis selama 5 tahun	3 jenis	5 jenis	5 jenis	167%	3 jenis	5 jenis selama 1 tahun		
1.01 012 17 23 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara	2 lokal selama 5 tahun	2 lokal	2 lokal	2 lokal	100%	2 lokal	2 lokal selama 3 tahun		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.01 012 17 34 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah penyediaan peralatan listrik dan jaringannya	4 jenis selama 5 tahun	3 jenis	4 jenis	3 jenis	133%	4 jenis	4 jenis selama 3 tahun		
1.01 012 17 36 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa yang terpelihara	10 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis 30 unit	50%	2 jenis	6 jenis		
1.01 012 17 72 0	Fasilitasi publikasi dan sosialisasi SMK	Frekuensi publikasi dan sosialisasi SMK	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS										
	Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)							1 keg	1 keg		
1.0 01 1 1 20	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.0 01 2 1 20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.0 01 6 1 20	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN KESEHATAN										
1.02 01 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	90%		90%			90%			Dinas Kesehatan Daerah
1.02 01 15 01	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan		90%	90%	100%	90%	100%		
1.02 01 15 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Frekuensi pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 01 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan usia harapan hidup	5%		5%			5%			
1.02 01 16 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Prosentase Peningkatan Cakupan Rawat Jalan	15%	98%	15%			15%			
1.02 01 16 16	Peningkatan kesehatan anak dan remaja	Prosentase cakupan anak dan remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	80%	100%	80%			80%			
1.02 01 16 17	Pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat dampak rokok	1. Prosentase cakupan cakupan rawat jalan	15%	82%	15%			15%			
		2. Prosentase penyediaan bahan-bahan kimia dan alat-alat medis	100%	100%	100%			100%			
		3. Prosentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%	82%	80%			80%			
1.02 01 16 18	Peningkatan kesehatan khusus (Indra, Jiwa, Olah Raga, Batra, dan Kesehatan Kerja)	Prosentase Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	75%	7 keg%	75%	7 keg		75%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 01 16 19	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	Prosentase peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah	85%		11 keg	11 keg		85%			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan	Tersedianya jaminan pembiayaan untuk pelayanan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan di Puskesmas		100%							
	Pengembangan Poskendes	Terlaksananya pembangunan fasilitas Ponkendes									
1.02 01 16 6	Pembinaan Senam Lansia Revitalisasi sistem kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal						3 puskesmas%			
1.02 01 16 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1. Prosentase penanganan KLB di kelurahan							3 puskesmas		
1.02 01 16 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Prosentase peningkatan kesehatan masyarakat									
1.02 01 16 1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Pemberian pembiayaan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin									
1.02 01 17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Prosentase obat dan makanan yang terjamin dan memenuhi syarat kesehatan	85%		70%			70%			
1.02 01 17 02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	Prosentase peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	90%	98%	90%	5 kegiatan		90%			
1.02 01 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%		50%			50%			
1.02 01 19 01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Prosentase perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan :		99%		5 keg					
		a. Tatanan rumah tangga	10%		10%			10%			
		b. Institusi pendidikan klasifikasi IV	40%		40%			40%			
		c. Institusi pendidikan klasifikasi IV	40%		40%			40%			
		d. Institusi Pesantren	40%		40%			40%			
		e. Tempat umum klasifikasi IV	40%		40%			40%			
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah promosi kegiatan pada even daerah			1 kegiatan	1 kegiatan					

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 01 19 04	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	Prosentase peningkatan strata UKBM melalui peningkatan pendidikan penyuluh kesehatan baik kader maupun nakes	40%		40%	40%		40%			
	Penyuluhan Masyarakat tentang Narkoba			99%	1 kegiatan			1 kegiatan			
1.02 01 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia	80%		60%			70%			
1.02 01 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah anak Balita/ Anak usia dini di TK/ RA dan PAUD yang mendapatkan perbaikan status gizi	6000 anak selama 5 tahun	6000 anak	6000 anak	6000 anak		6000 anak			
1.02 01 20 03	Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kuarng yodium (GAKY), kuarng vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya.	Prosentase perbaikan status gizi pada masyarakat dan status kesehatan usila	75%		75%	5 kegiatan		75%			
				100%							
1.02 01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase lingkungan yang bersanitasi standart	85%		65%			65%			
1.02 01 21 05	Penyehatan Lingkungan	Prosentase peningkatan kesehatan masyarakat	Penyehatan Lingkungan	100%	Penyehatan Lingkungan	9 kegiatan		9 kegiatan			
1.02 01 21 06	Pengembangan laboratorium kesehatan	Jumlah penyediaan papan baner Laboratorium Kesehatan Daerah	Pengembangan laboratorium kesehatan		Pengadaan Reagen dan Pemeriksanaa n Sample Makanan dan Minuman	Pengadaan Reagen dan Pemeriksanaa n Sample Makanan dan Minuman		Pengadaan Reagen dan Pemeriksanaa n Sample Makanan dan Minuman			
				99%							
1.02 01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular	90%		80%			80%			
1.02 01 22 05	Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular	Prosentase pencapaian CDR Program TB	Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular		Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular			0%			
				99,83%							
1.02 01 22 09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penenggulangan Wabah	1. Prosentase penanganan KLB di Kelurahan < 24 jam	100%	100%	100%			100%			
		2. Jumlah penderita AFP	≤1	≤1	≤1			≤1			
		3. Prosentase pencapaian UCI per antigen	100%	95%	100%	95,24%		100%			
1.02 01 22 12	Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)	Prosentase pendistribusian insektisida	Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)		Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)			0%			
	Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk							1 keg	1 keg		
	Peningkatan Imunisasi							1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 01 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan mutu da standart pelayanan kesehatan	85%		70%			75%			
1.02 01 23 02	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Prosentase pelaksanaan monitoring program CC	20 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	12 kali		
1.02 01 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	75%		55%			55%			
1.02 01 25 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Prosentase penambahan sarana dan prasarana puskesmas	30%		30%			30%			
1.02 01 25 08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah pengembangan Pustu dengan Pelayanan kegawatdaruratan dan observasi	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit		
1.02 01 25 14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1. Persentase puskesmas rawat inap yang ada menjadi puskesmas rawat inap standar 2. Minimal 1 (satu) puskesmas yang menyelenggarakan PONED memenuhi standar mutu 3. Terwujudnya tingkat kepuasan pasien di puskesmas dan jaringannya 4. Persentase puskesmas pembantu menjadi puskesmas layani gawat darurat dan observasi									
1.02 01 28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan pasien kurang mampu	90%		70%			75%			
1.02 01 28 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	1. Prosentase terselenggaranya cakupan jaminan pemeliharaan prabayar masyarakat	85%		85%			85%			
		2. Prosentase peningkatan pelayanan perizinan sarkes nakes sesuai standart aturan permenkes dan kepmenkes	75%		75%			75%			
		3. Prosentase monitoring pelayanan pada sarana dan tenaga kesehatan berizin	80%		80%			80%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 01 28 05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	Prosentase Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis	100%	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis			0%			
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional							1 keg	1 keg		
1.02 01 33	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan	90%		75%			75%			
1.02 01 33 01	Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan	35 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	21 dok		
1.02 010 15 1	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%					100%			UPTD Kec. Kepanjenkidul
1.02 010 15 01 1	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	10 alat, 70 Jenis	2 alat, 14 Jenis	2 alat, 14 Jenis	2 alat, 14 Jenis	100%	2 alat, 14 Jenis	6 alat, 14 Jenis		
1.02 010 16 1	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan usia harapan hidup	5%		5%			5%			
1.02 010 16 02 1	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Frekuensi Peningkatan pelayanan pengobatan	2 keg, 435 kali	2 keg, 87 kali	2 keg, 87 kali	2 keg, 87 kali	100%	2 keg, 87 kali	2 keg, 261 kali		
1.02 010 16 16 1	Peningkatan kesehatan anak dan remaja	Jumlah kegiatan cakupan anak dan remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	3 keg selama 5 tahun	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg selama 3 tahun		
1.02 010 16 18 1	Peningkatan kesehatan khusus (Indra, Jiwa, Olah Raga, Batra, dan Kesehatan Kerja)	Jumlah pelaksanaan kesehatan khusus	5 Keg selama 5 tahun	4 Keg	5 Keg	4 Keg	100%	5 Keg	5 Keg selama 3 tahun		
1.02 010 16 19 1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	Jumlah peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	7 Keg selama 5 tahun	7 Keg	7 Keg	7 Keg	100%	7 Keg	7 Keg selama 3 tahun		
1.02 010 19 1	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%		50%			50%			
1.02 010 19 01 1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Frekuensi pelaksanaan pendataan PHBS	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 19 04 1	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	Frekuensi pelaksanaan Pembinaan dan pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 20 1	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia	80%		70%			70%			
1.02 010 20 02 1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Frekuensi pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk ibu hamil dan balita	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 010 20 03 1	Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya.	Frekuensi pelaksanaan survey kadarzi dan monitoring evaluasi pemantauan pemberian makanan tambahan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 21 1	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase lingkungan yang bersanitasi standart	85%		65%			65%			
1.02 010 21 07 1	Pengembangan Penyehatan Lingkungan	Frekuensi penyediaan sarana sanitasi standart serta penyediaan air bersih	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 22 1	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular	90%		80%			80%			
1.02 010 22 09 1	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Frekuensi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 22 12 1	Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)	Frekuensi pemberantasan penyakit menular langsung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 23 1	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan	85%		75%			75%			
1.02 010 23 02 1	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kontrak Pelayanan (citizen's charter)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
1.02 010 25 1	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	75%		5%			55%			
1.02 010 25 07 1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana puskesmas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 25 14 1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional							1 keg	1 keg		
1.02 010 33 1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan	#REF!		75%			75%			
1.02 010 33 01 1	Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK	Frekuensi pelaksanaan evaluasi bidang kesehatan dan terpeliharanya aplikasi SIK	15 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.02 010 16 2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan usia harapan hidup	5%		5%			5%			UPTD Kec. Sukorejo

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 010 16 02 2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Frekuensi Peningkatan pelayanan pengobatan	2 keg, 435 kali	2 keg, 87 kali	2 keg, 87 kali	2 keg, 87 kali	100%	2 keg, 87 kali	2 keg, 261 kali		
1.02 010 16 16 2	Peningkatan kesehatan anak dan remaja	Jumlah kegiatan cakupan anak dan remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	3 keg selama 5 tahun	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg selama 3 tahun		
1.02 010 16 18 2	Peningkatan kesehatan khusus (Indra, Jiwa, Olah Raga, Batra, dan Kesehatan Kerja)	Jumlah pelaksanaan kesehatan khusus	5 Keg selama 5 tahun	5 Keg	5 Keg	5 Keg	100%	5 Keg	5 Keg selama 3 tahun		
1.02 010 16 19 2	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	Jumlah peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	7 Keg selama 5 tahun	7 Keg	7 Keg	7 Keg	100%	7 Keg	7 Keg selama 3 tahun		
1.02 010 19 2 2	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%		50%			50%			
1.02 010 19 01 2	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Prosentase pelaksanaan pendataan PHBS	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02 010 19 04 2	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.02 010 20 2 2	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia	80%		70%			70%			
1.02 010 20 02 2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Frekuensi cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk ibu hamil dan balita	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 20 03 2	Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya.	Frekuensi pelaksanaan survey kadarzi dan monitoring evaluasi pemantauan pemberian makanan tambahan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 21 2 2	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase lingkungan yang bersanitasi standart	85%		65%			65%			
1.02 010 21 07 2	Pengembangan Penyehatan Lingkungan	Frekuensi penyediaan sarana sanitasi standart serta penyediaan air bersih	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 22 2 2	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular	90%		70%			80%			
1.02 010 22 09 2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Frekuensi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 22 12 2	Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)	Frekuensi pemberantasan penyakit menular langsung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
	Peningkatan Imunisasi							12 bulan	12 bulan		
1.02 010 23 2 2	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan	85%		80%			75%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 010 23 02 2	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kontrak Pelayanan (citizen's charter)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
1.02 010 25 2	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	75%		75%			55%			
1.02 010 25 07 2	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana puskesmas	80%	97%	80%	80%	100%	80%	80%		
1.02 010 25 14 2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	10 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
1.02 010 33 2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan	90%		75%			75%			
1.02 010 33 01 2	Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK	Prosentase pelaksanaan evaluasi bidang kesehatan dan terpeliharanya aplikasi SIK	15 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.02 010 28 2	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN	TERLAKSANYA PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN									
1.02 010 28 01 2	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Klaim jasa pelayanan kesehatan									
1.02 010 1 3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran									
1.02 010 2 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.02 010 6 3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.02 010 15 3	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan									UPTD Kec. Sananwetan
1.02 010 15 01 3	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah penyediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	10 alat, 70 Jenis	2 alat, 14 Jenis	2 alat, 14 Jenis	2 alat, 14 Jenis	100%	2 alat, 14 Jenis	6 alat, 42 Jenis		
1.02 010 16 3	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan usia harapan hidup	5%		5%			5%			
1.02 010 16 02 3	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Frekuensi Peningkatan pelayanan pengobatan	2 keg, 435 kali	98%	2 keg, 87 kali	2 keg, 87 kali	100%	2 keg, 87 kali	2 keg, 261 kali		
1.02 010 16 16 3	Peningkatan kesehatan anak dan remaja	Jumlah kegiatan cakupan anak dan remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	3 keg selama 5 tahun	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg selama 3 tahun		
1.02 010 16 19 3	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	Jumlah peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah	7 Keg selama 5 tahun	7 Keg	7 Keg	7 Keg	100%	7 Keg	7 Keg selama 3 tahun		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 010 16 20 3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan	Pembeayaan Jamkesmas, jamkesda, jampersal dan rawat inap/jalan									
1.02 010 19 3	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%		50%			50%			
1.02 010 19 01 3	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Prosentase pelaksanaan pendataan PHBS	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.02 010 19 04 3	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.02 010 20 3	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia	80%		70%			70%			
1.02 010 20 02 3	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Frekuensi cakupan pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk ibu hamil dan balita	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 20 03 3	Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya.	Frekuensi pelaksanaan survey kadarzi dan monitoring evaluasi pemantauan pemberian makanan tambahan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.02 010 21 3	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase lingkungan yang bersanitasi standart	75%		65%			65%			
1.02 010 21 07 3	Pengembangan Penyehatan Lingkungan	Frekuensi penyediaan sarana sanitasi standart serta penyediaan air bersih	60 bulan		12 bulan		100%	12 bulan	12 bulan		
1.02 010 22 3	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular	90%		80%			80%			
1.02 010 22 09 3	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Frekuensi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan		
1.02 010 22 12 3	Pemberantasan penyakit DBD (Demam Berdarah Denque)	Frekuensi pemberantasan penyakit menular langsung	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan		
1.02 010 23 3	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan	85%		75%			75%			
1.02 010 23 02 3	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kontrak Pelayanan (citizen's charter)	5 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali		
1.02 010 25 3	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	75%		55%			55%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.02 010 25 07 3	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana puskesmas	80%	0,8	80%	80%	100%	80%	80%		
1.02 010 25 14 3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	10 keg		2 keg	2 keg	100%	2 keg	4 keg		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional							1 keg	1 keg		
1.02 010 1 3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.02 010 2 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.02 010 6 3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.02 02 23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan	85%		75%			75%			RSD MARDI WALUYO
1.02 02 23 02	Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan	Prosentase pelaksanaan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan	100%		20%		100%	20%			
1.02 02 23 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan penunjang pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	30 jenis		6 jenis		100%	6 jenis	6 jenis		
1.02 02 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	95%		80%			80%			
1.02 02 26 01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang terbangun	5 unit		1 unit			1 unit			
1.02 02 26 18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pemenuhan alat-alat kesehatan rumah sakit	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis		
1.02 02 26 19	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Prosentase penyediaan bahan obat-obatan rumah sakit	83%	0,8	80%	80%	100%	80%	80%		
1.02 02 26 22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	110 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	22 jenis	44 jenis		
1.02 02 26 23	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Prosentase pemenuhan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	90%	0,15	15%	15%	100%	20%	35%		
1.02 02 26 24	Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit	Prosentase pemenuhan bahan cetakan dan surat menyurat	90%	0,15	15%	15%	100%	15%	30%		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.08 02 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	35%		30%			30%			KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pemantauan Kualitas lingkungan	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang terpantau kualitas lingkungannya	130 tempat		30 tempat			30 tempat	30 tempat		
		Jumlah titik pemantauan udara ambien	100 titik		25 titik			25 titik	25 titik		
		Jumlah parameter yang terakreditasi	2 buah		1 buah			1 buah	1 buah		
	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah industri baru yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	11 industri		2 industri			2 industri	2 industri		
1.08 02 16 17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup	87 unit	5 unit	17unit	4 unit	80%	17 unit	19 unit		
1.08 02 16 18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup	44 paket	5 paket	6 paket	5 paket	100%	6 paket	11 paket		
1.08 02 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		55%			55%			
1.08 02 17 01	Konservasi Sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air	Jumlah sumber - sumber air yang terpelihara	28 sumber air	4 sumber air	6 sumber air	4 sumber air	100%	6 sumber air	14 sumber air		
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Pendataan Pemakaian Sumur Bor Dalam		1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	2 keg		
1.08 02 17 05	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah kegiatan fisik dan sosialisasi dampak dan upaya ketahanan perubahan iklim	30 keg		6 keg			6 keg	6 keg		
	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air				1 lokasi			1 lokasi	1 lokasi		
1.08 02 20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Prosentase peningkatan kesesuaian baku mutu lingkungan	90%		75%			75%			
1.08 02 20 03	pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah badan air yang dipantau	30 badan air	3 badan air	6 badan air	4 badan air	75%	6 badan air	14 badan air		
1.08 02 20 04	pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah IPAL terbangun	6 unit		1 unit			1 unit	1 unit		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.08 02 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase sarana informasi yang bisa diakses	100%		100%			100%			
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan	28 sekolah	6 sekolah	8 kali	6 sekolah	200%	6 sekolah	8 sekolah		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
		Jumlah peringatan hari - hari lingkungan	14 kali	3 laporan	3 laporan	3 kali	100%	3 kali	3 kali		
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang tersusun	20 laporan	5 laporan	10 laporan	10 laporan	200%	5 laporan	10 laporan		
		Jumlah pengunjung website KLH	500 orang		300 orang			300 orang			
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)										
	Pemeliharaan RTH					1 keg					
1.08 02 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.08 02 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.08 02 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.08 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Prosentase peningkatan kualitas pengolahan sampah	95%					90%			DKP
1.08 01 15 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah perda tentang pengolahan sampah	1 paket								
		Jumlah peraturan pengelolaan sampah B3	1 paket								
1.08 01 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah tempat sampah keluarga yang terpilah	105 unit	38 unit				38 unit			
		Jumlah tempat sampah keluarga khusus B3	95 unit	32 unit				32 unit			
		Jumlah tempat sampah bersekat untuk fasilitas umum	200 unit	70 unit				70 unit			
		Jumlah kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 unit		
		Jumlah redesain TPS yang mendukung 3R	3 unit	1 unit					1 unit		
		Jumlah TPS khusus B3	3 unit	1 unit					1 unit		
		Jumlah komposter komunal dan individu	10 unit	3 unit	66 unit	66 unit	100%		69 unit		
		Jumlah amroll dan dump truck	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	3 unit	4 unit		
		Jumlah Pompa Air			2 unit	2 unit	100%		2 unit		
		Jumlah Landasan Kontainer			3 unit	3 unit	100%		3 unit		
1.08 01 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Frekuensi pemeliharaan tempat sampah di fasilitas umum dan jalan	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		
		Frekuensi pemeliharaan kontainer, gerobak dorong dan gerobak motor	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		
		Frekuensi pemeliharaan transfer depo dan landasan kontainer	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
		Frekuensi pemeliharaan bak dump truck dan bulldozer	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		
1.08 01 15 05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah penyediaan mesin pendukung pengolahan sampah (mesin pencacah, pengayak dan conveyer)		99%	3 unit						
		Jumlah penyediaan tempat pemrosesan sampah		99%	1 paket						
		Pengadaan tanah, ganti sewa tanah dan ganti tanaman		99%	1 paket						
		pengadaan bulldozer, exavator, well loader/track loader		99%				2 jenis			
		Pengadaan Pos Jaga dan pagar untuk TPA		99%	1 paket	1 paket	100%				
		pengukuran tanah TPA			1 paket						
1.08 01 15 06	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah bimtek persampahan			2 kali						
1.08 01 15 08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah kerjasama pengelolaan persampahan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket		
1.08 01 15 10	Sosialisais kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan		3 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	9 kali		
	Kerjasama pengelolaan Sampah antar Daerah	Pengurukan Sampah dan Penyewaan Eskavator/wheel loader			2 keg	2 keg	100%		2 keg		
1.08 01 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah terbentuknya kelompok warga (kader) peduli lingkungan di tingkat RT,RW dan kelurahan									
		Jumlah pelaksanaan kegiatan Anugerah Patria Asri									
		Jumlah lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah									
1.08 01 15 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah penyediaan data tentang persampahan									
1.08 01 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	35%		30%			30%			
1.08 01 16 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Prosentase pencapaian kota blitar yang bersih, asri dan sejuk	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%		
1.08 01 16 10	Koordinasi Pengelolaan Prokash/Superkash	Prosentase sungai bersih di Kota Blitar	75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%		
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Dokumen Pengelolaan lingkungan untuk pembangunan TPA			1 keg	1 keg			1 keg		
1.08 01 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Prosentase peningkatan pengelolaan RTH	85%		80%			80%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.08 01 24 02	Sosialisasi kebijakan, norma, standart, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Frekuensi sosialisasi kebijakan dan landasan hukum pengelolaan RTH	12 kali		3 kali			3 kali			
	Penataan RTH	Pemeliharaan Taman dan Rehab Taman Plosokerep		2 keg		2 keg	100%		2 keg		
1.08 01 24 06	Pemeliharaan RTH	Jumlah Revitalisasi taman kota	57 taman	12 taman	10 taman	12 taman	100%	10 taman	34 taman		
		Jumlah pengadaan lampu taman	24 titik	6 titik	6 titik	6 titik	100%	6 titik	18 titik		
		Frekuensi pemeliharaan lampu taman	16 titik	4 titik	4 titik	4 titik	100%	4 titik	12 titik		
1.08 01 24 07	Pengembangan taman rekreasi	Prosentase Pemeliharaan Taman Kebon Rojo	100%	95%	95%	95%	100%	95%	95%		
1.08 01 24 11	Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Taman Kota	100 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	60 jenis		
1.08 01 24 12	Pemeliharaan keindahan taman dan sarana Olahraga	Prosentase pemeliharaan lapangan olahraga dan tribun penonton	100%		100%			100%			
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitas Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional							1 keg	1 keg		
1.08 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.08 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.08 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN PEKERJAAN UMUM										
1.03 01 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Jumlah plat duiker penutup saluran drainase terbangun	Duiker = 10 bh	Duiker = 2 bh	Duiker = 2 bh	Duiker = 2 bh		Duiker = 2 bh			DPU
1.03 01 16 03	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah saluran drainase/gorong-gorong terbangun	Duiker = 10 bh	Duiker = 2 bh	Duiker = 2 bh	Duiker = 2 bh	100%	Duiker = 2 bh	Duiker = 6 bh		
1.03 01 17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Panjang Turap/talud terbangun	Talud = 130 m	Talud = 26 m	Talud = 26 m	Talud = 26 m		Talud = 26 m			
1.03 01 17 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang Turap/talud terbangun	Talud = 130 m	Talud = 26 m	Talud = 26 m	Talud = 26 m	100%	Talud = 26 m	Talud = 78 m		
1.03 01 18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase Panjang jalan, jembatan, dan trotoar ter rehabilitasi	100%		20%			20%			
1.03 01 18 06	Pemeliharaan Jalan (DAK)	Panjang Jalan, Rehabilitasi Plat Duiker, Jembatan dan Trotoar yang dipelihara	Jalan : 22.519 m, trotoar : 1510 m, jemb : 20 bh	Jalan : 4527 m, trotoar : 377 m, Jemb : 3 bh	Jalan : 4527 m, trotoar : 377 m, Jemb : 3 bh	Jalan : 4527 m, trotoar : 377 m, Jemb : 3 bh	100%	Jalan : 4527 m, trotoar : 377 m, jemb : 3 bh	Jalan : 13581 m, trotoar : 1131 m, jemb : 9 bh		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.03 01 18 07	Pemeliharaan Jalan dan Trotoar	Panjang Jalan dan Trotoar yang dipelihara	Jalan : 5000 m2, Trotoar : 5000 m1	Jalan : 4527 m, trotoar : 377 m, Jemb : 3 bh	Jalan : 1250 m2, Trotoar : 1250 m1	Jalan : 1250 m2, Trotoar : 1250 m1	100%	Jalan : 1250 m2, Trotoar : 1250 m1	Jalan : 3750 m2, Trotoar : 3750 m1		
	Peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan Jalan		9 lokasi		9 lokasi	100%		9 lokasi		
	Peningkatan jalan dan jembatan Bantuan Propinsi)	Peningkatan Jalan			2 lokasi	2 lokasi	100%		2 lokasi		
	Peningkatan jalan dan jembatan (Banprop 2011)	Pembangunan Saluran Drainase dan Duiker di Jl. Masjid Utara			1 keg	1 keg	100%		1 keg		
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN										
	Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan				1 keg			1 keg	1 keg		
1.03 01 30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	Prosentase pendampingan program PNPM P2KP	100%		100%			100%			
1.03 01 30 09	Fasilitas pelaksanaan program PNPM/P2KP(Pendamping P2KP)	Prosentase Pendampingan PNPM P2KP	100%		100%			100%			
1.03 01 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA KEBINAMARGAAN	Jumlah sarana prasarana kebinamargaan yang terpelihara	16 unit		4 unit	4 unit		4 unit			
1.03 01 23 10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang terpelihara	16 unit		4 unit	4 unit	100%	4 unit	8 unit		
1.03 01 24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	Prosentase pengembangan jaringan irigasi dan air bersih	100%		15%			15%			
1.03 01 24 06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum(DAK Air Minum)	Jumlah jaringan penyediaan air bersih Sambungan Rumah (SR) yang terbangun	SPAM = 12 unit Pipa = 1800 SR	SPAM = 6 unit	Pipa = 600 SR	Pipa = 600 SR	100%	Pipa = 600 SR	SPAM = 6 unit Pipa = 600 SR		
1.03 01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang terpelihara	Saluran dan talud = 1900 m	Saluran dan talud = 380 m	Saluran dan talud = 380 m	Saluran dan talud = 380 m	100%	Saluran dan talud = 380 m	Saluran dan talud = 1140 m		
1.03 01 24 18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Irigasi)	Panjang Jaringan Irigasi yang terpelihara	Saluran dan Talud = 10.500 m	Saluran dan Talud = 2.100 m	Saluran dan Talud = 2.100 m	Saluran dan Talud = 2.100 m	100%	Saluran dan Talud = 2.100 m	Saluran dan Talud = 4.200 m		
1.03 01 24 21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian (DPID)	Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian yang terpelihara	Saluran dan talud = 80 paket								
	Rehabilitasi drainase dan Trotoar Perkotaan (Banprop)	Rehabilitasi drainase dan Trotoar Perkotaan (Banprop)		17 lokasi		17 lokasi	100%		17 lokasi		
1.03 01 24 22	Pembangunan Saluran Air untuk Pengembangan Ekonomi Produktif (BKIEP)	Jumlah Saluran Air dan Duiker yang terbangun	Sal : 86 m Duik : 1 bh								
1.03 01 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun	10 unit		2 unit			2 unit			
1.03 01 27 11	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Sanitasi)	Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun	10 unit		2 unit	3 unit	150%	2 unit	5 unit		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.05 01 15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Prosentase penyusunan dan sosialisasi Perencanaan Tata Ruang	75%		70%			70%			DPU
1.05 01 15 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi peraturan penataan ruang	1 kali								
1.05 01 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	4 dok	10 dok	1 dok	10 dok	100%	1 dok	10 dok		
	Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL				1 keg			1 keg	1 keg		
1.05 01 15 5	Survey dan pemetaan	Tersusunnya buku Kajian RDTRK, RTRK & RTBL						3 keg	3 keg		
1.05 01 15 7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL yang tersusun						10 doc	10 doc		
1.05 01 17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang	70%		60%			60%			
1.05 01 17 02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah leaflet panduan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang	5000 lembar								
1.05 01 17 04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase pelaksanaan bimtek tentang pengendalian ruang	100%		100%			100%			
1.05 01 17 08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Prosentase pelaksanaan pengawasan izin untuk bangunan baru dan perubahan bangunan	100%		20%			20%			
1.05 01 17 8	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi bangunan yang ber-IMB									
1.05 01 17 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik	Jumlah pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan standar									
1.05 01 16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah gakin penerima program IMB gratis	504 Gakin		105 Gakin			105 Gakin			
		Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	7 dok		7 dok			7 dok			
		Prosentase pemahaman masyarakat tentang IMB	100%		10%			10%			
1.05 01 16 01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	jumlah sasaran program Pilot Project IMB Gakin Kota Blitar	504 berkas		105 berkas			105 berkas			
1.05 01 16 03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen kajian mengenai pemanfaatan lahan kosong, penataan tempat makam, dan penataan papan reklame yang tersusun	3 kajian		1 kajian			1 kajian			
1.05 01 16 05	Survey dan pemetaan	Prosentase pelaksanaan survey dan pemetaan bangunan	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
1.05 01 16 06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Prosentase pelaksanaan bimtek tentang perencanaan dan pemanfaatan ruang	100%								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas kab / kota	Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau		10 dok		10 dok	100%		10 dok		
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1.13 01 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		30%			30%			BAPPEDA
1.13 01 15 13	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah fasilitasi TKPK	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.13 01 15 1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan	jumlah pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan									
1.13 01 15 5	Penyusunan profile daerah	jumlah buku dan CD profile wilayah daerah									
1.13 01 15 6	Pengelolaan Data Elektronik	digitalisasi data kota blitar									
1.13 01 15 9	Penerbitan Cakrawala (Media Informasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif)	jumlah edisi penerbitan majalah informasi perencanaan pebangunan partisipatif									
1.13 01 15 2	Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah	jumlah buku DDA Semester 1 dan Semester 2									
1.13 01 15 4	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	jumlah buku PDRB									
1.13 01 15 7	Updating Data Rumah Tangga Miskin Kota Blitar	Frekuensi Pelaksanaan updating data kemiskinan									
1.06 01 16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Prosentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama pembangunan antar daerah	75%		70%			70%			
1.06 01 16 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.16 01 16	PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Prosentase peningkatan investasi dan Penanaman Modal	75%		70%			70%			
1.16 01 16 01	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	Jumlah Dokumen RPIJM yang tersusun dan terupdate	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok		
1.16 01 16 03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal		4 keg		1 keg			1 keg			
1.06 01 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Prosentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kota	85%		80%			80%			
1.06 01 19 09	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	1 keg	3 keg		3 keg	100%		5 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.06 01 19 13	Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Agrowisata Blimbing dan Urban sanitation Project to Support PNPM Mandiri	Jumlah fasilitasi perencanaan pengembangan Kota	1 keg		1 keg			1 keg			
1.06 01 19 14	Pengembangan Blitar Kota Sehat	Jumlah fasilitasi pengembangan blitar kota sehat	1 keg	78%	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg		
1.06 01 19 16	Rintisan Blitar Kota Layak Anak	Jumlah fasilitasi blitar kota layak anak	1 keg		1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg		
	Penyusunan dan Updating RPIUM							5 dok	5 dok		
	Fasilitasi Penyusunan MDG's							10dok	10dok		
	Penyusunan Renti Penataan Aloon - Aloon							10 dok	10 dok		
	Pentusunan Renti Revitalisasi Gedung Dipayana							10 dok	10 dok		
1.06 01 19 20	Koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Fasilitasi Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar									
1.06 01 20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	85%		70%			70%			
1.06 01 20 01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah kegiatan sudy komparasi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 keg		1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.06 01 20 02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	3 keg	3 kec	1 keg	3 kec	100%	1 keg	3 keg		
	Studi Banding Potensi Daerah	Studi Banding Potensi Daerah		1 keg		1 keg	100%		1 keg		
1.06 01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	90%		90%			90%			
1.06 01 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD dan Penetapan RKPD	Jumlah kegiatan penyusunan rancangan RKPD	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.06 01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah fasilitasi musrenbang RKPD	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.06 01 21 13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan PPMK, RKPD dan sanitasi	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.06 01 21 15	Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kota Blitar	Jumlah kegiatan sinkronisasi program (KUA, PPAS)	5 keg	20 buku	20 buku	20 buku	100%	1 keg	40 buku		
1.06 01 21 17	Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen program pembangunan	6 dok	5 dok	3 jenis, 190 buku	3 jenis, 190 buku	100%	1 dok	196 dok		
1.06 01 21 21	Fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan	5 keg	4 triwulan	4 triwulan	4 triwulan	100%	1 keg	8 triwulan		
1.06 01 21 23	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Bantuan Keuangan Propinsi)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program BK propinsi	4 keg		1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.06 01 21 26	Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	5 keg		1 keg			1 keg			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.0f 01 21 27	Koordinasi dan Sinkronisasi DAK	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program DAK	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.0f 01 21 32	Kajian Sinkronisasi Program / kegiatan SKPD dengan RPJMD Tahun 2011-2015	Jumlah dokumen kajian tentang perencanaan pembangunan daerah	1 keg		1 keg						
1.0f 01 21 34	Evaluasi Rencana Induk/Masterplan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Induk/Masterplan pembangunan Daerah	1 keg		10 buku	10 buku	100%	10buku	20buku		
	Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD							2 keg	2 keg		
1.0f 01 21 32	Kajian Sinkronisasi Program / kegiatan SKPD dengan RPJMD Tahun 2011-2015	Jumlah dokumen kajian tentang perencanaan pembangunan daerah	1 keg								
1.0f 01 21 34	Evaluasi Rencana Induk/Masterplan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Induk/Masterplan pembangunan Daerah	1 keg								
	Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD										
1.0f 01 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Prosentase peningkatan pembangunan ekonomi	70%		60%			65%			
1.0f 01 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah pelaksanaan koordinasi	4 keg		1 keg			1 keg			
1.0f 01 22 09	Penyusunan Indikator Makro ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah kegiatan penyusunan indikator ekonomi dan IPM daerah	1 keg	60 buku	60 buku	60 buku	100%	60 buku	180 buku		
1.0f 01 22 21	Rencana Induk pengembangan sektor informal	Jumlah dokumen rencana induk yang tersusun									
1.0f 01 22 22	Kajian persiapan pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah dokumen kajian yang tersusun	1 keg								
1.0f 01 22 23	Kajian optimalisasi peningkatan PAD melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah dokumen kajian yang tersusun	1 keg								
1.0f 01 22 24	Kerjasama penanggulangan kemiskinan	Jumlah pelaksanaan kerjasama						1 keg			
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah			1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg		
	Kajian komoditas Potensi Daerah				10 dok			10 dok	10 dok		
1.0f 01 22	Penelitian dan kajian pengembangan potensi PAD Kota Blitar	Penelitian dan kajian pengembangan potensi PAD Kota Blitar	Terlaksananya penelitian dan kajian pengembangan potensi PAD Kota Blitar								
1.0f 01 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	prosentase kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	75%		65%			65%			
1.0f 01 23 12	Kajian model pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam peningkatan kemandirian taraf hidup	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok								
1.0f 01 23 13	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok		5 dok	5 dok	100%	1 dok	5 dok		
1.0f 01 23 14	Kajian kerjasama pengembangan pendidikan tinggi dengan Perguruan Tinggi Swasta melalui Hibah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok								
	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 keg								

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.0f 01 23 15	Penyusunan Data Gender dan Anak	Dokumen Data terpilih Gender dan Aplikasi Data Terpilih Gender		2 keg			100%		2 keg		
	Fasilitasi Penyusunan RAD Pangan dan Gizi				10 dok			10 dok	10 dok		
1.0f 01 23	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah pelaksanaan koordinasi								
1.0f 01 23	Kajian Rencana Aksi daerah (RAD) Pencegahan dan pembrantasan korupsi	Kajian Rencana Aksi daerah (RAD) Pencegahan dan pembrantasan korupsi	Jumlah dokumen RAD kajian pencegahan & pembrantasan korupsi								
1.0f 01 23	Fasilitasi Penelitian dan pengembangan Cagar Budaya	Fasilitasi Penelitian dan pengembangan Cagar Budaya	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Cagar Budaya								
1.0f 01 23	Kajian tren kenaikan angka kematian ibu melahirkan	Kajian tren kenaikan angka kematian ibu melahirkan	Terlaksananya kajian tren kenaikan angka kematian ibu melahirkan								
1.0f 01 23	Penyusunan Masterplan Pembangunan AKADEMI KOMUNITAS Kota Blitar	Penyusunan Masterplan Pembangunan AKADEMI KOMUNITAS Kota Blitar	Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan AKADEMI KOMUNITAS Putra Sang Fajar								
1.0f 01 24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan perencanaan prasarana wilayah	85%		80%			80%			
1.0f 01 24 04	Sinkronisasi Program Pembangunan Sanitasi Kota	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.0f 01 24 12	Koordinasi dan fasilitasi program pengembangan sarana prasarana daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	4 keg		1 keg			1 keg			
1.0f 01 24 13	Kajian Sanitasi berbasis masyarakat	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok								
1.0f 01 24 14	Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan sanitasi Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok					1 dok			
1.0f 01 24 15	Rencana Induk Drainase Kota	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	10 dok	1 dok	10 dok	100%	1 dok	10 dok		
1.0f 01 24 16	Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok								
1.0f 01 24 17	Penyusunan EHRA	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	3200 sampel di 21 kelurahan		3200 sampel di 21 kelurahan	100%		3200 sampel di 21 kelurahan		
	Masterplan Perumahan dan Rumah Susun di Kota Blitar			1 dok							
	Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Jumlah Buku Putih Sanitasi Tahun 2012 dan SSK 2012 - 2016			60 buku	60 buku			60 buku		
	Penyusunan Master Plan Istana Gebang	Jumlah dokumen yang tersusun		10 buku		10 buku			10 buku		
	Fasilitasi Antisipasi Perubahan Iklim	Fasilitasi Antisipasi Perubahan Iklim		9 keg	9 keg	9 keg		9 keg	18 keg		
	Studi Kelayakan TPA	Jumlah dokumen yang tersusun		10 dok		10 dok			10 dok		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Kajian Pemanfaatan Aset Daerah							10 dok	10 dok		
	Kajian Pengelolaan IPAL Komunal							10 dok	10 dok		
	Penyusunan R4D							10 dok	10 dok		
	Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen Masterplan Runag terbuka hijau								
1.0f 01 24	Penyusunan Master Plan Terminal PATRIA	Penyusunan Master Plan Terminal PATRIA	Jumlah dokumen Masterplan Terminal PATRIA Kota Blitar								
1.0f 01 24	Fasilitasi Antisipasi Perubahan Iklim	Fasilitasi Antisipasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan Fasilitasi Antisipasi Perubahan Iklim								
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.0f 01 20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%		0			0			Dinas PU
1.0f 01 20 04	Pembinaan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Jumlah bantuan teknis pengawasan pembangunan infrastruktur	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%		2 keg		
1.0f 01 21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	85%		0			0			
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan							1 keg	1 keg		
1.0f 01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	85%		0			0			
1.0f 01 21 29	Verifikasi Hasil Perencanaan Pembangunan Fisik	Prosentase perencanaan pembangunan fisik yang terverifikasi	10%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		36 bulan		
	Perencanaan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Ruang Terbuka dan Pedestrian Ways MBK	10 buku		10 buku						
1.0f 01 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Prosentase peningkatan pembangunan ekonomi	80%								
1.0f 01 22 10	Pendamping P2KP	Prosentase pendampingan program P2KP	100%	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
	URUSAN PERUMAHAN										
1.0f 01 16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Prosentase penyediaan air bersih dan sanitasi dasar permukiman	80%		20%			20%			DPU

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.2 32 33 0	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN	Prosentase pelaksanaan pelayanan perijinan daerah	100%		100%			100%			
1.2 32 33 01 0	Sosialisasi pelayanan perijinan	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi pelayanan perijinan	16 kali		4 kali	4 kali	100%	4 kali	8 kali		
1.2 32 33 02 0	Survey dan monitoring lapangan pelayanan perijinan	Frekuensi survey dan monitoring lapangan pelayanan perijinan	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan		
1.2 32 33 03 0	Pemrosesan pelayanan perijinan daerah	Frekuensi pelaksanaan pemrosesan pelayanan perijinan	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan		
1.2 32 33 04 0	Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan perijinan	Prosentase pemanfaatan teknologi di bidang pelayanan perijinan	48 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan		
1.2 32 33 05 0	Peningkatan kemampuan aparat penyedia pelayanan perijinan	Prosentase pelaksanaan study banding sebagai upaya transfer informasi	4 kali		1 kali			1 kali	1 kali		
1.2 32 1 0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.2 32 2 0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.2 32 3 0	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase jumlah aparatur yang menggunakan atribut									
1.2 32 3 2 0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase Pengadaan Pakaian Kerja untuk pelayanan									
1.2 32 6 0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.1f 01 15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Prosentase berkembangnya potensi unggulan daerah	70%		65%			65%			DISPERINDAG
1.1f 01 15 02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah pameran/ promosi produk khas Kota Blitar	29 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	17 kali		
1.1f 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.1f 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentasi Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur									
1.1f 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN KOPERASI dan UKM										
1.1f 01 15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	prosentase Peningkatan usaha kecil menengah	80%		80%			80%			DINKOP DAN UKM

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.15 01 15 06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah sasaran pelaksanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	21 kel x 5	21 kel	21 kel	21 kel	100%	21 kel	21 kel x 3		
1.15 01 15 08	Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah pelaksanaan Bimtek manajemen usaha handicraft, Pengembangan klinik UMKM, Study banding.	5 kali bimtek, 5 paket, dan 200 peserta		1 kali bimtek, 1 paket, dan 40 peserta			1 kali bimtek, 1 paket, dan 40 peserta			
1.15 01 15 12	Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah peserta Bimtek konveksi dan bordir, Study banding, Pameran gebyar pasar produk daerah, Batik, bordir dan asesoris fair	400 org, 5 x study banding		80 org, 1 x study banding			80 org, 1 x study banding			
1.15 01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	Prosentase peningkatan keunggulan kompetitif UKM	70%		70%			70%			
1.15 01 16 05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi	Pelaksanaan Pameran Jatim Fair, gebyar UMKM, koperasi, Batam Nasional Eksplo, Pasar Murah, Pembuatan katalog dan leaflet	5 x pameran, 25 x pasar murah, 5000 katalog dan 5 jenis leaflet		1 x pameran, 5 x pasar murah, 1000 katalog dan 1 jenis leaflet			1 x pameran, 5 x pasar murah, 1000 katalog dan 1 jenis leaflet	1 x pameran, 5 x pasar murah, 1000 katalog dan 1 jenis leaflet		
1.15 01 16 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	600 org		120 org			120 org			
1.15 01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Prosentase pengembangan UMKM	35%		20%			20%			
1.15 01 17 09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pelaksanaan Basar produk UMKM, Harkopnas dan Smesco	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.15 01 17 12	Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM	Pelaksanaan sosialisasi program pengelolaan permodalan bagi UKM	1500 UKM	100 UKM	300 UKM	100 UKM	33%	300 UKM	900 UKM		
1.15 01 17 13	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	pembentukan dan pengembangan LKM dan koperasi siswa	40 keg	6 keg	8 keg	6 keg	75%	8 keg	24 keg		
1.15 01 17 14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro	Pelaksanaan Penyediaan sarana prasarana usaha	260 UMKM	45 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	100%	50 UMKM	135 UMKM		
		Bimtek Perkoperasian	420 UMKM	85 UMKM	80 UMKM	80 UMKM	100%	80 UMKM	245 UMKM		
		Bimtek Kewirausahaan	420 UMKM	85 UMKM	80 UMKM	80 UMKM	100%	80 UMKM	245 UMKM		
1.15 01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	75%		75%			75%			
1.15 01 18 03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Jumlah sasaran Pemasarakatan perkoperasian	3 kec x 5	3 kec	3 kec	3 kec	100%	3 kec	3 kec x 3		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.15 01 18 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi Edukasi Perpajakan,	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
1.15 01 18 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Pelaksanaan pembentukan dan fasilitasi KPKS dan fasilitasi HUT koperasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
1.15 01 18 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Pameran Usaha Koperasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
1.15 01 18 07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	pelaksanaan pemantapan peserta uji kompetensi KSP/USP	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.15 01 18 10	Fasilitasi pemberian modal bergulir bagi Koperasi	Penyaluran dana bergulir bagi koperasi	85 kop		20 kop			20 kop			
1.15 01 18 11	Fasilitasi Kelembagaan, Usaha dan Pengelola Koperasi	Pelaksanaan sosialisasi keanggotaan Kopwan	55 kali		11 kali			11 kali			
1.15 01 18 13	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi	terlaksananya peningkatan SDM pengurus koperasi	200 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	120 orang		
1.15 01 18 14	Peningkatan Pemberdayaan Koperasi	Bimtek pengurus dan pengawas koperasi	400 org	80 org	80 org	80 org	100%	80 org	160 org		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.15 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.15 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.15 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terfasilitasinya penyusunan capaian kinerja dan pelaporan kinerja dan keuangan									
1.15 01 19	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH)	Terwujudnya pembinaan lingkungan sosial di bidang Koperasi dan UKM									
1.15 01 19 1	Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang koperasi dan UKM	Pelatihan batik & handicraft serta studi banding sentra batik di Pekalongan & handicraft di Jogja									
1.15 01 19 2	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang Koperasi dan UKM	Pemberian (Hibah) barang : mesin pengupas kulit kacang; sablon elektrik; pemotong krupuk; canting batik; perontok bulu ayam & gerobak/ rombongan aluminium									
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL										
1.15 01 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase penataan administrasi kependudukan	100%		100%			100%			DISPENDUK & CAPIL
1.15 01 15 01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Prosentase peningkatan operasionalisasi SIAK	100%	70%	80%	70%	100%	80%	83%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.1f 01 15 02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Prosentase peningkatan tenaga pengelola SIAK	80%		80%			80%			
1.1f 01 15 03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Prosentase perbaikan system layanan kependudukan	100%	0,7	80%	70%	100%	80%	75%		
1.1f 01 15 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kebijakan kependudukan	60 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 kali		
1.1f 01 15 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah data kependudukan	44.121 wajib KK	44.417 wajib KK	44.417 wajib KK	44.417 wajib KK	100,67%	44.121 wajib KK	44.121 wajib KK		
1.1f 01 15 08	Pengembangan Database Kependudukan	Prosentase ketersediaan database kependudukan	70%		70%	70%	100%	70%	70%		
1.1f 01 15 09	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Prosentase ketersediaan kebijakan kependudukan	70%		70%			70%			
1.1f 01 15 10	Peningkatan Kapasitas aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Prosentase peningkatan kemampuan aparat	70%		70%			70%			
1.1f 01 15 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sasaran pelaksanaan sosialisasi	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	100%	27 SKPD	27 SKPD		
1.1f 01 15 13	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan	Prosentase pelaksanaan moitoring	80%	80%	80%	80%	100%	80%	100%		
1.1f 01 15 14	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Prosentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	100%	80%	80%	80%	100%	80%	85.67%		
1.1f 01 15 17	Penyediaan Informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat	Prosentase perbaikan sistem layanan informasi kependudukan	70%	0,7	70%	70%	100%	80%	75%		
	Pengembangan Database Pencatatan sipil				1 keg			1 keg	1 keg		
	Sosialisasi Administrasi kependudukan				1 keg			1 keg	1 keg		
	Pemutahiran data Administrasi Kependudukan				12 bulan			12 bulan	12 bulan		
1.1f 01 15 21	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil	Prosentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan									
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.1f 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan									Dispenduk Capil
1.1f 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentasi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									Dispenduk Capil
1.1f 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan									Dispenduk Capil
	URUSAN KETENAGA KERJAAN										
1.1f 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	70%		20%			20%			DINSOS NAKER
1.1f 01 15 01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Prosentase penyediaan database tenaga kerja daerah	80 %		80 %	80 %	100%	80 %	80 %		
	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja				1 keg			1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.14 01 15 3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah sarana dan prasarana gedung balai latihan kerja									
	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah pelatihan bagi tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	60 orang		15 orang			15 orang			
1.14 01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase Peningkatan peluang kerja yang diminati oleh pencari kerja	100%		80%			80%			
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi bursa tenaga kerja	80 %		2 paket			2 paket			
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Prosentase penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	12 kali		3 kali			3 kali			
1.14 01 16 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Prosentase peningkatan mutu ketrampilan pencari kerja dari keluarga miskin	50 paket pelatihan	8 paket pelatihan	10 paket pelatihan	8 paket pelatihan	80 %	10 paket pelatihan	30 paket pelatihan		
1.14 01 16 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Prosentase peningkatan kesejahteraan pekerja perusahaan	15 paket pelatihan	3 paket pelatihan	3 paket pelatihan	3 paket pelatihan	100%	3 paket pelatihan	9 paket pelatihan		
	Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat di Lingkungan Pabrik Rokok				1 keg			1 keg	1 keg		
1.14 01 16 8	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (DAC)	Prosentase peningkatan kesejahteraan pekerja perusahaan			0			0			
1.14 01 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	prosentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	100%		80%			80%			
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	160 orang	1 orang	40 orang	1 orang	2,5 %	40 orang	41 orang		
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Prosentase Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40 persh.		10 Persh.			10 Persh.			
	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	800 persh.		200 persh.			200 persh.	200 persh.		
1.14 01 17 05	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang diawasi	1000 persh.	349 persh.	200 persh.	349persh.	175%	200 persh.	749 persh.		
	Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Jumlah lembaga Penyalur Tenaga Kerja (PJTKI, LLS, BKK) yang dipantau	300 lembaga		75 lembaga	75 lembaga	100%	75 lembaga	150 lembaga		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	Prosentase pelaksanaan Pemantauan Kinerja lembaga pelatihan kerja	80%		70%	27 lembaga	100%	70 %	85%		
1.14 01 17 10	Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan surveykali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	12 kali		
	Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja				1keg			1keg	1keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.14 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran									
1.14 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.14 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN KETAHANAN PANGAN										
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
1.11 01 15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Prosentase peningkatan kualitas perempuan dan anak	85%		75%			75%			BAPEMAS DAN KB
1.11 01 15 03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Frekuensi sosialisasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			1 kali			1 kali			
1.11 01 15 05	Fasilitasi upacara peringatan yang berkaitan dengan ibu dan anak	Frekuensi Peringatan hari Ibu	5 kali 125 orang	1 kali 125 orang	1 kali 125 orang	1 kali 125 orang		1 kali 125 orang	1 kali 125 orang		
		Frekuensi peringatan hari Kartini	5 kali 200 orang	1 kali 200 orang	1 kali 200 orang	1 kali 200 orang		1 kali 200 orang	1 kali 200 orang		
		Frekuensi peringatan Hari Anak Nasional.	15 kali 125 Orang	3 kali 125 Orang	3 kali 125 Orang	3 kali 125 Orang		3 kali 125 Orang	9 kali 125 Orang		
1.11 01 16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%		100%			100%			
1.11 01 16 06	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Frekuensi pembinaan pengarus utamaan gender	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.11 01 16 10	Pembinaan Organisasi Wanita	Frekuensi pembinaan organisasi Wanita	2 kali 60 orang	1 kali 30 orang	1 kali 30 orang	1 kali 30 orang	100%	1 kali 30 orang	2 kali 30 orang		
1.11 01 16 11	Pembinaan posyandu	Frekuensi pembinaan posyandu	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	100%	21 kali	42 kali		
1.11 01 16 12	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Frekuensi Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	21 kali	21 kali	21 kali	21 kali	100%	21 kali	42 kali		
1.11 01 16 13	Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan peranan Wanita Menuj Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Frekuensi pembinaan dan Evaluasi Peningkatan peranan Wanita Menuj Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	2 kali	5 kali	2 kali	5 kali	100%	2 kali	7 kali		
1.11 01 16 14	Pembentukan Kota Layak Anak	Prosentase pemenuhan Terbentuknya Blitar Kota Layak Anak.	100%	0,8	80%	80%	100%	80%	80%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR										
1.11 01 16 2	Rintisan Blitar Kota Layak Anak fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Rehabilitasi Korban KDRT, Trafficking, pelecehan seksual dan sosialisasi; KP2A di sekolah; Rapat Pengurus KP2A dan Publikasi Perlindungan Perempuan						1 keg	1 keg		
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR										
	Rintisan Blitar Kota Layak Anak	Terlaksananya fasilitasi & implementasi rintisan Blitar Kota Layak Anak									
1.11 01 17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase peningkatan perlindungan terhadap perempuan	85%		70%			75%			
1.11 01 17 08	Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Frekuensi terlaksananya rehabilitasi korban KDRT, trafficking dan kekerasan seksual	100%	98%	80%	80%	100%	90%	89.3%		
1.11 01 17 10	Fasilitasi dan sosialisasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)	Prosentase fasilitasi komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)	95%		75%			80%			
1.12 01 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Prosentase peningkatan jumlah peserta KB	85%		75%			75%			BAPEMAS DAN KB
1.12 01 15 01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Frekuensi pelayanan KB dan alkon bagi gakin	100%		100%			100%			
		Prosentase Pengelolaan Manajemen Alokasi sesuai SOP	100%		100%			100%			
1.12 01 15 02	Pelayanan KIE	Prosentase Pembuatan media promosi Program Kependudukan dan KB melalui billboard dan talkshow di Radio	100%	99%	70%			70%			
		Prosentase sosialisasi dan penggerakan masyarakat dalam kesertaan ber KB Pria	100%		100%			100%			
1.12 01 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Prosentase Pembinaan Keluarga Harmonis di masing-masing Kecamatan	100%	98%	100%	100%	100%	100%	99.67%		
		Prosentase Sosialisasi tentang NKKBS kepada calon PUS	100%	65%	75%	75%	100%	75%	79%		
1.12 01 15 07	Pendataan Keluarga	Frekuensi Pendataan Keluarga	100%	1 kali	85%	1 kali	100%	85%	92.5%		
		Frekuensi Pemberian Insentif Kader dalam Pendataan Keluarga	100%	91%	80%			80%	85.5%		
		Prosentase Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga	100%	91%	90%			90%	90.5%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.12 01 15 09	Revitalisasi Program KB (DAK)	Prosentase Pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana KB	100%		80%			80%	80%		
1.12 01 15 10	Peningkatan Kualitas Manajemen Program Kependudukan dan KB	Frekuensi Rakerda Program Kependudukan dan KB	100%	1 kali	90%	1 kali	100%	90%	95%		
		Frekuensi pelatihan RR bagi Petugas Klinik	100%		90%			90%	90%		
		Prosentase Sistem Pencatatan dan Pelaporan program Kependudukan dan KB	100%	0,8	90%	80%	100%	90%	85%		
		Prosentase penyusunan Data Basis Perencanaan Program Kependudukan dan KB	100%	0,8	90%	80%	100%	90%	85%		
		Frekuensi pertemuan koordinasi dengan mitra kerja program KB secara rutin	100%	1 kali	75%	1 kali	100%	75%	87.5%		
		Prosentase Pemenuhan Pengembangan kemitraan/jejaring dengan perusahaan dan lintas sektor terkait	100%	0,5	70%	70%	100%	70%	0%		
1.12 01 15 11	Fasilitasi Kegiatan Koalisi Kependudukan Kota Blitar	Pertemuan rutin anggota BKK; Sosialisasi & Advokasi									
1.12 01 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Prosentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja	80%		70%			70%			
1.12 01 16 01	Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan PReproduksi Remaja (KRR)	Frekuensi jambore PIK KRR	100%	95%	80%	80%	100%	90%	88.3%		
1.12 01 17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Prosentase peningkatan peserta KB	85%		60%			60%			
1.12 01 17 01	Pelayanan Konseling KB	Prosentase pemenuhan layanan konseling KB di masing-masing UPTB	100%		70%			70%			
	Pelayanan KB Medis Operasi			2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	100%	2 kali dalam 1 tahun	4 kali dalam 2 tahun		
1.12 01 18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Prosentase peningkatan peserta KB mandiri	70%		40%			45%			
1.12 01 18 02	Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga	Frekuensi pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS	100%		60%			70%	70%		
		Prosentase pemenuhan Operasional BKB, BKR dan BKL	100%		60%			70%	70%		
		Frekuensi peningkatan kapasitas pendidik/ konselor sebaya	100%		60%			70%	70%		
		Frekuensi jambore kader Tribina dan UPPKS	100%		60%			70%	70%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.12 01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Prosentase peningkatan peran dan fungsi PIK-R di masing-masing sekolah	80%		45%			70%			
1.12 01 20 01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Prosentase Pemenuhan Pengembangan pendirian PIK- R di masing-masing sekolah	100%		70%			70%			
		Prosentase Pemenuhan pembinaan PIK - R	100%		70%			70%			
1.12 01 23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Prosentase peningkatan peran dan fungsi kader tribina dalam program KB	85%		70%			75%			
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Frekuensi pelatihan bagi Kader Tribina (BKB, BKR dan BKL)	100%	98%	100%			100%			
	Pembinaan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga	Lomba Keluarga Harmonis tk. Kec dan tk. Kota, lomba cerdas tangkas kader, jalan sehat Harganas, Resepsi Harganas, Pembinaan Kader Tribina dan UPPKS			8 keg	8 keg	100%		8 keg		
1.12 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.12 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.12 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan saran dan prasarana aparatur									
1.12 01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Prosentase Pembinaan dan pengembangan Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu)									
1.12 01 17 13	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Pembinaan UPKu dan pemilihan UPKu berprestasi									
1.12 01 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase keikutsertaan dalam event daerah									
1.12 01 18 10	Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Keikutsertaan dalam event daan acara daerah									
1.12 01 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Peningkatan Kualitas dan akses informasi masyarakat									
1.12 01 19 7	Peningkatan Eukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Lomba TTG									
1.12 01 15 01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Prosentase peningkatan jumlah peserta KB	85%		75%			75%			UPTD Kep Kidul

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan		1 kali		1 kali	100%		1 kali		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA										
	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Lomba Bulutangkis		1 kali		1 kali	100%		1 kali		
1.12 01 1 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Program pelayanan administrasi perkantoran									
1.12 01 2 01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.12 01 6 01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.12 01 15 01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Prosentase peningkatan kualitas perempuan dan anak									
1.12 01 15 6 01	Fasilitasi pelaksanaan Lomba Balita	Frekwensi lomba balita sehat dan keluarga harmonis									
1.12 01 16 01	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak									
1.12 01 16 11 01	Pembinaan posyandu	Frekwensi pembinaan posyandu									
1.12 01 16 01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi									
1.12 01 16 9 01	Pembinaan usaha ekonomi produktif masyarakat	Frekwensi pemb terhadap kelompok UPPKS di wilayah Kec.kepanjenkidul									
1.12 01 16 02	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Prosentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja	80%		70%			70%			UPTD Kec Sukorejo
1.12 01 16 03 02	Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba	Prosentase pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba & HIV AIDS	100%		100%			100%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.12 01 16 04 02	Pembinaan PIK R Tingkat kecamatan	Prosentase pembinaan kelompok PIK R	100%		100%			100%			
1.11 01 15 01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Prosentase peningkatan kualitas perempuan dan anak	85%		75%			75%			
1.11 01 15 06 01	Fasilitasi pelaksanaan Lomba Balita	Frekuensi lomba Balita sehat dan Keluarga Harmonis	10 kali	1 kali	2 kali	1 kali	50%	2 kali	4 kali		
1.12 01 15 01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Prosentase peningkatan jumlah peserta KB	85%		75%			75%			
1.12 01 15 01 01	Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Prosentase pelayanan KB dan Alkon bagi Gakin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.12 01 15 02 01	Pelayanan KIE	Prosentase penyampaian komunikasi informasi dan edukasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.22 01 15 05 01	Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah akseptor IUD, MOP dan MOW penerima sembako	100%		100%			100%	100%		
1.12 01 15 07 01	Pendataan Keluarga	Prosentase pemenuhan database keluarga Pra KS dan KS1	100%	98%	15.500 KK	15.500 KK	100%	100%	100%		
1.12 01 23 02	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Prosentase peningkatan peran dan fungsi kader tribina dalam program KB	85%		75%			75%			
1.12 01 23 02 02	Fasilitasi kegiatan kelompok Tribina di Tingkat Kecamatan	Prosentase pemenuhan pemberian insentif untuk Kader BKB	100%	98%	100%			100%	100%		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										
	Kerjasama Penanggulangan Kemiskinan	Money Program TMMKM KB KeS		1 keg		1 keg	100%		1 keg		
	PROGRAM PNINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan		1 kali		1 kali	100%		1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA										
	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Lomba bulutangkis		1 kali		1 kali	100%		1 kali		
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA										
	Sosialisasi reproduksi remaja dan bahaya narkoba				1 keg			1 keg	1 keg		
1.12 01 1 02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi									
1.12 01 2 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	posentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.12 01 6 02	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pelaporan									
1.12 01 16 02	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat									
1.12 01 16 9 02	Pembinaan usaha ekonomi produktif masyarakat	Frekuensi pembinaan terhadap kelompok UPPKS di wilayah kec Sukorejo									
1.12 01 16 02	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender dan anak									
1.12 01 16 11 02	Pembinaan posyandu	Frekuensi pembinaan posyandu di 7 Kelurahan di Kec Sukorejo									
1.12 01 15 03	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Prosentase peningkatan jumlah peserta KB	85%		75%			75%			UPTD Kec. Sananwetan
1.12 01 15 01 03	Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Prosentase pelayanan KB dan Alkon bagi Gakin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.12 01 15 02 03	Pelayanan KIE	Prosentase penyampaian komunikasi informasi dan edukasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.12 01 15 05 03	Pembinaan KB	jumlah akseptor IUD, MOP dan MOW penerima sembako	600 orang		150 orang			150 orang	150 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.12 01 6 03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.12 01 16 03	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak									
1.12 01 16 5 03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Frekuensi pembinaan Posyandu									
1.12 01 16 03	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi									
1.12 01 16 9 03	Pembinaan usaha ekonomi produktif masyarakat	Frekuensi pembinaan terhadap kelompok UPPKS									
	URUSAN PERHUBUNGAN										
	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN										DINHUB
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan		1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	2 kali		
1.07 01 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Prosentase kelayakan prasarana dan fasilitas LLAJ	85%		70%			70%			
1.07 01 16 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Frekuensi pemeliharaan dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	5 kali	1 kali 7 jenis	1 kali	1 kali 7 jenis	100%	1 kali	3 kali		
1.07 01 16 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Frekuensi Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal kota Blitar	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.07 01 16 05	Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu-lintas	Jumlah pemeliharaan traffic light, flashing light, pos jaga dan shelter	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.07 01 16 06	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan listrik	Frekuensi pemeliharaan jaringan listrik PJU	20 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	12 kali		
		Frekuensi pembayaran rekening PJU	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.07 01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Prosentase kualitas pelayanan angkutan	85%		70%			70%			
1.07 01 17 02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Frekuensi pelaksanaan operasional peningkatan kelancaran lalu lintas	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.07 01 17 03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Frekuensi pelaksanaan kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg 240 orang	100%	1 keg	3 keg		
	Kegiatan Penciptaan Disiplin Dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Frekuensi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terminal		12 bulan	1 keg	12 bulan	100%		12 bulan		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.07 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosesntase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.07 01 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.07 01 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Jumlah aparatur yang menggunakan atribut lengkap									
1.07 01 3 3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Prosentase pengadaan pakaian kerja lapangan untuk pegawai									
1.07 01 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase pelatihan insan perhubungan									
1.07 01 5 4	Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur	Pelatihan kepribadian insan perhubungan									
1.07 01 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1.2 03 15 5 09	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Prosentase peningkatan kelancaran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat	80%		70%			70%			BAGIAN HUMAS
1.2 03 15 02 5 09	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Komputer beserta softwrenya yang sesuai dengan Kebutuhan PPID Pembantu	5 jenis		1 jenis			1 jenis			
1.2 03 15 03 5 09	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Frekuensi pelaksanaan pelatihan komunikasi dan informasi	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
2.0 03 15 4 09	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	55%		45%			45%			
2.0 03 15 10 4 09	Promosi Kebudayaan Kota Blitar	Jumlah kegiatan dalam rangka hari jadi Kota Blitar	25 keg	5 keg	5 keg	5 keg	100%	5 keg	15 keg		
	Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru	Fasilitasi Kegiatan Menyambut Tahun Baru			1 keg			1 keg	1 keg		
2.0 03 15 11 4 09	Promosi Kesenian Khas Kota Blitar	Jumlah kegiatan promosi kesenian	5 keg		1 keg			1 keg			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.1 03 16 7 09	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Prosentase terdokumentasinya kegiatan pimpinan daerah	100%		100%			100%			
1.1 03 16 12 7 09	pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Dalam Bentuk Audio Visual, Foto, dan Berita Daerah Yang Dikliping dan E - Kliping	15 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	8 jenis		
1.1 03 18 9 09	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	85%		70%			70%			
1.1 03 18 05 9 09	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jenis kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka HUT RI	40 jenis		8 jenis			8 jenis			
1.1 03 18 06 9 09	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan dan Rapat-rapat Koordinasi	Jumlah upacara, Jumlah rapat - rapat dinas yang difasilitasi	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis	2 jenis		
	Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya Keprotokolan			1 keg				1 keg	1 keg		
	Fasilitasi Peringatan HUT RI	Fasilitasi Peringatan HUT RI		1 keg				1 keg	1 keg		
	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kota Blitar	Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kota Blitar		1 keg				1 keg	1 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada Even daerah dan Hari Besar Nasional			1 keg				1 keg	1 keg		
1.2 03 18 5 09	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Prosentase peningkatan hubungan kerjasama antara pemda dengan media masa	85%		80%			80%			
1.2 03 18 02 5 09	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Sambutan Pimpinan Daerah, jumlah Berita Positif di Media Massa, Jumlah Jumpa Pers Pimpinan Daerah, Jumlah Pers Release yang dikeluarkan	20 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	12 jenis		
1.2 03 18 04 5 09	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat tentang cukai hasil tembakau	Jumlah Berita Positif di Media Massa, Jumlah Jumpa Pers Pimpinan Daerah, Jumlah Pers Release yang dikeluarkan	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis		
1.2 03 25 0 09	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Prosentase peningkatan penerimaan tamu pemerintah daerah	85%		80%			75%			
1.2 03 25 07 0 09	Fasilitasi kunjungan kerja antar Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan penerimaan tamu sesuai standard keprotokolan	15 jenis keg	3 jenis keg	3 jenis keg	3 jenis keg	100%	3 jenis keg	9 jenis keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur									
1.2 03 1 0 09	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.2 03 2 0 09	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.2 03 19 0 09	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI										
1.2 03 19 1 0 09	Penyampaian ketentuan di bidang cukai	Jumlah berita positif di media massa, Jumlah Pers Release yang dikeluarkan									
1.2 01 15 5	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Prosentase peningkatan kelancaran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat	85%		75%			75%			DINAS KOMINPARDA
1.2 01 15 02 5	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah sarana pengaduan berbasis TI dan fasilitas penggunaan open source	ULPIM dan 70 SKPD	ULPIM dan 70 SKPD	ULPIM dan 70 SKPD	ULPIM dan 5 titik SKPD	100%	ULPIM dan 70 SKPD	ULPIM dan 70 SKPD		
1.2 01 15 03 5	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Frekuensi pelaksanaan siaran radio Mahardhika	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan		
1.2 01 15 05 5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi (Peralatan pemancar)	5 unit	5 unit	1 unit			1 unit	6 unit		
1.2 01 15 6 5	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi									
1.2 01 17 5	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi terlatih	65%		5%			5%			
1.2 01 17 02 5	Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Frekuensi pelaksanaan KIM serta media Informasi dan Komunikasi	5 KIM, 10 org	1 KIM, 2 org	1 KIM, 2 org	1 KIM, 2 org	100%	1 KIM, 2 org	3 KIM, 2 org		
1.2 01 17 1 5	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Frekuensi pelaksanaan Bimtek jurnalistik dan broadcasting, teknisi radio, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi(PPID) dan operator open source software (OSS)									
1.2 01 18 5	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Prosentase penyebaran informasi pembangunan	85%		80%			80%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.2 01 18 01 5	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah sarana penyebarluasan informasi pembangunan	60 baliho, 70 spanduk	19 baliho, 33 spanduk	12 baliho, 14 spanduk	19 baliho, 33 spanduk	158%	12 baliho, 14 spanduk	43 baliho, 61 spanduk		
1.2 01 18 03 5	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Frekuensi pelaksanaan tatap muka dengan masyarakat	25 keg		5 keg			5 keg			
		Operasionalisasi Lembaga PPID		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 bulan		
1.2 01 16 5	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Jumlah ketersediaan dokumen bidang informasi dan komunikasi	3 jenis dok								
1.2 01 16 01 5	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen bidang informasi dan komunikasi (Master Plan E-Gov, Sistem manajemen informasi pelayanan publik, Kajian dan integrasi aplikasi sistem informasi SKPD)	3 jenis dok								
1.2 01 23 5	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Frekuensi operasional LPSE Kota Blitar									
1.2 01 23 1 5	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Penyusunan Sistem Informasi untuk SKPD									
1.2 01 23 13 5	Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE)	Operasional Pelaksanaan LPSE									
1.2 01 24 5	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat									
1.2 01 24 2 5	Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM)	Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui ULPIM dan Pelayanan PPID									
1.2 01 1 5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.2 01 2 5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana									
1.2 01 6 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN PERTANAHAN										
1.0 01 16 9	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Prosentase sertifikasi tanah asset daerah	90%		50%			50%			KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH
1.0 01 16 01 9	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah pensertifikatan tanah Aset	37 bidang	20 bidang	9 bidang	20 bidang	222%	9 bidang	29 bidang		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.0 01 17 9	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah									
1.0 01 17 16 9	Peningkatan manajemen aset barang daerah	Frekuensi rapat koordinasi peningkatan manajemen aset barang daerah									
1.0 01 17 20 9	Fasilitasi Sekretariat Jasa Konstruksi / Konsultasi	Jumlah fasilitasi panitia pengadaan barang daerah									
1.0 01 21 9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA	Prosentase sarana dan prasarana olahraga yang representatif									
1.0 01 21 6 9	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga	Frekuensi pemeliharaan lapangan dan gedung olahraga									
1.0 01 21 7 9	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Olahraga	Frekuensi rehabilitasi sedang lapangan olahraga GOR Soekarno Hatta									
1.0 01 18 9	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri									
1.0 01 18 11 9	Pembangunan Kios	Prosentase kios yang terbangun									
1.0 01 18 9	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Peran serta SKPD pada event daerah dan hari besar nasional									
1.0 01 18 10 9	Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Hari Jadi Kota Blitar Hari Lahir Pancasila Haul Bung Karno Hari Ulang Tahun RI Hari Besar Nasional dan Daerah									
	URUSAN KESBANG DAN POLDAGRI										
1.1 01 15 9	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	90%		80%			80%			BAKESBANG POL LINMAS
1.15 01 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Frekuensi pelaksanaan pembinaan pengamanan kegiatan daerah dan pembinaan petugas keamanan	65%	1.050 org	1.050 org	1.050 org	100%	1.050 org	1.050 org		
1.15 01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	95%		95%			95%			
1.15 01 17 01	Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi/pembinaan, koordinasi dan pemantapan situasi dan kondisi kerukunan antar umat beragama	80	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.15 01 17 02	Peningkatan Rasa Solidaritas Dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Frekuensi pelaksanaan orientasi dan lokakarya Ran Ham, sosialisasi peningkatan HAM	60	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	18 kali		
1.15 01 17 04	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Frekuensi sosialisasi dan pembinaan pembauran Kebangsaan	60	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	600 org		
1.15 01 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	70%		65%			65%			
1.15 01 18 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Frekuensi seminar, talk show, diskusi Peningkatan wawasan kebangsaan	60	300 org		300 org	100%		600 org		
1.15 01 18 03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Frekuensi fasilitas kegiatan korps musik kota Blitar	75	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24 bulan		
	Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.15 01 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	95%	80%	85%			85%			
1.15 01 19 02	Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Prosentase pelaksanaan kegiatan pengamanan daerah, rapat koordinasi anggota Kominda dan kegiatan pengamanan tertutup	90%	80%	85%	80%	100%	85%	83.67%		
1.15 01 19 03	Pendidikan Bela Negara	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pendidikan Bela Negara	10 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
1.15 01 20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	95%		85%			85%			
1.15 01 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Prosentase pelaksanaan sosialisasi penyalah gunaan, miras dan narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.15 01 21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat	90%		80%			80%			
1.15 01 21 03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Frekuensi pelaksanaan koordinasi forum diskusi politik	#REF!	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	6 kali		
	Penyuluhan kepada masyarakat				2 kali			2 kali			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.15 01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas penanggulangan korban bencana alam	85%		80%			80%			
1.15 01 22 01	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan dini dan penanggulanga korban bencana alam	133	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.15 01 22 05	Fasilitasi SATLAK PBP	Jumlah pelaksanaan koordinasi, komunikasi satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi dan patroli wilayah	103	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	6 kali		
1.15 01 22 06	Pelatihan SAR-LINMAS	Jumlah peserta pelatihan SAR LINMAS	205	72 Org	72 Org	72 Org	100%	72 Org	216 Org		
1.15 01 22 07	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah terpenuhinya pengadaan pakaian dinas PMK	160	25 stel	20	25 stel	100%	20	65		
1.15 02 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Penurunan prosentase angka kriminalitas	95%		95%			95%			KANTOR POL PP
1.15 02 16 03	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI Dan Kejaksaan	Jumlah operasi dan penertiban / razia hotel, miras	58 keg	5 keg	11 keg	5 keg	100%	11 keg	26 keg		
1.15 02 16 06	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jambore Pol.PP, Latihan Outbond, Latihan PBB dan HUT Pol.PP se Jatim	52 keg	8 keg	10 keg	8 keg	100%	10 keg	28 keg		
1.15 02 16 07	Fasilitasi Kerjasama Penegakan Peraturan Cukai	Operasi dan Penertiban terhadap cukai ilegal	320 keg		65 keg			65 keg	60 keg		
1.15 02 16 08	Pengamanan aset daerah	Frekuensi pengamanan aset daerah	205 keg	67 org	48 org	67 org	100%	48 keg	170 org		
1.15 02 16 09	Pengamanan wilayah dan penegakan Peraturan Daerah	Frekuensi penertiban dan penegakan perda	220 keg	53 keg	57 keg	53 keg	100%	57 keg	155 keg		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
URUSAN OTODA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											
	OTODA										
1.20 04 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	85%		15%			15%			SETWAN
1.20 04 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengiriman bimtek	44 kali	7 kali	9 kali	7 kali	87.5%	9 kali	23 kali		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.20 04 15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Prosentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	100%		100%			100%			
1.20 04 15 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah raperda yang dibahas	125 raperda		25 raperda			25 raperda	50 raperda		
1.20 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Frekuensi rapat DPRD	274 kali	50 kali	55 kali	50 kali	100%	55 kali	150 kali		
1.20 04 15 04	Rapat-rapat paripurna	Frekuensi rapat paripurna PAW DPRD	10 kali		2 kali	0 kali		2 kali	4 kali		

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.2 03 17 0 05	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa	85%		80%			80%			BAG. PEMBANGUNAN
1.2 03 17 20 0 05	Fasilitasi Sekretariat Jasa Konstruksi / Konsultasi	Prosentase fasilitasi Sekretariat Jasa Konstruksi / Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.67%		
1.2 03 17 37 0 05	Penyusunan Bahan Kebijakan tentang LPSE	Jumlah buku bahan kebijakan	190 buku	190 buku		190 buku	100%		190 buku		
1.2 03 17 38 0 05	Fasilitasi pengelolaan pengadaan secara elektronik (LPSE)	Jumlah pengadaan pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya dengan sistem elektronik	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.2 03 17 40 0 05	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)									
1.0 03 21 6 05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	85%		80%			80%			
1.0 03 21 13 6 05	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Prosentase monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	85%	48%	80%	80%	100%	80%	69.3%		
1.0 03 24 6 05	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan perencanaan prasarana wilayah	85%		80%			80%			
1.0 03 24 06 6 05	Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah sosialisasi peraturan pelaksanaan pembangunan	4 keg		1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.0 03 24 07 6 05	Visualisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan yang divisualisasikan	4 keg		1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg		
1.0 03 24 08 6 5	Penyusunan standarisasi bangunan dan cagar budaya	Jumlah dokumen standarisasi bangunan dan cagar budaya	1 dok		1 dok	1 dok	100%		1 dok		
1.0 03 24 09 6 5	Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan bidang PU, Perumahan, Pengairan dan Tata Ruang	Jumlah dokumen kebijakan dan juknis pembangunan yang tersusun	1 dok					1 dok			
1.0 03 24 11 6 5	Penyusunan Analisis Standart Biaya Kegiatan	Jumlah dokumen ASB (Analisis standart Biaya)	4 dok		1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok		
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar Nasional				1 keg			1 keg	1 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 06 21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa	85%		80%			80%			
1.20 06 21 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan Observasi Lapangan	9 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja				1 keg			1 keg	1 keg		
1.20 06 22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Prosentase penurunan temuan dalam pengelola keuangan	60%		50%			50%			
1.20 06 22 03	Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi	Jumlah sosialisasi tentang pemantapan penyelenggaraan pemerintah bebas korupsi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				1 keg			1 keg	1 keg		
1.20 06 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.20 06 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.20 06 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.2 03 15 2 01	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan RT/RW se-Kota Blitar	80%		70%			70%			BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.2 030 15 01 2 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah bingkisan lebaran bagi ketua RT RW LPMK Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan	13.023 paket	2.711 paket	2.610 paket	2.711 paket	104%	2.610 paket	7.921 paket		
1.2 030 15 06 2 1	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah pembekalan pengurus RT RW se Kota Blitar	4.159 orang	825 orang	825 orang	825 orang	99%	835 orang	2490 orang		
1.2 030 17 0 1	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan pengembangan dan pengelolaan tanah eks bengkok	100%		100%			100%			
1.2 030 17 19 0 1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang sewa tanah eks bengkok	21 Kel x 5	21 Kel	21 Kel	21 Kel	100%	21 Kel	21 Kel x 2		
1.2 030 25 0 1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar pemda	100%		100%			100%			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 09 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	55%		45%			45%			KEC.SANANWETAN
1.13 09 15 08	Fasilitasi Pemberian Raskin	Jumlah penerima bantuan beras raskir	291 orang								
1.13 09 15 14	Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan	70%	65%	65%	65%	100%	65%	65%		
1.13 09 15 15	Fasilitasi Pemberian Raskir	Jumlah penerima bantuan beras raskir	291 orang x 4	1.704 RTS	291 orang	1.704 RTS	585.57%	291 orang	1.704 RTS		
1.19 09 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	prosentase menurunnya angka kriminalitas	85%		65%			65%			
1.19 09 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	19 keg	3 keg	4 keg	3 keg	100%	4 keg	10 keg		
1.19 09 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%			40%		40%			
1.19 09 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	20 keg	5 keg	5 keg	5 keg	100%	5 keg	10 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 09 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
1.22 09 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan	24 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	18 keg		
1.22 09 15 05	Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.22 09 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	30 keg	6 keg	5 keg	5 keg	100%	7 keg	18 keg		
1.22 09 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase pemanfaatan BOP PKMK	95%	99%	80%	90%	100%	90%	91%		
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				1keg			1keg	1keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		70%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.23 09 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 09 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah tersusunnya data potensi kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka.	10 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
1.23 09 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah tersusunnya profil kecamatan	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.08 09 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		60%			60%			
1.08 09 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	11 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	3 keg	5 keg		
1.20 09 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan pendapatan dan tersusunnya data tanah eks bengkok	30%		30%			30%			
1.20 09 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan lelang eks bengkok di 7 kelurahan	35 keg	7 keg	7 keg	7 keg	100%	7 keg	21 keg		
1.22 09 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	90%		80%			80%			
1.22 09 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan	95%	85%	85%	85%	100%	90%	87%		
1.22 09 17 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	Jumlah UKM yang mengikuti pameran produk unggulan dan bazar kerakyatan	4 x 7 kel	7 kel	7 kel	7 kel	100%	7 kel	7 kel x 3		
1.20 09 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan	95%		85%			85%			
1.20 09 31 01	Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan	Jumlah pelayanan kecamatan yang diberikan	10 jenis x 5	5 jenis	10 jenis	5 jenis	50%	10 jenis	10 jenis x 3		
1.20 09 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.20 09 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.20 09 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat	60%								Kec. Sananwetan, Kel.Sentul, Kel.Kauman, Bapemas & KB, UPTB Bapemas & KB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penurunan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	35%								Kec. Sananwetan, Kec.Kep.kidul, DKP, KLH

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 08 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	55%		45%			45%			KEC. SUKOREJO
1.13 08 15 14	Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan	40 orang		56 orang	10 orang	560%	10 orang	66 orang		
1.13 08 15 15	Fasilitasi Pemberian Raskir	Jumlah penerima bantuan beras raskir	1380 orang	2030 orang	350 orang	2030 orang	580%	350 orang	3632 orang		
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										
	Pelestarian Petilasan dan Adat				1keg			1keg	1keg		
1.19 08 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	prosentase menurunnya angka kriminalitas	85%		65%			65%			
1.19 08 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling	45 jenis keg	9 jenis keg	9 jenis keg	9 jenis keg	100%	9 jenis keg	27 jenis keg		
1.19 08 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 08 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	24 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	18 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg			
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 08 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 08 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang diberdayakan	17 org	4 org	4 org	4 org	100%	4 org	12 org		
1.22 08 15 05	Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah lomba kelurahan yang difasilitasi	7 kel	7 kel	7 kel	7 kel	100%	7 kel	7 kel		
1.22 08 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 08 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	persentase pemanfaatan BOP PKMK	15 keg	4 keg	3 keg	4 keg	100%	3 keg	10 keg		
1.23 08 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 08 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi yang tersusun	400 buku	80 buku	80 buku	80 buku	100%	80 buku	240 buku		
1.23 08 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah tersusunnya profil kecamatan	112 buku	28 buku	28 buku	28 buku	100%	28 buku	56 buku		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 08 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok	30%		30%			30%			
1.20 08 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Sosialisasi retribusi daerah, pekan panutan pembayaran PBB, ledang PBB, lelang eks bengkok	20 keg	7 kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan	100%	7 kelurahan	7 kelurahan		
1.22 08 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	100%		100%			100%			
1.22 08 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.22 08 17 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	Jumlah UKM yang mengikuti pameran produk unggulan dan bazar kerakyatan	92 UKM		23 UKM	23 UKM	100%	23 UKM	463 UKM		
1.20 08 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan	90%		75%			75%			
1.20 08 31 01	Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan	Jumlah pelayanan kecamatan yang diberikan	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	30 jenis		
1.20 08 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan									
1.20 08 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan									Kecamatan, Kelurahan, Kantor LH
1.20 08 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.20 08 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.20 08 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									Kec. Sukorejo, Kec.Kep.kidul, Dinsosnaker, Bag.Kesra
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Prosaentase peningkatan kelembagaan kesejahteraan sosial									Kec. Sukorejo, Kel.Pakunden, Dinas Kopersai & UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Prosentase pengembangan UMKM									
1.13 07 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	55%		45%			45%			KEC. KEPANJENKIDUL
1.13 07 15 14	Fasilitasi Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan	Frekuensi fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan	20 keg	7 kelurahan	5 kelurahan	7 kelurahan	100%	5 keg	7 kelurahan		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 07 15 16	Fasilitasi Pemberian Raskir	Jumlah penerima bantuan beras raskir	1600 orang	1598 orang	400 orang	1587 orang	396.75%	400 orang	3585 orang		
1.19 07 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		65%			65%			
1.19 07 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan Patroli gabungan, pembinaan linmas, pembinaan Poskamling	35 keg	4 keg	7 keg	4 keg	57.14%	7 keg	21 keg		
1.19 07 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	70%		50%			50%			
1.19 07 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	17 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 07 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 07 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang diberdayakan	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	8 lembaga x 3		
1.22 07 15 05	Evaluasi Kelurahan Berhasil	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi kelurahan berhasil	21 kali	5 kali	5 kali	2 kali	100%	5 kali	12 kali		
1.22 07 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.22 07 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.22 07 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	100%		100%			100%			
1.22 07 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.22 07 17 05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa	8 keg	1 keg	2 keg	1 keg	100%	2 keg	2 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 07 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 07 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah data potensi, monografi kecamatan, dan kecamatan dalam angka yang tersusun	16 jenis buku	4 jenis buku	4 jenis buku	4 jenis buku	100%	4 jenis buku	11 jenis buku		
1.23 07 15 08	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah buku profil kecamatan yang tersusun	20 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	5 buku	15 buku		
1.08 07 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		65%			65%			
1.08 07 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.20 07 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan PAD dan tersusunnya data tanah eks bengkok	35%		35%			35%			
1.20 07 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Sosialisasi retribusi daerah, pekan panutan pembayaran PBB, ledang PBB, lelang eks bengkok	20 keg		4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
1.20 07 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan	100%		20%			20%			
1.20 07 31 01	Fasilitasi Pelayanan Prima Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Evaluasi pelaksanaan CC	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH										
	Fasilitasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Fasilitasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		1 keg		1 keg	100%		1 keg		
1.20 07 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.20 07 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur									
1.20 07 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Prosaentase peningkatan kelembagaan kesejahteraan sosial	85%								Kec. Sukorejo, Kec.Kep.kidul, Dinsosnaker, Bag.Kesra

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penurunan tingkat pencemaraan dan perusakan lingkungan hidup	35%								Kec. Sananwetan, Kec.Kep.kidul, DKP, KLH
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase sarana informasi yang bisa diakses	100%								Kec. Kep.kidul, KLH
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	30%								Kec. Kepanjenkidul
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Prosentase peningkatan sarana prasarana olah raga yang representatif	80%								Kec. Kepanjenkidul, DKP, KPABD
1.08 30 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			BENDOGERIT
1.08 30 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	24 keg	3 keg	6 keg	3 keg	50%	6 keg	9 keg		
1.13 30 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 30 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.19 30 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 30 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	16 keg	3 keg	4 keg	3 keg	75%	4 keg	11 keg		
1.19 30 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 30 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	20 keg	1 keg	5 keg	1 keg	100%	5 keg	2 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg			
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum							1 keg	1 keg		
1.22 30 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 30 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	1 keg	8 keg	1 keg	100%	8 keg	24 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 30 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PABRIK ROKOK	Prosentase masyarakat yang paham akan bahaya rokok									Kelurahan Karangsari, Bendogerit
1.08 29 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			KARANGTENGAH
1.08 29 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	12 keg		
1.13 29 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 29 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
	Sosialisasi dan Pembinaan Pengurus RT, RW dan LPMK	Sosialisasi dan Pembinaan Pengurus RT, RW dan LPMK			1 keg	1 keg	100%		1 keg		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA										
	Fasilitasi Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya		2 keg			100%		2 keg		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										
	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda		1 keg		1 keg	100%		1 keg		
1.19 29 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 29 15 03	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	1 keg		1 keg	100%		2 keg		
1.19 29 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	16 keg		4 keg			4 keg	4 keg		
1.19 29 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 29 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	20 keg		5 keg			5 keg	5 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Prosentase peningkatan keterampilan pemuda	70%								Kel. Karangtengah, Bapemas & KB
1.08 28 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		50%			55%			REMBANG
1.08 28 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	16 kali		4 kali			4 kali	4 kali		
1.13 28 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		20%			25%			
1.13 28 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan		
1.19 28 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 28 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	20 keg	3 keg	4 keg	3 keg	75%	4 keg	11 keg		
1.19 28 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 28 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 28 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 28 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	6 keg	5 keg	6 keg	100%	5 keg	17 keg		
1.22 28 15 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	20 orang	1 keg		1 keg	100%		3 keg		
1.22 28 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	6 lembaga	8 lembaga	6 lembaga	75%	8 lembaga	22 lembaga		
1.22 28 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.17 28 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 28 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	8 klpk	2 klpk	2 klpk	2 klpk	100%	2 klpk	6 klpk		
1.17 28 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 28 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 28 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	48 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	36 jenis		
1.22 28 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 28 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 28 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 28 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 28 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku	4 buku	100%	4 buku	4 buku		
1.23 28 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase upaya peningkatan kesehatan masyarakat									
1.23 28 16 9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi									
1.23 28 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 28 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana									
1.23 28 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase keterdiaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan									Kel.Rembang, Turi, Pakunden, Bakesbangpol Linmas, bag.Kesra
1.08 27 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			SANANWETAN
1.08 27 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	16 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	8 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 27 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 27 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 27 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 27 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	30 kali	1 kali	6 kali	1 kali	100%	6 kali	13 kali		
1.19 27 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 27 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	20 keg	1 keg	5 keg	1 keg	20%	5 keg	11 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 27 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 27 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	8 keg		
1.22 27 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	9 lembaga	112.5%	8 lembaga	8 lembaga x 3		
1.22 27 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 27 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 27 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	24 klpk	6 klpk	6 klpk	6 klpk	100%	6 klpk	18 klpk		
1.17 27 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.20 27 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 27 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	5 x 12 jenis	2 keg	12 jenis	2 keg	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 27 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 27 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 27 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 27 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 27 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 27 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat									
1.23 27 16 9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Fasilitas peningkatan kesehatan masyarakat									
1.23 27 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai									
1.23 27 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.23 27 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan									
1.08 26 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			KLAMPOK
1.08 26 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA			12 keg			12 keg	12 keg		
1.13 26 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		30%			30%			
1.13 26 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		12 bulan	12 bulan	100%	3 keg	4 keg		
1.19 26 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 26 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	15 keg	2 keg	3 keg	2 keg		3 keg	8 keg		
							66.67%				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 26 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung Kantor									
1.23 26 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.08 25 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			PLOSOKEREP
1.08 25 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	20 keg	6 keg	4 keg	6 keg	150%	4 keg	10 keg		
1.13 25 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 25 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 25 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 25 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	15 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.19 25 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 25 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	24 keg	5 keg	6 keg	5 keg	83.33%	6 keg	11 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg			
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 25 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 25 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	2 keg	8 keg	2 keg	100%	8 keg	12 keg		
1.22 25 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	9 lembaga	8 lembaga	9 lembaga	112.5%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 25 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.17 25 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 25 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	4 klpk	1 klpk	1 klpk	1 klpk	100%	1 klpk	3 klpk		
1.17 25 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 25 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 25 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 25 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 25 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 25 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 25 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 25 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.08 24 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			GEDOG
1.08 24 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	20 keg	2 keg	4 keg	2 keg	50%	4 keg	6 keg		
1.13 24 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 24 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 24 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 24 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.19 24 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 24 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 24 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur									
1.23 24 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.08 23 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			TANJUNGSARI
1.08 23 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg		3 keg			3 keg	3 keg		
1.13 23 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 23 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 23 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 23 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	1 keg	3 keg	1 keg	33%	3 keg	7 keg		
1.19 23 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 23 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	20 keg	5 keg	5 keg	5 keg	100%	5 keg	15 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional							1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg			
	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Peningkatan kesehatan masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA										
	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Olahraga				1 keg			1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 23 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 23 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	7 keg	8 keg	7 keg	87.5%	8 keg	23 keg		
1.22 23 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	7 lembaga	8 lembaga	7 lembaga	87.5%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 23 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat							1 keg	1 keg		
1.17 23 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 23 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi	8 klpk	2 klpk	2 klpk	2 klpk	100%	2 klpk	6 klpk		
1.17 23 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 23 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 23 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 23 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 23 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 23 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 23 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 23 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 23 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 23 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 23 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.08 22 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			SUKOREJO
1.08 22 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	4 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 22 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 22 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	12 jenis X 5	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	12 jenis x 3		
1.22 22 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 22 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 22 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 22 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 22 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 22 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 22 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 22 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.08 21 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	80%		65%			65%			KARANGSARI
1.08 21 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg		3 keg			3 keg			
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan			100%					100%		
1.13 21 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		30%			30%			
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin								40 org		
1.13 21 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 21 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	80%		65%			65%			
1.19 21 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	20 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 21 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan									
1.22 21 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya administrasi perkantoran									
1.22 21 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran									
1.22 21 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PABRIK ROKOK	Prosentase masyarakat yang paham akan bahaya rokok									Kelurahan Karangsari, Bendogerit TURI
1.08 20 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			
1.08 20 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg	2 keg	3 keg	2 keg	100%	3 keg	5 keg		
1.13 20 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 20 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 20 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	80%		60%			65%			
1.19 20 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	15 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.19 20 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 20 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		756%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Peningkatan kesehatan masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 20 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 20 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	24 keg		
1.22 20 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	8 lembaga x 3		
1.22 20 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 20 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 20 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	8 klpk	2 klpk	2 klpk	2 klpk	100%	2 klpk	6 klpk		
1.17 20 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 20 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		65%			75%			
1.20 20 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 20 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		65%			70%			
1.22 20 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 20 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 20 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 20 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 20 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan admintrasi perkantoran									
1.23 20 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 20 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	95%								
1.08 19 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			TLUMPU

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 19 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 19 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 19 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 19 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 19 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 19 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku		8 buku			8 buku	8 buku		
1.23 19 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku			4 buku			
1.23 19 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat									
1.23 19 16 9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat									
1.23 19 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya pelayanan pada masyarakat sesuai visi misi Pemkot Blitar									
1.23 19 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Tercapainya peningkatan sarana prasana penunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat									
1.23 19 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase pencapaian kinerja dan keuangan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat									
1.08 18 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			BLITAR
1.08 18 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.13 18 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		25%			25%			
1.13 18 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.19 18 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 18 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 18 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 18 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 18 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun									
1.23 18 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 18 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur									
1.23 18 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.08 17 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			PAKUNDEN
1.08 17 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.13 17 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		30%			30%			
1.13 17 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	14 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	8 keg		
1.19 17 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 17 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	19 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								39 org		
1.19 17 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 17 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	24 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%	6 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 17 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kelurahan									
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	95%								
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Prosentase pengembangan UMKM	35%								
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMSYARAKATAN OLAH RAGA	Prosentase pemsyarakatan olah raga	80%								
1.08 16 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		55%			55%			KEPANJENKIDUL
1.08 16 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.13 16 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		30%			30%			
1.13 16 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	4 keg		
1.19 16 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		60%			60%			
1.19 16 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	93 keg		
1.19 16 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 16 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 16 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 16 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 16 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 16 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 16 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 16 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	4 klpk	1 klpk	1 klpk	1 klpk	100%	1 klpk	3 klpk		
1.17 16 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 16 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 16 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 16 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 16 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 16 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 16 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	11 buku	8 buku	11buku	137.5%	8 buku	27 buku		
1.23 16 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 16 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.23 16 16 9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya Peningkatan Kesehatan Masyarakat									
1.23 16 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 16 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.23 16 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.08 15 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		60%			60%			
1.08 15 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	4 keg		1 keg			1 keg	1 keg		KEPANJENLOR

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 15 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		35%			35%			
1.13 15 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.19 15 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	80%		60%			60%			
1.19 15 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg		3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg		
	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								28 RT, 6 RW		
1.19 15 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 15 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 15 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 15 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	24 keg		
1.22 15 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 15 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 15 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 15 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	4 keg		
1.17 15 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 15 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 15 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	2 x 12 jenis		
1.22 15 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 15 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 15 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 15 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 15 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 15 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
1.23 15 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 15 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1.08 14 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		60%			60%			BENDO
1.08 14 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	4 keg		
1.13 14 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		35%			35%			
1.13 14 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	2 keg		
1.19 14 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	85%		65%			65%			
1.19 14 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								73 org		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.19 14 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 14 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 14 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 14 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	4 keg		
1.22 14 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	4 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 14 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 14 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 14 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi	1 klp x 5	12klp	1 klp	2 klp	100%	1 klp	3 klp		
1.17 14 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 14 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 14 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 14 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 14 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 14 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 14 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 14 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 14 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pemenuhan Pelayanan administrasi Perkantoran									
1.23 14 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.23 14 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan pelaporan									
1.13 13 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		30%			30%			TANGGUNG
1.13 13 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	100%	1	100%	100%	100%	100%	100%		
1.19 13 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	75%		60%			60%			
1.19 13 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
1.19 13 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 13 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 13 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 13 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	4 keg	4 keg	3 keg	75%	4 keg	11 keg		
1.22 13 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 13 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat							1 keg	1 keg		
1.17 13 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.17 13 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.17 13 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.20 13 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 13 31 01	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	5 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		
1.22 13 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 13 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.23 13 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 13 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	11 buku	8 buku	11 buku	137.5%	8 buku	24 buku		
1.23 13 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku			4 buku			
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH										
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun		4 buku		4 buku	100%		4 buku		
1.08 12 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam									
1.08 12 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah bibit tanaman penghijauan		164 bibit	164 bibit	164 bibit	100%	164 bibit	328 bibit		
1.08 12 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terwujudna upaya kesehatan masyarakat									
1.08 12 16 9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terwujudnya kesehatan masyarakat									
1.08 12 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran									
1.08 12 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.08 12 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan									
1.08 12 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%					60%			KAUMAN
1.08 12 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	8 keg		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.13 12 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	40%		30%			30%			
1.13 12 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	8 keg		
1.19 12 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	80%		65%			65%			
1.19 12 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	15 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	3 Keg	9 Keg		
1.19 12 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 12 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	3 keg	4 keg	3 keg		4 keg	7 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 12 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 12 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	24 keg		
1.22 12 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga	100%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 12 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 12 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 12 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi	8 klpk	2 klpk	2 klpk	2 klpk	100%	2 klpk	4 klpk		
1.17 12 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99%		
1.22 12 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.22 12 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.20 12 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 12 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	5 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	2 x 12 jenis		
1.23 12 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 12 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	7 buku	8 buku	7 buku	100%	8 buku	23 buku		
1.23 12 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku	4 buku	4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 12 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran									
1.23 12 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 12 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
1.08 11 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	75%		60%			60%			SENTUL
1.08 11 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	16 keg		4 keg	4 keg	100%	4 keg	8 keg		
1.13 11 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	55%		45%			45%			
1.13 11 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	16 keg	1 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	9 keg		
1.19 11 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	70%		60%			60%			
1.19 11 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli gabungan , pembinaan linmas , pembinaan Poskamling)	12 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	9 keg		
	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan								45 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
1.19 11 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	8 keg		
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg			
1.21 09 15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			756%			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan umum				1 keg			1 keg	1 keg		
	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
	Peningkatan kesehatan masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.22 11 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		80%			80%			
1.22 11 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Jumlah kegiatan di kelurahan yang difasilitasi	40 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100%	8 keg	24 keg		
1.22 11 15 06	Fasilitasi Peningkatan peran Lembaga Masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang difasilitasi	5 x 8 lembaga	9 lembaga	8 lembaga	9 lembaga	112.5%	8 lembaga	3 x 8 lembaga		
1.22 11 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	prosentase Pelaksanaan Program PKMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Keberdayaan Sosial dan ekonomi masyarakat				1 keg			1 keg	1 keg		
1.17 11 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%		55%			55%			
1.17 11 17 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian kelurahan yang difasilitasi.	8 pentas	2 pentas	2 pentas	2 pentas	100%	2 pentas	6 pentas		
1.17 11 17 10	Pelestarian Petilasan Dan Adat	Prosentase pelaksanaan kegiatan bersih desa	4 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.18 11 16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan peran serta pemuda	75%								
1.18 11 16 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba	70 orang	1 keg		1 keg	100%		2 keg		
1.22 11 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat	85%		70%			70%			
1.22 11 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Prosentase Pelaksanaan musrenbang kelurahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
1.20 11 31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	Prosentase peningkatan pelayanan prima kelurahan	90%		75%			75%			
1.20 11 31 03	Fasilitasi Pelayanan Prima Kelurahan	Jumlah pelayanan kelurahan yang diberikan	4 x 12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	3 x 12 jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.23 11 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%		90%			90%			
1.23 11 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah buku monografi dan laporan rutin kependudukan kelurahan lainnya yang tersusun	32 buku	8 buku	8 buku	8 buku	100%	8 buku	24 buku		
1.23 11 15 07	Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan	Jumlah profil kelurahan yang tersusun	16 buku		4 buku	4 buku	100%	4 buku	8 buku		
1.23 11 17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan									
1.23 11 17 3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya peningkatan kesadaran akan nilai - nilai luhur kebangsaan									
1.23 11 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terwujudnya pelayanan adm perkantoran									
1.23 11 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
1.23 11 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan									
1.08 12 17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya Alam	70%		60%			60%			NGADIREJO
1.08 12 17 14	peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Frekuensi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA	16 keg	3 keg	4 keg	3 keg	75%	4 keg	7 keg		
1.13 12 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	50%		40%			40%			
1.13 12 15 15	Fasilitasi Satgas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan Satgas Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi	16 keg		4 keg	4 keg	100%	4 keg	8 keg		
1.19 12 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase penurunan angka kriminalitas	90%		70%			70%			
1.19 12 15 05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	8 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6 keg		
1.19 12 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	75%		50%			50%			
1.19 12 18 05	Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	16 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH										
1.20 05 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah	82%		80%			80%			DPKD
1.20 05 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah buku Perda tentang APBD	675 buku	135 buku	135 buku	135 buku	100%	135 buku	405 buku		
1.20 05 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah buku Perwali tentang penjabaran APBD	675 buku	135 buku	135 buku	135 buku	100%	135 buku	405 buku		
1.20 05 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah buku Perda tentang perubahan APBD	675 buku	135 buku	135 buku	135 buku	100%	135 buku	405 buku		
1.20 05 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah buku Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD	675 buku	135 buku	135 buku	135 buku	100%	135 buku	405 buku		
1.20 05 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku		
1.20 05 17 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran APBD	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku		
1.20 05 17 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Frekuensi Bimbingan teknis ttg pengelolaan keuangan daerah	5 kali		1 kali			1 kali			
1.20 05 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Frekuensi pelaksanaan Pemungutan PBB, BPHTB, BBNKB, PABT dan PPh 21	5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 17 22	Pendataan Potensi Subyek/ Obyek pajak/ Retribusi Daerah	Jumlah potensi/omzet subyek/obyek pajak/ retribusi daerah	3950 wp/wr	775 wp/wr	790 wp/wr	790 wp/wr	100%	790 wp/wr	2340 wp/wr		
1.20 05 17 27	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah	Frekuensi kegiatan pengelolaan daftar gaji aparatur daerah	5 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 17 28	Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah SKP dan SKR	2670 wp	519 wp/wr	534 wp/wr	534 wp/wr	100%	534 wp/wr	1572 wp/wr		
1.20 05 17 30	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Batuan dan Hibah Daerah	Prosentase fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.20 05 17 32	Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah	Frekuensi sosialisasi dan Publikasi pajak daerah ke seluruh WP/ masyarakat	3 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.	100%	3 kec.	3 kec.		
1.20 05 17 33	Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD	5 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 17 34	Fasilitasi Penyaluran Dana Hibah AUSAID IEG	Prosentase fasilitasi dana hibah dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
1.20 05 17 35	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Frekuensi pelaksanaan money PAD	5 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg			
1.20 05 17 36	Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah	Prosentase pelaksanaan pengendalian anggaran pemerintah daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.20 05 17 3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah									
1.20 05 17 45	Bimbingan dan sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan daerah	frekuensi bimbingan dan sosialisasi peraturan pengelolaan keuda									
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.20 05 18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	prosentase peningkatan pengelolaan keuangan kota	85%		80%			80%			
1.20 05 18 05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Frekuensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan	10 X 81 skpd	2 X 81 skpd	2 X 81 skpd	2 X 81 skpd	100%	2 X 81 skpd	6 X 81 skpd		
1.20 05 18 07	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan	30 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	18 kali		
1.20 05 18 08	Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Regulasi PAD	5 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	100%	1 Produk	3 Produk		
1.20 05 23	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan	88%		83%			83%			
	Pengendalian Anggaran			4 x rakor	4 x rakor	4 x rakor		4 x rakor	8 x rakor		
1.20 05 23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan	88%		83%			83%			
1.20 05 23 02	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	Jumlah buku tentang juknis pelaksanaan apbd	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku		
1.20 05 23 05	Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah buku tentang jurnal keuangan daerah	5 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 23 07	Optimalisasi Pemungutan PAD Berbasis TI	Frekuensi pelaksanaan aplikasi PAD berbasi IT	5 keg.	1 Produk	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 23 08	Penyusunan dan Pengembangan sistem perencanaan dan akuntansi keuangan daerah berbasis TI	Frekuensi aplikasi sistem perencanaan dan akuntansi keuangan daerah berbasis TI	5 keg.		1 keg			1 keg	1 keg		
1.20 05 23 09	Penyusunan data base potensi sumber - sumber PAD	Frekuensi penyusunan aplikasi Data Base potensi sumber - sumber PAD	4 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg		
1.20 05 23 09	Pengadaan Sistim Aplikasi Pengelolaan Sarana prasarana PBB	frekuensi sistem aplikasi pengelolaan sarana prasarana PBB									
	Pengembangan sistim aplikasi akuntansi keuangan daerah	frekuensi pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan daerah									
1.2 31 06 0	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%		100%			100%			KASDA

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.2 31 06 07 0	Rekonsiliasi Kas	Prosentase sinkronisasi data dan pelaporan keuangan antar dinas terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.2 31 06 1 0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	prosentase pemenuhan dokumen RKA, Renja/RKT, Lakip dan PK/IKU									
1.2 31 06 2 0	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	memenuhi laporan keuangan semesteran									
1.2 31 06 8 0	Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah	memenuhi SPJ sesuai ketentuan yang berlaku									
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.2 31 17 0	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah	85%		75%			75%			
1.2 31 17 24 0	Penyusunan Jurnal, Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran	Prosentase tersusunnya Jurnal, Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%		
1.2 31 17 25 0	Evaluasi Pengelolaan Kas	Prosentase terlaksananya laporan penyerapan dana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%		
1.2 31 17 26 0	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Prosentase terpeliharanya SIPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.2 31 1 0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan administrasi perkantoran									
1.2 31 2 0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana apartur									
1.2 030 03 0 8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase jumlah apartur yang menggunakan atribut lengkap	100%		100%			100%			BAGIAN PERLENGKAPAN
1.2 030 03 02 8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pemenuhan seragam Soekarno Looks	5.000 stel	1600 stel	1800 stel	1600 stel	100%	1800 stel	8400 stel		
		Jumlah pemenuhan seragam PDH	5.000 stel	5000 stel		5000 stel	100%		10000 stel		
1.2 030 17 0 8	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah	85%		80%			80%			
1.2 030 17 16 0 8	Peningkatan manajemen aset barang daerah	Jumlah pengurus dan pemegang barang penerima honorarium	270 orang x 5	270 orang	270 orang	270 orang	100%	270 orang	270 orang x 3		
	Honor Pengurus dan pemegang barang	Jumlah Tim penghapusan penerima honorarium	15 orang x 5		15 orang	15 orang	100%	15 orang	15 orang x 3		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	Honor Tim Penghapusan dan tindaklanjutnya	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan SIMBADA	5 paket		1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	2 pkt		
	Pemeliharaan Simbada	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan GIS	5 paket		1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	2 pkt		
	Pemeliharaan GIS	Jumlah Dokumen Standart harga yang tersusun	5 paket		1 pkt	1 pkt	100%	1 pkt	2 pkt		
	Penyusunan Standart Harga	Frekuensi pelaksanaan sensus barang daerah	1 paket		2 kali	1 pkt	100%	1 pkt	3 pkt		
	Sensus Barang Daerah					1 keg		1 keg	1 keg		
1.2 030 1 0 8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran									
1.2 030 2 0 8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1.2 030 6 0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase Pemenuhan Sistem Pelaporan dan Kinerja dan Keuangan									
1.2 030 18 0 8	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
1.2 030 18 10 0 8	Fasilitasi keberansertaan pada event daerah dan hari besar nasional	Fasilitasi Keberansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional									
	PERANGKAT DAERAH										
1.2 030 05 0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan prosentase kualitas kinerja aparatur	100%		80%			80%			BAG. ORTALA
1.2 030 05 0 3	Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur	Jumlah KBK pada gelar budaya kerja	75 kelompok	71 kelompok	71 kelompok	1 kelompok	1.4%	75 kelompok	147 kelompok		
1.2 030 06 0 3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%		100%			100%			
1.2 030 06 05 0 3	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok		
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keberansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.2 030 30 0 3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	100%		30%			30%			
1.2 030 30 06 0 3	Penyusunan instrumen Analisa Jabatan PNS	Jumlah jabatan di SKPD yang telah berdasarkan Analisa jabatan	49 SKPD	49 SKPD		49 SKPD	100%		49 SKPD		
1.2 030 30 22 0 3	Penyusunan Analisa Beban Kerja PNS	Jumlah SKPD yang melakukan ABK	49 SKPD	49 SKPD		47 SKPD	100%		47 SKPD x 2		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.2 030 30 24 0 3	Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS	Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatan strukturalnya									
1.2 030 30 25 0 3	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi	Prosentase fasilitasi kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai tahapan dan road map yang telah ditetapkan									
1.2 030 31 0 3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	prosentase Peningkatan kualitas pelayanan prima	80%		20%			20%			
1.2 030 31 04 0 3	Pelaksanaan Lomba UPP dan Pameran Pelayanan Publik	Lomba UPP dan Pameran Pelayanan Publik	100 peserta	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	6 keg		
1.2 030 31 05 0 3	Penyusunan SOP dan SPP SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun SOP dan SPP	49 SKPD	49 SKPD	49 SKPD	49 SKPD	100%		49 SKPD		
1.2 030 31 06 0 3	Fasilitasi Penyusunan IKM	Jumlah SKPD yang melakukan IKM	4 SKPD	1 SKPD	1 SKPD	6 SKPD	600%	1 SKPD	1 SKPD		
1.2 030 31 07 0 3	Fasilitasi pengurusan Sertifikasi ISO	Jumlah SKPD yang melakukan ISO	3 SKPD					0 SKPD			
1.2 030 32 0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Peningkatan prosentase kapasitas kelembagaan	80%		20%			20%			
1.2 030 32 02 0 3	Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	Jumlah SKPD yang perlu dikaji pelaksanaan wewenang dan tupoksinya	15 SKPD	2 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	150%	3 SKPD	5 SKPD		
1.2 030 32 03 0 3	Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang disusun	6 dok	5 dok	1 dok	5 dok	500%	1 dok	5 dok		
1.2 030 32 04 0 3	Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah tupoksi SKPD yang dievaluasi	25 SKPD		3 SKPD	5 SKPD	60%	5 SKPD	8 SKPD		
	KEPEGAWAIAN										
1.2 33 04 0	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Frekusensi fasilitasi pindah / purna tugas PNS	100%		100%			100%			BKD
1.2 33 04 01 0	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah SK Pemberhentian dan Pemberian Tali Asih bagi Pegawai yang Pensiun	500 SK 550 Tali Asih	100 SK 114 Tali Asih	100 SK 110 Tali Asih	100 SK 114 Tali Asih	100%	100 SK 110 Tali Asih	100 SK 114 Tali Asih		
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
1.2 33 29 0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase pemenuhan diklat pegawai	90%		80%			80%			
1.2 33 29 01 0	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Jumlah Diklat Prajabatan	300 Orang		200 Orang			300 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.2 33 29 02 0	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Jumlah Pengiriman Diklat Pim II, III, IV	13 Org Diklat Pim II, 31 Org Diklat Pim III, 200 Org Diklat Pim IV	3 Org Diklat Pim II, 4 Org Diklat Pim III, 40 Org Diklat Pim IV	3 Org Diklat Pim II, 4 Org Diklat Pim III, 40 Org Diklat Pim IV	2 Org Diklat Pim II, 10 Org Diklat Pim III, 80 Org Diklat Pim IV	100%	3 Org Diklat Pim II, 6 Org Diklat Pim III, 40 Org Diklat Pim IV	3 Org Diklat Pim II, 6 Org Diklat Pim III, 40 Org Diklat Pim IV		
1.2 33 29 03 0	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Teknis	674 Orang		137 Orang			137 Orang			
1.2 33 29 05 0	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas	200 Org	90 Org	40 Org	90 Org	200%	40 Org	130 Org		
1.2 33 29 06 0	Pengujian Kesehatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Diuji Kesehatannya	1600 Orang	18 Orang	320 Orang	18 Orang	5,60%	320 Orang	338 Orang		
	Evaluasi Pasca Diklat	Jumlah Evaluasi Pasca Diklat	4 Kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 Kali	1 kali		
	Fit & Proper Test Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang Menjalani Fit & Proper Test	280 Org		70 Org			70 Org			
1.2 33 29 10 0	Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah CPNS Mengikuti Orientasi									
1.2 33 30 0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	22500 Org 11 Keg		4500 Org 11 Keg			4500 Org 11 Keg			
1.2 33 30 01 0	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah Rumusan Formasi Pegawai	3 Kelompok Jabatan	3 kelompok Jabatan	3 kelompok Jabatan	3 kelompok Jabatan		3 Kelompok Jabatan	3 Kelompok Jabatan		
1.2 33 30 02 0	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah CPNS hasil seleksi	1500 Org		300 Org			300 Org	300 Org		
1.2 33 30 03 0	Penempatan PNS	Jumlah kelompok jabatan hasil Pengisian dan Penataan Formasi	12 Kelompok Jabatan	12 Kelompok Jabatan	12 Kelompok Jabatan	12 Kelompok Jabatan		12 Kelompok Jabatan	12 Kelompok Jabatan		
1.2 33 30 04 0	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat	4000 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang		800 Orang	1600 Orang		
1.2 33 30 05 0	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data pegawai yang dikelola	4500 Org	4500 Org	4500 Org	4500 Org		4500 Org	4500 Org		
1.2 33 30 07 0	Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	Frekuensi pelaksanaan Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar	5 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali		1 Kali	3 Kali		
1.2 33 30 08 0	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS penerima Satyalencana	2500 Org	500 Org	500 Org	500 Org		500 Org	1000 Org		
1.2 33 30 12 0	Pemberian biaya penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Jumlah Praja IPDN hasil Seleksi	10 Org	1 Org	2 Org	1 Org		2 Org	3 Org		
1.2 33 30 17 0	Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian (Karpeg, Taspen, Askes, Bapertarum, Karis, dan Karsu)	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis		6 Jenis	12 Jenis		
1.2 33 30 18 0	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah pegawai penerima bingkisan Hari Raya	25000 Org		5000 Org	5000 Org		5000 Org	10000 Org		
1.2 33 30 19 0	Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah PNS yang melaksanakan Sumpah Janji	1800 orang		300 Org			300 Org	300 Org		
		Jumlah sasaran Self Digest Training	1000 orang		200 Org			200 Org	200 Org		
		Jumlah Pegawai yang menerima pemantapan pelaksanaan tugas	25 kali	5 kali	5 kali	5 kali		5 kali	10 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
		Jumlah Pegawai yang menerima siraman rohani	42 kali	6 kali	9 kali	6 kali		9 kali	15 kali		
		Jumlah Pegawai yang mengisi DP3	4500 orang	4000 orang	4500 orang	4000 orang		4500 orang	8500 orang		
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan Indisipliner/Ijin Cerai	250 orang	50 Org	50 Org	50 Org		50 Org	100 Org		
		Pengadaan Alat Finger Print.	137 unit		50 unit	50 unit					
1.2 33 30 20 0	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi Jabatan Fungsional	3 Kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 Kali	1 Kali		
	PERSANDIAN										
1.2 030 01 0 7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%		100%			100%			BAGIAN UMUM
1.2 030 01 20 0 7	Pengelolaan Sistem Surat Menyurat dan Sandi	Prosentase pengelolaan sistem surat menyurat dan telekomunikasi sandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1.22 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	85%		75%			75%			BAPEMAS
1.22 01 15 07	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase fasilitasi program PPMK	100%		100%			100%			
1.22 01 15 10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan Sanitasi	Prosentase pelaksanaan sosialisasi penerapan tata cara dan mekanisme kerja KSM Sanitasi	100%		100%			100%			
1.22 01 15 5	Evaluasi kelurahan berhasil	Evaluasi dan penilaian kelurahan berhasil									
1.22 01 15 9	Pengembangan Labsite dan Implementasi serta Pendampingan SMPP	PendampinganKegiatan jalin Kesra fasilitasi TMMKB Kes fasilitas PPKM									
1.22 01 15 12	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Pokja PKK Kota Blitar									
1.22 01 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	100%		80%			80%			
1.22 01 17 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa/kelurahan	Posentase pelaksanaan penilaian kelurahan berhasil dan BBGRM	100%		80%			80%			
1.22 01 18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Prosentase pemanfaatan profil kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan	80%		65%			65%			
1.22 01 18 06	Penyusunan dan pendayagunaan Profil Kelurahan	Prosentase pemenuhan profil keluaran	5 dok		1 dok			1 dok			

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
	URUSAN SOSIAL										
1.13 01 15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	45%		10%			10%			DINSOSNAKER
1.13 01 15 05	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan	252 orang	21 orang	42 orang	21 orang	50%	63 orang	63 orang		
1.13 01 15 07	Fasilitasi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang menerima peralatan sekolah	2400 orang	300 orang	525 orang	300 orang	57,42%	525 orang	1350 orang		
1.13 01 15 09	Perlindungan dan Pembinaan Sosial Bagi Orang-orang Terlantar dan PMKS Lainnya	Jumlah WTS, Ankal, Gepeng	1125 orang	152 orang	250 orang	152 orang	60,80%	250 orang	652 orang		
	Pelatihan keterampilan bagi Masyarakat di Lingkungan Pabrik Rokok				1 keg			1 keg			
1.13 01 16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	Prosentase pelayanan rehabilitasi kesejahteraan daerah	100%		100%			100%			
1.13 01 16 10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah anggota TAGANA yang siap siaga	150 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	90 orang		
1.13 01 16 12	Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial	Jumlah peserta tetirah bagi anak usia SD yg bermasalah sosial	250 anak	50 anak	50 anak	50 anak	100%	50 anak	10 anak		
1.13 01 16 13	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia	Jumlah Lansia yang difasilitasi	9000 lansia	2000 lansia	2000 lansia	2000 lansia	100%	2000 lansia	6000 lansia		
		Jumlah lansia yang mengikuti wisata lansia	480 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	360 orang		
1.04 01 18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Prosentase perbaikan perumahan akibat bencana alam	100%								
1.04 01 18 02	Fasilitas dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	Jumlah rumah yang difasilitasi	2 rumah	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 unit		
1.04 01 20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	prosentase peningkatan sarana prasarana pemakaman yang layak pakai	100%		70%			80%			
1.04 01 20 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	10 kali	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	6 lokasi		
1.13 01 21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	prosentase peningkatan keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	85%		75%			75%			
1.13 01 21 02	Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial	310 lembaga	62 lembaga	62 lembaga	62 lembaga	100%	62 lembaga	186 lembaga		
1.13 01 21 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Guru ngaji, P3N/Modin, guru minggu dan lembaga sosial keagamaan	1878 org dan 400 lembaga x 5	1815 org dan 40 lembaga	1878 org dan 40 lembaga	1815 org dan 40 lembaga	96,65%	1878 org dan 40 lembaga	1815 org dan 40 lembaga x 3		
1.13 01 21 05	Pembinaan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci Makam penerima santunan	61 makam 85 orang x 5	61 makam 85 orang	61 makam 85 orang	61 makam 85 orang	100%	61 makam 85 orang	61 makam 85 orang x 3		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.1 030 6 3 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan									
	URUSAN PERPUSTAKAAN										
1.26 010 01 4	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan Fasilitas Taman Baca	85%		80%			80%			UPTB PSB
1.26 010 01 01 4	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah peserta sosialisasi minat baca masyarakat	70 orang		70 orang			70 orang	138 orang		
1.26 010 01 09 4	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan	Jumlah penyediaan bahan pustaka perpustakaan	43 buku	43 buku	43 buku	43 buku	100%	43 buku	117 buku		
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca				1 keg			1 keg	1 keg		
1.01 010 21 4	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Prosentase peningkatan Pelayanan Pendidikan	85%		85%			85%			
1.01 010 21 08 4	Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Frekuensi penyelenggaraan metode belajar mengajar menggunakan TI untuk guru BP, MGMP, guru SMP MAPEL yang di UANkan	5 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel	1 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel	1 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel	1 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel	100%	1 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel	3 kali untuk 40 guru BP & 432 guru mapel		
	URUSAN PILIHAN										
	URUSAN PERTANIAN										
2.0 01 15 1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Prosentase lembaga petani yang terlegalisasi oleh Dinas Pertanian	90%		80%			80%			DINAS PERTANIAN
2.0 01 15 03 1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah petani Kota Blitar yg mengikuti forum petani Nasional	8 org	7 org	3 org			3 org	10 org		
		Jumlah kelompok tani yang dilegalisasi sbg binaan Dinas Pertanian	130 klp	129 klp	100 klp			110 klp	239 klp		
		Jumlah petani yg telah terdaftar resmi menjadi anggota klp. Tani	4826 org	4825 org	4626 org	4626 org	100%	4626 org	4626 org		
		Jumlah HIPPA/GHIPPA yg mampu bereorganisasi	23 klp	22 klp	23 klp			23 klp	23 klp		
		Jumlah anggota HIPPA/GHIPPA yg telah mengikuti SLTGA	40 org	39 org							
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis				1 keg			1 keg			
	Operasional PUAP				12 bulan			12 bulan			
2.0 01 16 1	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Prosentase Produk unggulan pertanian yang terpromosikan	75%		65%			65%			
2.0 01 16 05 1	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/ perdesaan produksi hasil pertanian /perkebunan	Jumlah Pengadaan jasa kerja pemeliharaan Kebun Bibit, BBI & PIAIH	4.040 HOK	808 HOK	808 HOK	808 HOK	100%	808 HOK	808 HOK		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
		Juml. Pengadaan sarana penunjang operasional Kebun Bibit, BBI & PIAIH	5 item	5 item	5 item	5 item	100%	5 item	5 item		
		Jumlah Lokasi tagihan PBB yg terbayar	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi		
2.0 01 16 07 1	Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event promosi produk unggulan pertanian di Kota Blitar	12 event	2 event	2 event	2 event	100%	2 event	4 event		
		Jumlah partisipasi mengikuti event promosi produk unggulan pertanian di luar Kota Blitar	16 event	3 event	3 event	3 event	100%	3 event	6 event		
		Jumlah buku katalog produk unggulan pertanian yg tersusun	2 buku		-			1 buku	1 buku		
		Jumlah bulletin pertanian yg tersusun	2 bulletin	1 bulletin	1 bulletin	1 bulletin	100%	-	1 bulletin		
		Jumlah brosur/leaflet yg tersusun	4 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%	-	2 buah		
		Jumlah pengadaan spanduk/X banner	6 buah	2 buah	2 buah	2 buah	100%	2 buah	4 buah		
2.0 01 17 1	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jumlah petani yang bertambah aksesnya terhadap teknologi pertanian	500 orang		100 orang			100 orang			
2.0 01 17 04 1	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna	Jumlah Lokasi demplot budidaya padi	5 lokasi	3 kec	3 kec	3 kec	100%	1 lokasi	3 kec		
		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan perbanyakan agens hayati	4 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali		
		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan pembuatan pupuk organik	7 kali	1 kali	1 kali			1 kali	2 kali		
		Jumlah pelaksanaan Farm Field Day	3 kali		1 kali			1 kali	1 kali		
		Kapasitas sewa jasa internet	60 bln	12 bln	12 bln			12 bln	24 bln		
		Jumlah Pelaksanaan SLPHT	2 kali	2 kali	-			-	-		
		Jumlah Pelaksanaan SLPTT	2 kali	2 kali	1 kali			1 kali	1 kali		
	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna				1 keg			1 keg	1 keg		
2.0 01 18 1	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Prosentase Peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	25%		5%			5%			
2.0 01 18 02 1	Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	jumlah pengadaan pupuk organik untuk dibantukan	240 ton		80 ton			80 ton			
		jumlah pengadaan power wider untuk dibantukan		3 unit		3 unit	100%	-	3 unit		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
1.12 01 15 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	jumlah pelaksanaan penyuluhan gemar makan ikan, gemar makan telur dan susu, gemar makan sayuran dan buah									
1.12 01 21	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Prosentase peningkatan produksi hasil ternak sapi & kambing; peningkatan usaha peternakan	3%								
1.12 01 21 8	Pengembangan agribisnis peternakan	Pelatihan dan pembuatan dem unit pakan ternak; Pelatihan beternak burung kenari & bantuan bibit burung kenari									
1.12 01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Prosentase peningkatan produktivitas perikanan	35%								
1.12 01 20 2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Pertemuan kelompok budidaya ikan									
1.12 01 20 3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pelatihan pembuatan pakan ikan									
1.12 01 20 4	Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)	Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana penunjang perikanan									
1.12 01 24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	Prosentase ketersediaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	47%								
1.12 01 24 8	Pembangunan pintu air	Pembangunan pintu air									
1.12 01 24 9	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Pembuatan sudetan saluran; perbaikan tinggi rendah saluran air; pengerukan sungai									
1.12 01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan & rehab. JITUT									
1.12 01 24 13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Perbaikan pintu air									
	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Prosentase peningkatan pelayanan pemotongan hewan di RPH	78%								
	URUSAN PARIWISATA										
1.1 01 15 7	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Prosentase peningkatan pengembangan nilai budaya	75%		60%			60%			DINAS KOMINPARDA
1.1 01 15 05 7	Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya	Frekuensi pelaksanaan pementasan budaya daerah	260 kali		52 kali			52 kali	52 kali		
2.0 01 15 4	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	60%		40%			40%			
2.0 01 15 03 4	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah peserta study banding Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) ke daerah lain untuk pelaku wisata	200 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	100 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
2.0 01 15 05 4	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Frekuensi pelaksanaan promosi pariwisata melalui festival dan AWN	10 even dan 34.125 exp media	2 even dan 6825 exp media	2 even dan 6825 exp media	2 even dan 6825 exp media	100%	2 even dan 6825 exp media	4 even dan 13750 exp media		
2.0 01 15 07 4	Pengembangan statistik kepariwisataan	Pembuatan profile pariwisata Kota Blitar, pembuatan database pariwisata	4 keg						94%		
2.0 01 15 4 4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Frekuensi pelaksanaan koordinasi sektor pendukung pariwisata									
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional				1 keg			1 keg	1 keg		
2.0 01 16 4	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang representatif	50%		10%			10%			
2.0 01 16 06 4	Pengembangan daerah tujuan pariwisata	Prosentase pelaksanaan Festival wisata kuliner	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
1.1 01 16 7	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Frekuensi pelestarian budaya khas Kota Blitar	3 macam even		3 macam even			3 macam even			
1.1 01 16 01 7	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Frekuensi Pelaksanaan Grebeg Pancasila	5 keg	1 keg.	1 keg.			1 keg.	1 keg.		
1.1 01 16 06 7	Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Frekuensi pelaksanaan Haul Bung Karno	5 kali		1 kali			1 kali	1 kali		
1.1 01 16 07 7	Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah	Frekuensi pelaksanaan Drama Kolosal PETA	5 keg	1 keg.	1 keg.			1 keg.	1 keg.		
2.0 01 17 4	PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Prosentase peningkatan promosi wisata Kota Blitar	60%		10%			10%			
2.0 01 17 07 4	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Frekuensi Pemilihan Kangmas Diajeng, pengiriman dan pemberdayaan Duta Wisata kangmas Diajeng	5 keg, 75 kali pengiriman	1 keg, 15 kali pengiriman	1 keg, 15 kali pengiriman	1 keg, 15 kali pengiriman	100%	1 keg, 15 kali pengiriman	3 keg, 15 kali pengiriman		
	Fasilitasi Pemungut Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata				1 keg			1 keg	1 keg		
2.0 01 17 09 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sasaran penarikan pajak dan retribusi daerah	348 obyek	348 obyek	348 obyek	348 obyek	100%	348 obyek	348 obyek		
1.1 01 17 7	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	45%		5%			5%			
1.1 01 17 04 7	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah pelaksanaan pengiriman duta seni ke TMII Jakarta	5 keg	1 keg	1 keg			1 keg			
1.1 01 17 05 7	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan keikutsertaan dalam festival seni budaya	25 keg	5 keg	5 keg			5 keg	5 keg		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
2.0 010 22 1 4 1	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang perindustrian	Pelatihan Batik, Konveksi, Pembuatan kripik buah, menjahit, sablon, cetak & resin bening, pengrajin yoyo, bubut kayu dan manisan buah									
2.0 010 22 2 4 1	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang perindustrian	Pengadaan peralatan Batik, konveksi, kripik buah, menjahit, cetak resin bening, sablon, kerajinan yoyo, pengering buah, pengrajin tas, perak, batik kayu, batik tulis dan bubut									
	URUSAN PERDAGANGAN										
2.06 01 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Prosentase pengawasan peredaran barang/jasa	100%		100%			100%			DISPERINDAG
2.06 01 15 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	Frekuensi Sosialisasi bahaya minuman beralkohol	27 kali		6 kali			6 kali	6 kali		
		Jumlah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	33 kali		7 kali			7 kali	7 kali		
2.06 01 15 05	Fasilitasi Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar	55 kali		11 kali			11 kali	11 kali		
		Jumlah sosialisasi UU perlindungan konsumen	9 kali		2 kali			2 kali	2 kali		
		Frekuensi fasilitasi tera ulang	55 kali		11 kali			11 kali	11 kali		
		Frekuensi fasilitasi ukur ulang	35 kali		7 kali			7 kali	7 kali		
	Pemberantasan barang kena cukai ilegal				1 keg			1 keg	1 keg		
2.06 01 18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	70%		60%			60%			
2.06 01 18 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah fasilitasi perjanjian bagi penyewa kios	510 orang	102 orang	102 orang	102 orang		102 orang	204 orang		
2.06 01 18 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data PKL/ UMKM yang valid	1000 PKL/ UMKM	1000 PKL/ UMKM	1000 PKL/ UMKM	1000 PKL/ UMKM		1000 PKL/ UMKM	1000 PKL/ UMKM		
1.19 11 18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai - nilai luhur kebangsaan	60%		40%			40%			
	Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah dan Hari Besar nasional							1 keg	1 keg		
2.06 01 19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Jumlah PKL terbina sesuai ketentuan lokasi yang diijinkan	90%		70%			70%			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---------	---	------------	----	----

[illegible]

-

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2015 ini memberi gambaran kondisi ekonomi makro Kota Blitar serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kondisi ekonomi makro Kota Blitar merupakan faktor penting dalam menyusun kerangka ekonomi daerah dan pendanaannya. Dari asumsi makro pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada tahun 2015 sebesar 7,03 % dengan perkiraan laju inflasi sebesar 5 % maka ada defisit anggaran sekitar 1,5 % PDB dengan pengelolaan subsidi BBM.

Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Daerah ini akan memberikan gambaran kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kota Blitar Tahun 2015, berikut rencana target ekonomi makro pada Tahun 2016.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kota Blitar sangat dipengaruhi perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global yang merupakan faktor penting dalam menyusun kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya. Dari asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 % dan defisit anggaran 1,5 % PDB dengan pengelolaan subsidi BBM.

Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, Kerangka Ekonomi Daerah ini akan memberikan gambaran kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum situasi perekonomian Kota Blitar Tahun 2014, berikut rencana target ekonomi makro pada Tahun 2015.

Selama kurun waktu tahun 2013 perekonomian Kota Blitar sangat stabil, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,78 % lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 6,2 %. Dalam rangka mencapai pemantapan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Pemerintah Kota Blitar melakukan harmonisasi kebijakan dan program. Sinergi kebijakan pembangunan dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif akan tetap dijaga agar kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat terus dilakukan tanpa mengesampingkan dampak lingkungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011 – 2015, pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar dilaksanakan melalui empat jalur, yaitu pertumbuhan (*pro-growth*), kesempatan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*propoor*) dan pelestarian lingkungan hidup (*pro gender*).

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 dan pemilihan kepala daerah serta terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing sehingga potensi daerah dapat terus berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Prakiraan Tahun 2014

Kondisi ekonomi Kota Blitar pada tahun 2013 secara umum dapat disampaikan sebagai berikut : *Pertama*, meningkatnya fasilitas infrastruktur masyarakat umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar.

Kedua, peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat kelurahan dalam rangka pemenuhan fasilitas infrastruktur lingkungan kelurahan. *Ketiga*, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam mekanisme pembangunan di Kota Blitar. *Keempat*, meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Blitar yang ditandai dengan tumbuh berkembangnya sektor informal di Kota Blitar. *Kelima*, semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kota Blitar dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 79,79.

Tahun 2014 diproyeksikan indikator kinerja daerah Kota Blitar terus membaik. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan membaik meskipun diperlukan keseimbangan pertumbuhan sektor makro dan mikro. Skenario pertumbuhan ekonomi Kota Blitar akan ditingkatkan dari 6,78 % di tahun 2012 menjadi 6,93 % di tahun 2013. Inflasi sebesar 5,59 %, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,18 % dan prosentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk turun menjadi 6 % serta indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 79,798.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar

NO	INDIKATOR	REALISASI		PROYEKSI	
		2012	2013	2014	2015
1	PDRB per kapita (Rp. juta)	17,586,252.00	18,504,347.88		
2	Laju pertumbuhan ekonomi	6.78	6.79	6.93	
3	Inflasi (%)	5.59	5.47	5.18	
4	Struktur PDRB (sektor)				
	- Sektor Primer (%)	7.02	6.68		
	- Sektor Sekunder (%)	16.52	15.76		
	- Sektor Tersier (%)	76.46	77.56		
5.	Jumlah penduduk	145.300	147,244.82		
6.	Jumlah penduduk miskin	8,438.29	7,249.14		
7.	Prosentase penduduk miskin (%)	6.76	7	6	
8.	PDRB ADHK Tahun 2000 (Rp Miliar)	1,122,463,449.00	1,221,394,145.01		
9.	IPM	78.30	79	79.79	
	a. Indeks Pendidikan				
	b. Indeks Kesehatan				
	c. Indeks Daya Beli				
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.66	6.66	6.51	6.23
11.	Pertumbuhan PDRB (%)	6.59	6.78	6.62	6.73

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Blitar, Desember 2013

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Pada Kota Blitar Tahun 2015 dan Tahun 2016

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Blitar saat ini, diperkirakan perekonomian daerah masih akan menghadapi sejumlah tantangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi pada tahun 2014 ini, ada agenda politik nasional Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dilanjutkan dengan agenda politik lokal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Tahun 2015, akan semakin menambah besar tantangan perekonomian Kota Blitar. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, mulai dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat, kemampuan daya beli sampai dengan laju inflasi daerah, beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi Kota Blitar seperti :

1. bagaimana mempercepat iklim investasi yang mampu menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di Kota Blitar. Apalagi secara legal formal sudah memiliki payung hukum, Kota Blitar secara struktur kelembagaan sudah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui KPT Kota Blitar;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang sekaligus mampu berperan untuk menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit;
3. bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk untuk mencapai hanya 0,50 % saja.

Oleh sebab itu, agar pertumbuhan ekonomi daerah berjalan pada jalur yang benar “*on the track*” perlu dijaga melalui penciptaan kondisi keuangan daerah yang mantap. Salah satu diantaranya melalui pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dilengkapi data administrasi yang tertib dan akurat serta layak secara ekonomis. Disamping itu, juga dilakukan optimalisasi penerimaan daerah khususnya sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi

pajak dan retribusi daerah, termasuk meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi secara signifikan.

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Pada Kota Blitar Tahun 2015 dan Tahun 2016

Diperkirakan perekonomian Kota Blitar masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1). Percepatan pertumbuhan ekonomi diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2). Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar, sehingga komitmen yang lebih dalam perbaikan iklim investasi tersebut telah dan terus dilakukan dengan mengadakan perbaikan pada sisi peraturan perundang-undangan, teknis pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasinya.
- 3). Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur sangat dibutuhkan dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- 4). Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Pada Kota Blitar Tahun 2015 dan Tahun 2016

Perkembangan ekonomi global menjelang akhir tahun 2013 masih diselimuti oleh berbagai tantangan, yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara-negara yang ingin tetap menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya, tidak terkecuali Indonesia. Kemampuan adaptasi terhadap dinamika perkembangan faktor internal dan eksternal akan sangat mempengaruhi iklim pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemampuan adaptasi merupakan kata kunci untuk *survive* di tengah indikasi perkembangan ekonomi global yang masih rentan terhadap ketidakpastian.

Diproyeksikan bahwa *down-side risk* dari perkembangan ekonomi global masih tetap tinggi, perkembangan ekonomi di kawasan Zona Euro dengan berbagai dampak turunan, dari masalah pengangguran dan beban utang pemerintah yang tinggi, serta kebijakan *tapering off* atau kebijakan pengurangan stimulus moneter AS diyakini akan sangat mempengaruhi konstelasi ekonomi global. Dengan berbagai konstelasi perkembangan ekonomi global dimaksud, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2014 hanya akan mencapai 3.6%, World Bank dan OEDC juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara maju tahun 2014 akan mencapai 2,1% dan 2,3%. Berbagai studi yang dilakukan lembaga internasional memberikan konklusi bahwa pendorong pertumbuhan ekonomi global masih akan tetap berasal dari negara maju, sementara pertumbuhan ekonomi *emerging countries* diperkirakan melambat dalam lima tahun mendatang.

Beberapa asumsi prospek perekonomian dunia tersebut secara tidak langsung cukup signifikan mempengaruhi perekonomian lokal, disamping kekuatan ekonomi daerah sendiri. Dengan melihat kekuatan dan kondisi perekonomian Kota Blitar pada akhir tahun 2013 dan awal 2014, dengan melakukan analisis tantangan perekonomian yang diperkirakan berengaruh pada masa 2 tahun yang akan datang, maka secara umum prospek perekonomian pada tahun 2015 dan 2016 nanti adalah :

- 1). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus menguat sebesar 7,03 % dan pada Tahun 2016 mampu tumbuh 7,17%.
- 2). Inflasi diperkirakan pada kisaran angka dua digit yaitu sebesar 4,93%, target pada Tahun 2015 sebesar 5,00% dan tahun 2016 tetap pada angka 5,00 %.
- 3). Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2015 dapat ditekan dibawah 6,80%, dan tahun 2016 dapat tetap dipertahankan.
- 4). Diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2015 dapat turun menjadi 6 % dan terus menunjukkan tren penurunan menjadi 5% pada tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah bertumpu pada sumber-sumber penerimaan yang meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta kebutuhan pembiayaan operasional program dan kegiatan yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah diarahkan pada upaya lebih mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam kerangka otonomi daerah serta menangkap peluang yang diberikan/ditawarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun sumber pendapatan lain yang sah.

Pembiayaan daerah diarahkan untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan kegiatan yang bersifat rutin serta kewajiban Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kebutuhan belanja daerah terus diupayakan untuk dapat terpenuhi secara keseluruhan dari berbagai sumber pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi defisit ataupun surplus anggaran daerah. Realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2011-2013 mengalami kenaikan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan prediksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar 20,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.434.650.875.030,00, pada Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar 19,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.455.783.543.330,00, pada Tahun Anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar 25,05 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.486.230.960.000,00 dan pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan naik sebesar 22,72 % dari target dalam RPJMD sebesar Rp.516.678.380.010,00.

Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2011-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,54 %. Pertumbuhan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 22,91 % dan komponen Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,84%, sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi setiap tahun dimana besaran pendapatan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dilaksanakan disetiap Daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk peningkatan Pajak Daerah salah satunya disebabkan karena mulai tahun 2014 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah beralih menjadi komponen Pajak Daerah. Berdasarkan pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu 2011-2014 diatas, maka proyeksi total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.636.094.561.634,34. Komponen Dana Perimbangan tetap menjadi sumber pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar yang diperhitungkan

sebesar Rp.466.286.382.198,00 atau 73,30% dari total target pendapatan daerah. Sedangkan untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan sebesar Rp.77.251.719.314,34 atau 12,14% dari total pendapatan daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperhitungkan sebesar Rp.92.556.460.122,00 atau 14,55% dari total pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu 2011-2013 dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realiasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

No	Pendapatan Daerah	Realisasi			Target	
		2011	2012	2013	2014	2015
1.1	Pendapatan Asli Daerah	52.564.078.517,39	63.640.945.338,63	72.673.136.736,86	75.234.999.067,60	77.251.719.314,34
1.1.1	Pajak Daerah	10.533.996.120,50	11.156.119.478,60	12.357.982.714,67	16.524.169.867,80	18.365.883.277,56
1.1.2	Retribusi Daerah	6.687.731.370,00	6.918.701.401,90	7.961.781.348,25	6.977.798.649,80	7.189.404.706,72
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	801.536.636,75	949.883.433,97	865.904.541,66	950.000.000,00	872.441.537,46
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	34.540.814.390,14	44.616.241.024,16	51.487.468.132,28	50.783.030.550,00	50.823.989.792,61
1.2	Dana Perimbangan	312.957.658.216,00	386.200.075.755,00	434.688.185.289,00	466.286.382.198,00	466.286.382.198,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	39.429.123.216,00	52.898.747.755,00	49.307.449.289,00	43.267.591.198,00	43.267.591.198,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	250.086.735.000,00	315.773.358.000,00	355.673.006.000,00	392.221.911.000,00	392.221.911.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	23.441.800.000,00	17.527.970.000,00	29.707.730.000,00	30.796.880.000,00	30.796.880.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	159.673.490.428,00	92.872.539.114,00	100.657.098.652,00	92.556.460.122,00	92.556.460.122,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.969.999.500,00	1.856.270.850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	30.230.679.238,00	30.069.252.621,00	28.950.932.652,00	31.261.051.122,00	31.261.051.122,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	94.082.817.960,00	45.450.355.000,00	58.978.981.000,00	58.596.532.000,00	58.596.532.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah lainnya	32.389.993.730,00	15.496.660.643,00	12.727.185.000,00	2.698.877.000,00	2.698.877.000,00
Jumlah		525.195.227.161,39	542.713.560.207,03	608.018.420.677,86	634.077.841.387,60	636.094.561.634,34

Sumber : DPKD Kota Blitar Tahun 2014

Kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan program prioritas yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2015 pemerintah Kota Blitar berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah terutama pada komponen pendapatan daerah serta efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah yang mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Memperhatikan proyeksi pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas, kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka prinsip-prinsip dalam kebijakan pendapatan daerah Kota Blitar Tahun 2015 adalah :

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2015 akan memberikan gambaran kondisi riil pencapaian target pendapatan daerah sampai dengan Tahun 2013, prediksi target pendapatan tahun 2014 dan proyeksi sumber-sumber pendapatan dan target tahun 2015 sebagaimana Tabel 3.2 diatas.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar, meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan anggaran pada tahun anggaran 2014 dan kebutuhan pengangkatan Calon PNSD serta ditambah akses sebesar 2,5% untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

b. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah kepada pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan mendasarkan pada hasil kajian dan kelayakan mendapat bantuan hibah. Pemberian hibah mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, serta diberikan kepada lembaga pemerintah di bidang tertentu yang berperan dalam melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial juga dialokasikan untuk mendukung program nasional dan/atau provinsi yang mensyaratkan pendampingan dana dalam bentuk bantuan

sosial melalui APBD. Belanja bantuan sosial juga dialokasikan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan sosial yang harus segera mendapatkan penanganan. Pemberian bantuan sosial berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

d. **Belanja Bantuan Keuangan**

Penganggaran belanja bantuan keuangan dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Blitar berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja langsung pada tahun anggaran 2015 diarahkan untuk pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dimana tahun 2015 merupakan tahun terakhir pencapaian target kinerja RPJMD dimaksud.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2013
dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

No	Belanja Daerah	Realisasi			Target TA. 2014
		TA. 2011	TA. 2012	TA. 2013	
2.1	Belanja Tidak Langsung	239.188.469.892,31	276.655.734.068,00	295.326.259.671,09	322.580.455.075,00
2.1.1	Belanja Pegawai	223.941.143.727,31	252.421.887.115,00	274.319.725.416,09	297.041.100.625,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.765.833.000,00	18.601.183.843,00	15.147.867.000,00	17.464.004.450,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.998.881.500,00	5.150.535.069,00	5.546.204.510,00	6.825.350.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	466.661.665,00	466.454.041,00	312.462.745,00	500.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.950.000,00	15.674.000,00	0,00	750.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	294.139.721.568,13	241.561.648.940,61	299.268.674.443,50	311.497.386.312,60
2.2.1	Belanja Pegawai	11.291.488.214,00	10.516.041.782,00	11.048.904.072,00	11.821.408.855,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.861.042.000,77	140.057.519.225,61	181.044.332.108,50	190.900.932.463,52
2.2.3	Belanja Modal	164.987.191.353,36	90.988.087.933,00	107.175.438.263,00	108.775.044.994,08
	Jumlah Belanja Daerah	533.328.191.460,44	518.217.383.008,61	594.594.934.114,59	634.077.841.387,60

Sumber : DPKD Kota Blitar Tahun 2014

Dengan demikian, arah kebijakan penggunaan dan pemanfaatan anggaran belanja pada APBD Kota Blitar tahun 2015, akan diprioritaskan untuk :

- a) Mencukupi belanja wajib, terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai yang disebabkan adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program strategis daerah;
- b) Mewujudkan sasaran dan program-program prioritas pembangunan daerah sebagaimana arahan prioritas 2015 pada dokumen RPJMD Kota Blitar 2011-2015;
- c) Mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah direncanakan secara berkelanjutan.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pendapatan daerah dengan belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

1. Penerimaan Pembiayaan :
 - a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - f. Penerimaan piutang daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

Selama kurun waktu tahun 2011-2014 jumlah pembiayaan neto dalam struktur APBD Kota Blitar dialokasikan untuk menutup defisit dimana nilai terbesar dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2011-2013 dan target pembiayaan daerah tahun anggaran 2014 tergambarkan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011-2013
dan Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

No	Pembiayaan Daerah	Realisasi			Target
		2011	2012	2013	2014
3.1	Penerimaan Pembiayaan	31.363.725.732,97	20.802.526.631,92	49.397.193.737,94	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.522.614.899,97	20.630.761.383,92	45.044.331.060,94	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.450.000,00	32.066.952,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.839.660.833,00	139.698.296,00	4.352.862.677,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.600.000.000,00	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penanaman Modal (Investasi)	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	28.763.725.732,97	20.548.153.861,92	49.351.653.737,94	0,00

Sumber : DPKD Kota Blitar Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan pembiayaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dimana dalam perhitungannya bergantung pada penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya sehingga cenderung cukup sulit untuk diprediksi.

Apabila terjadi surplus anggaran, maka akan diutamakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah antara lain : pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran, maka ditetapkan pembiayaan yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Tahun 2015 sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015, merupakan tahap akhir seluruh rencana pembangunan jangka menengah. Prioritas pembangunan pada tahun terakhir 2015 diarahkan paa *“Penuntasan program-program yang mengarah pada pencapaian visi misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015”*. Diharapkan visi Kota Blitar Tahun 2015 dapat tercapai sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan yang mengarah pada pencapaian visi misi dari RPJP Kota Blitar Tahun 2005-2025.

Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu, perkembangan dinamika pembangunan di masyarakat melalui mekanisme Musrenbang RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional dengan kerangka pendanaan masing-masing program/kegiatan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan permasalahan yang ada di Kota Blitar serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2012-2015 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 dengan mengacu tujuan dan

sasaran yang terdapat pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan
 Sasaran Pembangunan Kota Blitar**

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015		
1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa	1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat kota blitar	Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal
	2. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan	1. Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan 2. Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma Sosial
2. Meningkatkan kualitas pendidikan & keterjangkauan pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan
		2. Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan
		3. Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015		
		pekerti
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata	1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan yg bermutu, merata dan terjangkau
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat
	2. Memantapkan penanggulangan kemiskinan yg komprehesif secara terpadu dan partisipatif	2. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	1. Meningkatkan pembangunan yang partisipatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan Religius melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015		
	kepada masyarakat	baik
	3. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Blitar Tahun 2015 didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan, identifikasi isu dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Kota Blitar dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015.

Prioritas pembangunan Kota Blitar untuk tahun 2015 merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 2011-2015. Berikut adalah gambaran keterkaitan antara Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana 2015 (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari
2.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
3.	Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan	Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan
4.	Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan	Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan
5.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6.	Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui Wajib Belajar 12 tahun	Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui Wajib Belajar 12 tahun
7.	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan
8.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan

	profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan	profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan
9.	Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan	Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan
10.	Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan
11.	Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
12.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah.
13.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat
14.	Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal	Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal

15.	Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi GPMK	Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi GPMK
16.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin
17.	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
18.	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
19.	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
20.	Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan	Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan
21.	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
22.	Peningkatan manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif	Peningkatan manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif
23.	Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup
24.	Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Peningkatan konservasi lingkungan hidup

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebagaimana uraian di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan dalam indikasi rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Kota Blitar pada tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel. 4.3.
Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

No	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal	1. Program Pengelolaan Kekaya-an Budaya	Prosentase peningkatan kualitas seni budaya	4%	Kominparda Bag. Humas Protokol, Kecamatan/ Kelurahan
		2. Program Pengelolaan Kera-gaman Budaya	Prosentase peningkatan jumlah ragam dan even budaya di Kota Blitar	70%	Kominparda Dikda, Kec Kelurahan
		3. Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase peningkatan pengembangan nilai budaya	60%	Kominparda Dinas Pendidikan, Kecamatan/ Kelurahan
2.	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan	52%	Bakesbang pol Linmas, Bag. Humas Protokol, Kecamatan & Kelurahan
3.	Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan	1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase peningkatan keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	80%	Bag. Kesra

		2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	95%	Bag. Kesra
4.	Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Pendidikan	85%	Dinas Pendidikan
		2. Program Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan fasilitas taman baca	85%	Dikda, UPT Pusat Sumber Belajar
		3. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah APK pendidikan anak usia dini	5836 siswa	Dikda dan UPTD Pendidikan
		4. Program Pendidikan Luar Biasa	Prosentase kelulusan pendidikan luar biasa	100%	Dikda dan UPTD Pendidikan
5.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik & tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi	45%	Dinas Pendidikan Daerah
6.	Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat melalui wajib belajar 12 tahun	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Prosentase Peningkatan kualitas pendidikan dasar 9 tahun yang diukur dari :	135%	Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan

			- % APK SD/MI/Pkt. A - % APK SMP/MTs/Pkt B - % APM SD/MI/Pkt. A -Angk. Lulus SD/MI -Angk.lulus SMP/MTs	150% 120% 100% 100%	
		2. Program Pendidikan Menengah	Prosentase Peningkatan kua litas pendidikan menengah yang diukur dari : - Prosen APK SMA/SMK/MA - Prosen APM SMA/SMK/MA - Angk. Lulus SMA/SMK/MA	150% 125% 100%	Dinas Pendidikan Daerah dan UPTD Pendidikan
7.	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk meningkatkan mutu serta daya saing lulusan	1. Program Pendidikan non Formal	Prosentase Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan non Formal	80%	Dinas Pendidikan Daerah
		2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan yang diukur dari angka rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf	11 thn dan 99%	Dinas Pendidikan Daerah
8.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta	1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	65%	Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan

	peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan	Pembantu dan Jaringannya			
		2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	90%	Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan
		3. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase obat dan makanan yang terjamin dan memenuhi syarat kesehatan	75%	Dinas Kesehatan Daerah
		4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase peningkatan mutu dan standar kesehatan	80%	Dinas Kesehatan Daerah, UPTD Kesehatan dan BPK RSD Mardi
		5. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan	80%	Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan
		6. Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan profesional yang memenuhi standar	80%	BPK RSD Mardi Waluyo

9.	Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan	1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – Paru	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	85%	BPK RSD Mardi Waluyo
		2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan pasien kurang mampu	80%	Dinas Kesehatan Daerah dan BPK RSD Mardi
		3. Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru	Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	RSD Mardi Waluyo
10	Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase keluarga dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	60%	DinKes dan UPTD Kesehatan
		2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase peningkatan gizi ibu hamil, balita dan lansia	75%	DinKes dan UPTD Kesehatan
		3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prosentase lingkungan yang terbebas dari penyakit menular	85%	DinasKes dan UPTD Kesehatan

11	Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase peningkatan usia harapan hidup	5%	DinKes dan UPTD Kesehatan
		2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase lingkungan yang bersanitasi standar	75%	DinKes dan UPTD Kesehatan
		3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja	70%	Bapemas dan KB dan UPTBnya
		4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Prosentase dan peningkatan peran dan fungsi PIKR di masing-masing sekolah	75%	Bapemas dan KB
		5. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Prosentase peningkatan mutu pelatih olahraga	80%	Bapemas dan KB
		6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prosentase pemasyarakatan olahraga	80%	Bapemas Dikda, Kelurahan
		7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Prosentase penngkatan sarana prasarana olahraga yang representatif	80%	KPABD, DKP, Kecamatan
12	Peningkatan kuantitas & kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	5%	Dinas Pertanian

		2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan destinasi pariwisata yang representatif	10%	Dinas Kominparda
		3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan terbangun	2 bh	DPU
		4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud terbangun	26 m	DPU
		5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan, jembatan dan trotoar terehabilitasi	20%	DPU
		6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah sar prasarana kebinamargaanyang terpelihara	4 unit	DPU
		7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase pengembangan jaringan irigasi dan air bersih	15%	DPU
		8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun	2 unit	DPU
		9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase pendampingan program PNPM P2KP	100%	DPU
		10. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kota	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana kota	25%	DPU

		11. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah buku analisa standar bangunan gedung dan desain prototipe bangunan	1 paket	DPU
		12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	90%	Bappeda
		13. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase kelayakan prasarana dan fasilitas LLAJ	75%	DinPerhubungan
		14. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase kualitas pelayanan angkutan	75%	Dinas Perhubungan Daerah
		15. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	85%	Dinhub
		16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	85%	Dinhub, Kantor Pasar
		17. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase sertifikasi aset daerah	70%	KPABD
		18. Program Pengembangan Informasi Pertanahan	Prosentase penyampaian informasi pertanahan ke masyarakat	80%	KPABD
13	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat	1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL terbina sesuai ketentuan lokasi yang diizinkan	80%	Dinas Perindag

		2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase peningkatan ketrampilan pemuda	60%	Bapemas KB
		3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase peningkatan peluang kerja yang diminati oleh pencari kerja	90%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah
		4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat	45%	Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan
		5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase peningkatan keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	80%	Dinsosnaker ,Bag. Kesra, Kecamatan
		6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase peningkatan peluang kerja yang diminati oleh pencari kerja	90%	Dinsosnaker
		7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase ketahanan pangan Kota Blitar	100%	Dinas Pertanian
		8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase lembaga petani yang terlegalisasi oleh Dinas Pertanian	85%	Dinas Pertanian
		9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Prosentase produk unggulan pertanian yang terpromosikan	70%	Dinas Pertanian

		10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah petani yang bertambah aksesnya terhadap teknologi pertanian	100 Org	Dinas Pertanian
		11. Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Prosentase peningkatan kinerja penyuluh pertanian	50%	Dinas Pertanian
		12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Prosentase peningkatan produksi hasil ternak sapi dan kambing	3%	Dinas Pertanian
		13. Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase peningkatan produktivitas perikanan	25%	Dinas Pertanian
14	Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase industri kecil dan menengah yang mampu berkembang	80%	Dinas Perindag
		2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase peningkatan usaha kecil menengah	80%	Dinas Koperasi dan UKM
		3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Prosentase pengembangan UMKM	30%	Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan dan Kelurahan

		4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Prosentase peningkatan keunggulan kompetitif	70%	Dinkop UKM dan Kecamatan
		5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	75%	Dinkop UKM
		6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase peningkatan nilai investasi	60%	Bag. Perekonomian, Disperindag
		7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase peningkatan investasi dan penanaman modal	70%	Bappeda, KPT
		8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Prosentase peningkatan pelayanan pemotongan hewan di RPH	75%	Dinas Pertanian
		9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	40%	Kominparda UPTD PIPP, Bag. Humas
15	Peningkatan sinergi penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar program	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase peningkatan pembangunan ekonomi	65%	Bappeda
		2. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Prosentase kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	70%	Bappeda

		3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Prosentase peningkatan perencanaan prasarana wilayah	80%	Bappeda
		4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	15%	Dinsosnaker , DPU
		5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Prosentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	90%	Dinsosnaker
		6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah kejadian penyakit ternak	0 kasus	Dinas Pertanian
16	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat, dan PMKS Lainnya	Prosentase penurunan jumlah Keluarga Miskin	29%	Dinsosnaker , Bappeda, Bag. Kesra, Bapemas kb Kecamatan, Kelurahan
		2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	100%	Dinsosnaker , Bag.Kesra, Kecamatan, Kelurahan
		3. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase peningkatan tertib administrasi	100%	Dinas Kependudukan & Capil Kecamatan dan Kel

		4. Program Keluarga Berencana	Prosentase peningkatan jumlah peserta KB	80%	Bapemas KB dan UPTBnya
		5. Program Pelayanan Kontrasepsi	Prosentase peningkatan peserta KB	75%	Bapemas KB
		6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Prosentase peningkatan peserta KB Mandiri	55%	Bapemas KB
		7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Prosentase peningkatan peran serta dan fungsi kader tribina dalam program KB	80%	Bapemas KB dan UPTBnya
17	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Prosentase pelayanan rehabilitasi kesejahteraan daerah	100%	Dinsosnaker Bag. Kesra, Kecamatan, Kelurahan
18	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	84%	Bapemas KB, Bag. Tapem, Kecamatan, Kelurahan
		2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78%	Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan, Kelurahan

19	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	Prosentase peningkatan kualitas anak dan perempuan	80%	Bapemas KB dan UPTBnya, Kecamatan, Kelurahan
		2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%	Bapemas KB dan UPTBnya
		3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase perlindungan terhadap perempuan	80%	Bapemas KB dan UPTBnya
20	Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan	1. Program Pengembangan Data/Informasi	Prosentase pemanfaatan data/ informasi dl proses perencanaan pembangunan	85%	DPU, Bappeda
		2. Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kota	80%	DPU, Bappeda
		3. Program Kerjasama Pembangunan	Prosentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program kerjasama pembangunan antar daerah	70%	Bappeda
		4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan kerjasama antar daerah	85%	Bag. Tapem, Bag. Umum, Bag. Humas Protokol, Irda

		5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase peningkatan kelancaran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat	78%	Dinas Kominparda , Bag. Humas dan Protokol
		6. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah ketersediaan dokumen bidang informasi dan komunikasi	3 jenis dok	Dinas Kominparda
		7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase pengawasan peredaran barang /jasa	100%	Disperindag
		8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	73%	Disperindag Kantor Pengelola Pasar & KPABD
		9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Prosentase penyebaran informasi pembangunan	80%	Kominparda , Humas Protokol
		10. Program Pengembangan Kemitraan	Prosentase peningkatan promosi wisata Kota Blitar	15%	Dinas Kominparda
21	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	1. Program Peningkatan Kapa sitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas perencanaan daerah	80%	DPU, Bappeda
		2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkan toran	100%	Seluruh SKPD

		3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	74%	S eluruh SKPD
		4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparatur	85%	Perlengkap an, Set DPRD, KPT, Pol PP
		5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	25%	Sekr. DPRD, BKD
		6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	Seluruh SKPD
		7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Prosentase peningkatan lembaga perwakilan rakyat	100%	Sekr. DPRD
		8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kep. Daerah 9.	Prosentase kinerja pemerintah selama 1 tahun	100%	Bag. Tapem, Bag. Umum, Sekr. DPRD
		10. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah	80%	DPKD
		11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan pengelolaan daerah	82%	Bag. Umum, DPKD, Staf Ahli

		12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan pembangunan	90%	DPKD, Inspektorat Daerah
		13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase peningkatan kualitas tenaga pemeriksa	80%	Inspektorat Daerah
		14. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase penurunan temuan dalam pengelolaan keuangan daerah	55%	Inspektorat Daerah
		15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan	85%	Bag. Ortala, DPKD, Kecamatan, KPT, Kelurahan
		16. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prsentase pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan	100%	Bag. Hukum, Bag. Ortala, Staf Ahli
		17. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase pemenuhan diklat pegawai	85%	BKD
		18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase pemanfaatan profil kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan	70%	Bapemas KB

		19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	4500 org	Bag. Ortala, BKD, Bappemas KB
		20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah	Prosentase peningkatan pelayanan prima kecamatan	80%	Kecamatan, Kelurahan, Bag. Ortala
		21. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan	70%	Bag. Tapem, Bag. Ortala
		22. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Prosentase pelaksanaan pelayanan perizinan daerah	100%	KPT
		23. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan	90%	Bappeda, Kecamatan, Kelurahan
		24. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase kelayakan sistem administrasi kearsipan	15%	KPABD
		25. Program Penyelamatan dan Pelestarian Barang/ Arsip Daerah	Prosentase barang/ arsip daerah yang terkelola dengan tertib	75%	KPABD, DKP
		26. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase sarana dan prasarana kearsipan yang dipelihara	100%	KPABD
		27. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	60%	KPABD

		28. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi terlatih	25%	Dinas Kominparda
		14. Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Prosentase peningkatan kinerja penyuluh pertanian	50%	Dinas Pertanian
		29. Program Pengembangan Informasi Pertanian	penyampaian informasi pertanian kepada masyarakat	80%	KPABD
22	Peningkatan manajemen pe-ngelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran pembangunan yang partisipatif	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah prasarana IPAL komunal yang terbangun	2 unit	DPU
		2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam & LH	Prasarana sarana informasi yang bisa diakses	100%	KLH, Kecamatan
23	Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup	1. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penyediaan air bersih dan sanitasi dasar permukiman	20 %	DPU
		2. Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan sosialisasi perencanaan tata ruang	70%	DPU dan Bappeda

		3. Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Gakin penerima IMB gratis, Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang & Persentase pemahaman IMB masyarakat	105 gakin 7 dok 10 %	DPU
		4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang	65%	DPU
		5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Prosentase peningkatan pengelolaan RTH	85%	DKP
24	Peningkatan konservasi lingkungan hidup	1. Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase penurunan tingkat pencemaran & perusakan lingkungan hidup	32%	DKP, KLH, Kecamatan
		2. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Prosentase peningkatan kualitas pengolahan sampah	95%	DKP
		3. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase peningkatan kualitas sumber daya alam	65%	KLH, Kec, Kelurahan
		4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kesesuaian baku mutu lingkungan	85%	KLH

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disini menggambarkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Blitar Tahun 2015, yang disusun berdasarkan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015. Dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas daerah ini juga akan direncanakan perkiraan maju untuk satu tahun berikutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, yaitu diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Blitar 2011-2015 untuk tahun 2015, yang mendapatkan masukan usulan masyarakat melalui forum musrenbang, konsultasi publik sampai dengan forum SKPD sebagai rencana definitif program dan kegiatan prioritas daerah. Selanjutnya, rencana ini dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Blitar tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

BAB VI

P E N U T U P

Pemerintah Kota Blitar setiap tahun, secara rutin mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD. Penyusunan ke-2 dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan menengah untuk jangka 5 tahunan (RPJMD) tersebut harus tetap mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa dokumen RKPD memiliki nilai strategis sebagai berikut :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran dari RPJMD;

4. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun RAPBD;
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagi Pemerintah Kota Blitar, Tahun 2015 mempunyai nilai historis dalam perjalanan RPJMD 2011-2015 Kota Blitar, sebagai periode akhir dari pencapaian seluruh rencana pembangunan jangka menengah sehingga pada tahun 2015 dilakukan penuntasan program-program yang mengarah pada pencapaian visi misi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2015 memegang peranan strategis dalam mengimplementasikan keseluruhan program-program prioritas daerah melalui kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar. RKPD Kota Blitar Tahun 2015 disusun dengan mengakomodasi perkembangan dan dinamika pembangunan di tingkat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu dinamika yang berkembang saat ini di Pemerintah Kota Blitar adalah adanya penataan kelembagaan baru. Seiring dengan telah ditetapkannya Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar tanggal 9 Desember 2013, ada beberapa SKPD yang digabung dan merger menjadi SKPD baru dan SKPD yang dipecah menjadi 2 atau lebih SKPD baru. Termasuk obyek penataan kelembagaan ini adalah penataan nama struktur organisasi internal di beberapa SKPD, seperti nama-nama bidang pada Bappeda dan seksi pada KPT Kota Blitar.

Sejak awal dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar Tahun 2015 ini harus tetap mempertimbangkan keberadaan SKPD yang sudah ditetapkan untuk kelembagaan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 nanti. Oleh karena itu, keterpaduan antara usulan kegiatan melalui mekanisme Musrenbang RKPD dengan program prioritas daerah melalui implementasi tupoksi SKPD saat ini dan SKPD baru nanti menjadi poin penting dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2015. Diharapkan pada Tahun 2015 nanti semua program dan kegiatan prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen RKPD Kota Blitar tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2015. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari usulan pembangunan masyarakat mulai dari musyawarah RT dan Rembug Warga tingkat RW yang dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di kecamatan. Proses selanjutnya harmonisasi dan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dengan rancangan Renja SKPD sebagai implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD, termasuk didalamnya dilakukan elaborasi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD).

Secara substantif, dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan hasil harmonisasi dan sinkronisasi antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan sebagai implementasi visi dan misi

Pemerintah Kota Blitar. RKPD Kota Blitar Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015, sekaligus sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sangat disadari, bahwa RKPD ini tidak serta merta bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan yang ada di Kota Blitar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, sebuah hasil perencanaan yang baik, masih harus ditindak lanjuti dengan proses pelaksanaan yang baik pula. Karena itu masih dibutuhkan apresiasi dan partisipasi aktif dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar beserta seluruh pemangku kepentingan masyarakat yang terkait untuk mempedomani, menjabarkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam RKPD Kota Blitar tahun 2015 ini.

Dalam implementasinya, tidak menutup kemungkinan RKPD Kota Blitar Tahun 2015 masih terjadi proses-proses penyesuaian dengan kondisi yang berkembang di tingkat masyarakat yang bersifat *bottom up* maupun *top down* sebagai konsekuensi dari adanya perubahan kebijakan di tingkat provinsi dan atau pemerintah pusat. Namun demikian berbagai macam dinamika perencanaan tersebut diharapkan tidak akan merubah substansi program/kegiatan yang telah digariskan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015.

Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2015 untuk dijadikan pedoman penerapannya sebagai berikut :

1. Arahan kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2015 agar terlaksana dengan baik sesuai target dan sasaran yang ditetapkan, maka seluruh unsur Pemerintahan Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki tanggung jawab bersama sesuai peran masing-masing untuk melaksanakannya.
2. SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai penjabaran RKPD Kota Blitar 2015. Renja SKPD yang telah disusun, selanjutnya dijadikan dasar penyusunan RKA-SKPD setelah disesuaikan dengan arahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas program/kegiatan dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Blitar. Termasuk dalam hal ini, RKPD Kota Blitar Tahun 2015 harus sudah memberikan ruang yang cukup kepada penyusunan Renja SKPD baru (Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013).
3. Terdapat hubungan kausalitas antara dokumen RKPD dengan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Blitar Tahun 2015. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dan berkompeten dalam penganggaran harus mampu bekerjasama dan konsisten dalam mewujudkan program dan kegiatan prioritas yang sudah direncanakan.
4. Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan *efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas* pelaksanaan rencana pembangunan

yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2015, sekaligus melaporkan secara berkala kepada Walikota Blitar melalui Kepala Bappeda Kota Blitar.

5. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meneguhkan kembali komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui penerapan di lapangan, melalui konsistensi menjalankan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2015.

Kualitas perencanaan dan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah, selain sikap, mental, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) juga memegang peran penting dalam mengimplementasikan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan mulai mekanisme perencanaan yang berkualitas, anggaran yang mencukupi sampai dengan kompetensi yang tinggi baik dari sisi kinerja, kapasitas dan ketrampilan individu para pelaku pembangunan, untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015.